



PROFIL STATISTIK
GENDER
KOTA DENPASAR
TAHUN 2022



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR**

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2022

Oleh

WIDHIAN

THINI

NI MADE

WIASTI

ALIFFIATI

DEWI AYU

WARMAD

EWI

AAA WULANDIRA SAWITRI DJELANTIK

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

PROFIL STATISTIK GENDER KOTA DENPASAR TAHUN 2022

Oleh :

WIDHIAN

THINI

NI MADE

WIASTI

ALIFFIATI

DEWI AYU

WARMAD

EWI

AAA WULANDIRA SAWITRI DJELANTIK

Cover /Tata letak:

MDR, Kt

Diterbitkan oleh:

SWASTA NULUS

Jl. Tukad Batanghari VI.B No. 9 Denpasar-Bali

Telp. (0361) 241340

Email: swastanulus@yahoo.com

Cetakan Pertama:

2022, xxvi + 175 hlm, 16 x 23 cm, Calibri, 12

Hak Cipta pada Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



SAMBUTAN

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kota Denpasar**

Om Swastyastu,



Puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widi Wasa karena berkat asung kertha wara nugrah-Nya penyusunan buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Agenda Pembangunan

Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan demikian, setiap negara akan harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber-sumber daya di tingkat global dan

nasional. Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai isu gender lintas sektor dalam pembangunan sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Pelaksanaannya begitu dinamis. Hal ini menuntut komitmen, keseriusan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia, apalagi Indonesia kini memasuki era 4.0 yang menitikberatkan aspek kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Penyusunan Profil Statistik Gender secara komprehensif menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan Profil Statistik Gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender dan berkelanjutan.

Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih banyak kepada Bapak Walikota Denpasar, OPD, Kajian Gender

dan Perlindungan Anak Universitas Udayana, serta semua pihak yang telah memfasilitasi sampai terwujudnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kepentingan pembangunan di Kota Denpasar.

Om, Shanti, Shanti, Shanti, Om

Denpasar, Agustus 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Denpasar



Dra. I Gusti Agung Sri Wetrawati, M.Si
NIP. 19660311 199503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan karena berkat asung kerta wara nugraha Ida Sanghyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa Buku Statistik Gender Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya.

Melalui buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar diharapkan para perencana dapat menggunakan data-data ini sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu-isu gender terutama yang menjadi salah satu permasalahan di Kota Denpasar.

Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar bekerja sama dengan Kajian Gender dan Perlindungan Anak Universitas Udayana.

Penyusunan buku profil ini merupakan kelanjutan dari buku profil tahun sebelumnya. Melalui kesempatan ini tim penyusun memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. Tim penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua

pihak yang telah memberikan kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini.

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi pembangunan Kota Denpasar khususnya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender diberbagai bidang pembangunan.

Tim Penyusun

EKSEKUTIF SUMMARY

Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan demikian, setiap negara akan harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber-sumber daya di tingkat global dan nasional. Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat, seperti Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD) dan Gender Mainstreaming (GM). Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik

Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender.

Dalam era 4.0, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengembangkan infrastruktur teknologi, roadmap, dan mindset dalam membangun percepatan pelaksanaan PUG di pusat dan daerah. Hal ini bertujuan mengembangkan cara berpikir networking atau saling keterkaitan, misalnya antara pusat dan daerah, daerah dengan SKPD/OPD terkait, Kementerian PPPA dengan Kementerian/Lembaga lain.

Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat

sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun kebijakan/ program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Dilihat dari aspek pendidikan, APK, APS dan APM di semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan. Jumlah PAUD, SD, SMP laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan. Terjadi kesenjangan gender namun tidak signifikan. Siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP masih terjadi. Di Kecamatan Denpasar Barat menduduki posisi paling tinggi. Dilihat dari perspektif gender terjadi ketimpangan yang sangat menonjol dimana jumlah guru laki-laki jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan guru perempuan.

Dari aspek kesehatan, disimpulkan beberapa hal, yaitu: pemberian ASI eksklusif mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 53,43%; status gizi di Kota Denpasar tergolong baik selama dua tahun terakhir ini; masing-masing UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki pojok ASI; cakupan imunisasi pada bayi di setiap kecamatan di Kota Denpasar mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir; secara keseluruhan jumlah dokter umum di Kota Denpasar mengalami peningkatan 19,39% selama dua tahun terakhir. Terjadi ketimpangan gender antara jumlah dokter umum laki-laki dengan jumlah dokter umum perempuan, dimana dokter umum perempuan

lebih banyak dibandingkan dokter umum laki-laki. Kondisi ini sama dengan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi; dan berdasarkan peserta KB aktif, persentase penggunaan alat KB AKDR/IUD/Spiral paling tinggi dibandingkan alat KB lainnya baik pada tahun 2020 maupun pada tahun 2021.

Berdasarkan aspek ekonomi diperoleh beberapa simpulan, diantaranya: tidak terjadi ketimpangan gender terkait dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2020 dan 2021; terkait dengan persentase penduduk yang bekerja, secara keseluruhan tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai menduduki posisi yang paling tinggi selama dua tahun terakhir; jumlah tenaga penyuluh pertanian lebih banyak didominasi oleh perempuan sehingga terjadi ketimpangan gender; TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Terjadi ketimpangan gender, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan; terkait dengan tenaga kerja asing, tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan; jumlah tenaga kebersihan dan pertamanan lebih didominasi oleh laki-laki sehingga terjadi ketimpangan gender yang signifikan; jumlah juru parkir juga lebih didominasi oleh laki-laki; terjadi ketimpangan gender yang signifikan di sektor pariwisata.

Di sektor publik, terjadi ketimpangan gender antara jumlah PNS dengan non PNS dalam mengikuti diklat; komposisi PNS, dan terjadi ketimpangan di bidang legislatif dan yudikatif.

Terkait dengan kekerasan perempuan dalam rumah tangga masih menjadi kasus kekerasan paling tinggi. Salah satu hal yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan ini masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki.

Beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam mengatasi ketimpangan gender, diantaranya: dalam bidang pendidikan perlu dilakukan penyesuaian jumlah guru secara adil untuk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan; memberikan beasiswa secara penuh kepada siswa yang terkategori miskin sehingga tidak terjadi kasus putus sekolah; dalam bidang kesehatan, perlu dilakukan penempatan dokter umum lebih merata di masing-masing kecamatan antara laki-laki dan perempuan. Para dokter yang mendapatkan penempatan di desa perlu diberikan insentif dan pelatihan secara berkala; dalam bidang ekonomi, perlu diberikan akses dan kesempatan bagi tenaga kerja perempuan untuk masuk ke sektor pariwisata; dalam sektor publik, perempuan juga diberikan akses, kesempatan, dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan serta pelatihan yang terkait dengan politik demokrasi oleh pemda setempat atau pemerintah pusat; di bidang lainnya, perlu tindakan perlindungan, pendampingan secara utuh

dan bantuan sosial melalui pelatihan ketrampilan bagi korban kekerasan. Untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender secara berkelanjutan, maka pelatihan penyusunan perencanaan yang responsive gender (PPRG) dan penganggaran yang responsive gender (ARG) perlu dilakukan secara berkesinambungan di tingkat OPD dan di tingkat universitas sehingga lebih responsif gender.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN		iii
KATA PENGANTAR		vi
RINGKASAN EKSEKUTIF		viii
DAFTAR ISI		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	8
	1.3 Manfaat	8
	1.4 Jenis dan Sumber Data	9
	1.5 Analisis Data	10
BAB II	DEFINISI BEBERAPA KONSEP	11
	2.1 Statistik Gender	11
	2.2 Konsep Gender	12
	2.3 Kesetaraan Gender (KG)	13
	2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)	15
BAB III	GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR	19
	3.1 Letak Geografis	19
	3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar	23
	3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya	25
	3.4 Visi dan Misi	28
	3.5 Sistem Pemerintahan	30
	3.6 Kondisi Demografi	31
	3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	34
	3.8 Indek Pembangunan Gender (IPG)	35
BAB IV	PENDIDIKAN	38
	4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	41
	4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	42
	4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)	45

	4.4 Jumlah Siswa	47
	4.5 Siswa Putus Sekolah	52
	4.6 Jumlah Guru	54
	4.7 Guru yang Tersertifikasi	56
	4.8 Kepala Sekolah	60
BAB V	KESEHATAN	62
	5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	63
	5.2 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	66
	5.3 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021	69
	5.4 Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	71
	5.5 Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	75
	5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	77
	5.7 Jumlah Dokter Umum di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	81
	5.8. Jumlah Dokter Spesialis di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	84
	5.9. Keluarga Berencana (KB)	88
	5.10. Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2020 dan 2021	93

BAB VI	EKONOMI	96
	6.1 Kegiatan Utama Penduduk	98
	6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin	101
	6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	103
	6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian	106
	6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	109
	6.6 Tenaga Kerja Asing Pendatang	111
	6.7 Tenaga Kebersihan dan Pertamanan	112
	6.8 Juru Parkir	114
	6.9 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata	116
	6.10 Pemilik Usaha Salon Kecantikan	120
BAB VII	SEKTOR PUBLIK	123
	7.1 Eksekutif	124
	7.2 Legislatif	136
	7.3 Lembaga Yudikatif	150
BAB VIII	LAIN-LAIN	152
	8.1 Kekerasan	152
	8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	163
	8.3 Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	165
BAB IX	PENUTUP	169
	9.1 Simpulan	169
	9.2 Rekomendasi	172
	DAFTAR PUSTAKA	174

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha) Tahun 2020	22
Tabel 3.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2017-2021	30
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2021	33
Tabel 4.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2019/2020	41
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut JKelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (2019 - 2020)	44
Tabel 4.3	Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan kota Denpasar Tahun 2021	46
Tabel 4.4	Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada Tahun 2021	48
Tabel 4.5	Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2021	50
Tabel 4.6	Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020-2021	52
Tabel 4.7	Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2021	53

Tabel 4.8	Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2021	54
Tabel 4.9	Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	56
Tabel 4.10	Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun	58
Tabel 4.11	Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar	59
Tabel 4.12	Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	61
Tabel 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	64
Tabel 5.2	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	67
Tabel 5.3	ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021	70
Tabel 5.4	Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	72
Tabel 5.5	Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	76
Tabel 5.6	Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	78
Tabel 5.7	Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Tahun 2020 dan 2021	82

Tabel 5.8	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	86
Tabel 5.9	Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar	89
Tabel 5.10	Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan	90
Tabel 5.11	Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2020 dan 2021	95
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Usia Produktif (0 – 60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	102
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2018-2020	104
Tabel 6.3	Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2021	106
Tabel 6.4	Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	108
Tabel 6.5	TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020	109
Tabel 6.6	Tenaga Kerja Asing Pendetatng Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	112
Tabel 6.7	Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	114
Tabel 6.8	Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	115

Tabel 6.9	Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	117
Tabel 6.10	Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	118
Tabel 6.11	Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	119
Tabel 6.12	Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	121
Tabel 7.1	Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	124
Tabel 7.2	Jumlah Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	126
Tabel 7.3	Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	128
Tabel 7.4	Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	130
Tabel 7.5	Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	132
Tabel 7.6	Komposisi PNS Menurut Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	134

Tabel 7.7	Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	135
Tabel 7.8	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	135
Tabel 7.9	Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2019-2024 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar	137
Tabel 7.10	Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	139
Tabel 7.11	Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	140
Tabel 7.12	Jumlah Anggota Bawaslu Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	142
Tabel 7.13	Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	143
Tabel 7.14	Jumlah Anggota Pengawas Pemilu Lapangan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	144
Tabel 7.15	Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Barat	145
Tabel 7.16	Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Utara	146
Tabel 7.17	Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Timur	147
Tabel 7.18	Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Selatan	148

Tabel 7.19	Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020	148
Tabel 7.20	Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020	149
Tabel 7.21	Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	151
Tabel 8.1	Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	154
Tabel 8.2	Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	157
Tabel 8.3	Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	158
Tabel 8.4	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	156
Tabel 8.5	Jumlah KDRT dan Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	160
Tabel 8.6	Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2020 dan 2021	161
Tabel 8.7	Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	162

Tabel 8.8	Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021	165
Tabel 8.9	Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Kota Denpasar	20
Gambar 3.2	Lambang Kota Denpasar	26
Gambar 3.3	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021	35
Gambar 3.4	Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021	37
Gambar 4.1	Perbandingan APM SD-SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2020	45
Gambar 5.1	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	65
Gambar 5.2	Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	65
Gambar 5.3	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020	67
Gambar 5.4	Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021	68
Gambar 5.5	ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021	70
Gambar 5.6	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dan 2021	73
Gambar 5.7	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2020 dan 2021	73

Gambar 5.8	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2020 dan 2021	74
Gambar 5.9	Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021	74
Gambar 5.10	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dan 2021	79
Gambar 5.11	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2020 dan 2021	79
Gambar 5.12	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2020 dan 2021	80
Gambar 5.13	Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2020 dan 2021	80
Gambar 5.14	Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020	83
Gambar 5.15	Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	83
Gambar 5.16	Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	87
Gambar 5.17	Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Menurut Jenis Kelamin dan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2021	87

Gambar 7.1	Persentase Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021	125
Gambar 7.2	Persentase PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021	128
Gambar 7.3	Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020	130
Gambar 7.4	Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021	131

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda yang terkandung dalam dokumen: Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, disepakati dalam pertemuan puncak di PBB pada 25-27 November 2015. Negara-negara anggota PBB, termasuk salah satunya Republik Indonesia telah menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bukti komitmennya untuk melaksanakan SDG. Diharapkan seluruh Negara dan pemangku kepentingan bergabung bersama dalam aksi kemitraan global dalam mengatasi kemiskinan melalui langkah-langkah yang transformatif dan berkelanjutan demi lestarnya planet Bumi. Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan tersebut melengkapi apa yang belum sempat tercapai dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah berakhir di tahun 2015. Setiap butir tujuan tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, baik tua maupun muda.

Sebanyak 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 169 target yang ditetapkan seluruhnya terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan. Sifat saling berhubungan dan terintegrasi dari setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa maksud dari agenda baru ini dapat terealisasi, sehingga kehidupan

manusia akan lebih baik dan dunia pun akan tertransformasi menjadi lebih baik. Prinsip lain dari agenda pembangunan berkelanjutan yang juga penting untuk diingat adalah bahwa tidak seorangpun ditinggalkan dalam pencapaiannya. Prinsip Tidak Ada Yang Ditinggalkan (*No One Left Behind*) bukan hanya dalam hal subyek penerima manfaat program pembangunan tetapi juga dalam proses pelaksanaan dan substansi. Selain itu, prinsip inklusifitas, melampaui kategori laki-laki-perempuan, tetapi juga kelompok rentan lain yang selama ini terpinggirkan dan terlupakan dalam pembangunan.

Agenda Pembangunan Berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Dengan demikian, setiap negara akan harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam agenda pembangunan nasionalnya. Selain itu, dengan adanya komitmen tersebut, akan diikuti dengan mobilisasi sumber-sumber daya di tingkat global dan nasional. Perempuan dapat memanfaatkan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta memperkuat Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Tujuan ke-5 adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Ada 9 target dalam tujuan ke-5 sebagai syarat utama tercapainya tujuan ini. Dari 17 Goals, 169 Target dalam SDGs, ada 16 goals dan 91 target terkait dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan dan anak perempuan. Perempuan dapat berperan aktif untuk mengawal implementasi dan capaian dari semua tujuan dan target dalam Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan.

Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan praktek yang selama ini merugikan perempuan dan belum memperoleh perhatian dari pemerintah maupun legislator seperti perkawinan anak, sunat perempuan. Kelompok dan organisasi perempuan dapat mendorong pemerintah untuk melakukan harmonisasi sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa terhadap target dan indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kelompok dan organisasi-organisasi perempuan dapat menggunakan target dan indikator agenda pembangunan berkelanjutan untuk melakukan advokasi gender budget.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Strategi inilah yang diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses, berpartisipasi, ikut dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan sesuai kebutuhan dan aspirasinya. Upaya percepatannya telah dituangkan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah menempatkan urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar.

PUG merupakan strategi yang digunakan untuk mengatasi berbagai isu gender lintas sektor dalam pembangunan sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Sejak lahirnya Inpres tersebut 19 tahun yang lalu sampai sekarang, proses percepatan pelaksanaan PUG di Kementerian/Lembaga maupun di daerah masih menemukan berbagai kendala. Pelaksanaannya begitu dinamis. Hal ini menuntut komitmen, keseriusan, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia, apalagi Indonesia kini memasuki era 4.0 yang menitikberatkan aspek kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Secara resmi penanganan masalah perempuan dan gender dilakukan sejak didirikannya lembaga khusus pemberdayaan perempuan pada tahun 1978 yang saat itu bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (Men.UPW). Melalui lembaga Negara ini pemerintah Indonesia melaksanakan aksi penanggulangan permasalahan Perempuan dan gender yang banyak terjadi di masyarakat. Kuatnya komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender sudah tampak sejak pemerintah meratifikasi konvensi ILO No. III melalui Undang-undang Nomor 80 Tahun 1957. Payung hukum ini menggariskan pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya. Kemudian pada tahun 1984 Pemerintah RI juga telah meratifikasi Convention the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 yang menghendaki penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan

gender dalam kehidupan masyarakat, seperti Women in Development (WID), Women and Development (WAD), Gender and Development (GAD) dan Gender Mainstreaming (GM). Pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melalui instrumen yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender.

Dalam era 4.0, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mengembangkan infrastruktur teknologi, roadmap, dan mindset dalam membangun percepatan pelaksanaan PUG di pusat dan daerah. Hal ini bertujuan mengembangkan cara berpikir *networking* atau saling keterkaitan, misalnya antara pusat dan daerah, daerah dengan SKPD/OPD terkait, Kementerian PPPA dengan Kementerian/Lembaga lain.

Pada tahun 2001 di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Bali telah dibentuk lembaga khusus yang menangani masalah peningkatan peranan perempuan, yaitu Biro Bina Kesejahteraan dan Pemberdayaan Perempuan (BKPP), yang dipimpin oleh seorang Pejabat Eselon II. Sementara itu, di kota telah dibentuk pula lembaga serupa setingkat eselon dua. Saat ini, lembaga yang menangani masalah pemberdayaan perempuan di tingkat Provinsi Bali adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan untuk di Kota Denpasar urusan pemberdayaan perempuan ditangani oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan (KBPP), dan sejak tahun 2017 telah berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPPAPPKB). Dengan adanya lembaga khusus yang menangani persoalan gender dan perempuan, maka akan lebih mudah dan lebih terfokus dalam mengaplikasikan program-program dan strategi pengarusutamaan gender (PUG), serta upaya-upaya lain dalam mengatasi persoalan gender, perempuan dan perlindungan anak.

Razavi dan Miller (2006) mendefinisikan PUG sebagai proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Sedangkan, menurut Ketentuan Umum Permendagri No.15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Dengan demikian, PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender (KG), bukan suatu tujuan (Saptaningrum, 2008). Perlulah dilakukan analisis gender.

Analisis gender harus dilakukan sebelum merumuskan perencanaan dan program pembangunan. Sebagaimana pendapat Hunt (2004) bahwa di masa yang akan datang pelaksanaan PUG akan menjadi suatu tantangan tersendiri untuk memastikan analisis gender terintegrasi ke dalam analisis sosial program dan kegiatan pembangunan yang lebih luas. Analisis Gender akan sangat bermanfaat apabila dilaksanakan secara rutin, pada seluruh aspek program dan kegiatan pembangunan. Dengan dilakukannya Analisis Gender, berarti permasalahan gender di suatu daerah telah dipetakan, sehingga

solusi permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang efektif.

Lebih lanjut, menurut Hunt (2004) pemisahan data statistik dan informasi lainnya, berdasarkan jenis kelamin atau data terpilah (*sex-disaggregated data*) sangat diperlukan sebagai alat untuk melakukan analisis gender. Tanpa data terpilah, akan sangat sulit untuk menilai perbedaan dampak aktivitas pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan. Pemilahan data sangat penting untuk dilakukan, untuk kelompok masyarakat yang mungkin akan mendapatkan pengaruh positif atau negatif dari pembangunan. Bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi dapat pula berdasarkan usia, ras, etnis, dan kelompok sosial ekonomi lainnya.

Ketentuan mengenai Data Terpilah sebagai prasyarat pelaksanaan PUG, belum diatur dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008, begitu pula di dalam Inpres No. 9 Tahun 2000. Sampai sejauh ini, pengaturannya hanya terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, yang menyebutkan bahwa data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya PUG dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Tujuan penyediaan Data Terpilah atau data gender dan anak yaitu untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkelanjutan.

Penyusunan Profil Statistik Gender secara komprehensif menjadi dasar untuk mendukung pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik analisis gender. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, penyusunan Profil Statistik Gender di Kota Denpasar menjadi sangat penting terutama dalam membantu para

perencana dalam menyusun perencanaan yang responsif gender dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan buku Statistik Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta masalah sosial lainnya. Penulisan Statistik Gender ini dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperlihatkan isu gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan dapat menemukenali isu-isu gender yang ada pada masing-masing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya akan dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud secara berkelanjutan.

1.3 Manfaat

Secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik Gender Kota Denpasar ini antara lain adalah dapat memberikan petunjuk atau referensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran. Ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun

kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti dari Dinas Pendidikan , Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar, Badan Pusat Statistik Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar, Kantor PD Parkir Kota Denpasar, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Denpasar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Denpasar, Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta Kota Denpasar, dan Dinas Sosial Kota Denpasar.

1.5 Analisis Data

Penampilan data kuantitatif ini akan menjadi lebih bermakna jika apa yang ada dibalik pemunculan data angka itu dianalisis secara mendalam. Analisis yang mendalam dilakukan dengan cara menarasikan secara lengkap atau menganalisis secara kualitatif data yang ada pada setiap tabel. Dalam analisis ini akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat, namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

BAB II

DEFINISI BEBERAPA KONSEP

2.1 Statistik Gender

Statistik Gender yang dimaksudkan dalam hal ini adalah statistik yang mengandung isu gender, seperti terefleksikan dari kesenjangan dan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan atau dalam isu yang spesifik. Statistik Gender merupakan hasil analisa lebih lanjut dari Data Terpilah Menurut Jenis Kelamin. Sementara PBB mendefinisikan bahwa Statistik Gender adalah statistik yang mencerminkan perbedaan dan ketidaksetaraan yang cukup berarti dalam situasi perempuan dan laki-laki disemua aspek kehidupan (PBB, 2006).

Data terpilah menurut jenis kelamin dan umur memberikan gambaran umum tentang keadaan perempuan dan laki-laki disemua kelompok umur dan diberbagai aspek kehidupan. Data terpilah menurut jenis kelamin, tidak selalu mengandung isu gender. Akan tetapi data terpilah menurut jenis kelamin merupakan unsur dasar yang harus ada untuk mengungkapkan isu gender, yaitu suatu isu yang muncul karena pemberlakuan ketidakadilan atas dasar jenis kelamin. Isu gender ini selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses pembangunan.

Statistik gender merupakan dasar analisis untuk menilai perbedaan dalam situasi perempuan dan laki-laki dan bagaimana kondisi mereka berubah atau tidak. Dengan cara ini, statistik gender meningkatkan kesadaran dan memberikan dorongan untuk adanya perubahan. Statistik gender juga

diperlukan untuk penelitian untuk mendukung pengembangan dan pengujian penjelasan dan teori-teori untuk memahami lebih baik bagaimana gender beroperasi di masyarakat. Semua manfaat ini membentuk dasar untuk mengembangkan kebijakan untuk mendorong kesetaraan gender yang lebih besar. Selain itu, statistik gender diperlukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengembangan kebijakan (<https://www.kemenpppa.go.id/lib>).

2.2 Konsep Gender

Dalam memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin “merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu”. (Suryani, 2010). Jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa dipertukarkan ataupun diganti, perempuan menghasilkan sel telur sedangkan laki-laki menghasilkan sperma.

Konsep Gender yang dikembangkan Hubies melalui Anshori, dkk, *dalam* (Alfian, 2016) meliputi:

- 1) *Gender difference*, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin.
- 2) *Gender gap*, yaitu perbedaan dalam hubungan berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan.
- 3) *Genderization*, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain.
- 4) *Gender identity*, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki seseorang menurut jenis kelaminnya.

- 5) *Gender role*, yaitu peran perempuan dan peran laki-laki yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut.

'Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives "individually over the life course and structurally in the historical context of race and class" Ferree, dalam Puspitawati, 2012) (Gender bukan merupakan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual" sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas).

Gender adalah sebuah konsep yang menunjuk pada sistem peranan dan relasi antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh perbedaan biologis melainkan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Secara teknis operasional perspektif gender adalah cara pandang yang digunakan untuk membedakan segala sesuatu yang bersifat normatif dan biologis dengan segala sesuatu yang merupakan produk sosial budaya dalam bentuk kesepakatan dan fleksibilitas yang dinamis.

2.3 Kesetaraan Gender (KG)

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek

pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya. Terwujudnya akan adanya kesetaraan dalam gender tentunya ditandai diskriminasi yang tidak ada, baik di antara kaum perempuan dan laki-laki sehingga akses yang ada dapat mereka miliki, berpartisipasi teruka lebar dan adanya kesempatan, kontrol dan juga memperoleh manfaat pembangunan yang setara dan juga adil. Adapun berbagai indikator dalam gender dan kesetaraannya adalah sebagai berikut :

1) Adanya akses

Peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumberdaya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan medpaatkan sumberdaya tersebut secara merata dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.

2) Partisipasi

Aspek dalam partisipasi merupakan suatu keikutsertaan dalam suatu kelompok atau orang tertentu dalam pengambilan keputusan. Disini dapat dilihat bahwa perempuan dan juga laki-laki apakah memang memiliki suatu peran yang sama atau tidak dalam mengambil suatu keputusan.

3) Kontrol

Penguasaan atau juga wewenang atau kekuatan dalam pengambilan suatu keputusan yang ada. Pemegang jabatan dalam hal tertentu dapat dilihat didominasi oleh gender atau tidak.

4) Manfaat

Merupakan manfaat atau kegunaan yang dapat dan juga dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Di mana dalam keputusan tersebut yang telah diambil oleh pihak sekolah dapat memberikan suatu kemanfaatan adil dan sebaik-baiknya serta merata bagi laki-laki dan perempuan.

Jika merujuk pada pandangan yang normatif dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandangan yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, dimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum, yang mendasarkan pada keadilan,

2.4 Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan, implementasinya melalui prinsip kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dalam pembangunan. Pembangunan kualitas hidup manusia dilaksanakan secara terus menerus oleh pemerintah dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat

tergantung dari peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan sebagai pelaku, dan sekaligus sebagai penerima manfaat hasil pembangunan.

Tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender diperlukan prasyarat tertentu yaitu adanya kondisi awal dan keluaran-keluaran yang memungkinkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prasyarat awal dimaksud yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan PUG, sumberdaya yang ada, data terpilah berdasarkan sex, alat analisis dan peran serta masyarakat madani/*civil society*. Prasyarat tertentu tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komitmen

Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.

2. Kebijakan

Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll.)

3. Kelembagaan

Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, focal point, forum, dan tim.

4. Sumber daya

Adanya sumber daya yang memadai, yaitu:

- Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender.
- Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.

5. Data terpilah

Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin.

6. Alat analisis

Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi.

7. Partisipasi masyarakat

Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG.

Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan- kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi. Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi

pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOTA DENPASAR

3.1 Letak Geografis

Kota Denpasar merupakan salah satu dari sembilan daerah kabupaten/kota yang terletak di wilayah Pulau Bali. Sebagian besar keadaan wilayah Kota Denpasar merupakan daerah dataran serta di sebelah tepi selatan dan sebagian daerah di sebelah tepi timur merupakan daerah pantai atau pesisir.

Secara administratif batas-batas wilayah Kota Denpasar, yaitu: (1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Badung, (2) sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Badung, (3) sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Badung, dan (4) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gianyar.

Pulau Bali terletak di sekitar 8 derajat di sebelah selatan katulistiwa menyebabkan sepanjang tahun Kota Denpasar beriklim tropis, dengan suhu cuaca sekitar 23 derajat Celsius. Sebagaimana keadaan di daerah-daerah lainnya di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Bali maka Denpasar juga mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

Ditinjau dari tata letak topografisnya, Kota Denpasar terletak di antara 08 35' 31" – 08 44' 49" Lintang Selatan dan 115 10' 23" – 115 16' 27" Bujur Timur. Keadaan topografi Kota Denpasar, posisinya miring ke arah selatan dengan ketinggian berkisar antara 0—75 meter di atas permukaan laut. Semakin ke arah utara letak wilayahnya tampak semakin tinggi walaupun

ketinggiannya agak tidak merata. Sebaliknya, semakin ke arah selatan letak wilayahnya semakin rendah karena paling ujung berbatasan dengan bibir pantai, antara lain Pantai Padang Galak, Pantai Sanur, Pantai Pesanggaran, dan Pantai Serangan. Morfologi wilayah Kota Denpasar yang landai dengan kemiringan lahan sebagian besar berkisar antara 0—5%, tetapi di bagian tepi kemiringannya bisa mencapai 15% (<https://od/scribd.com>). Untuk lebih jelasnya batas-batas dan topografi Kota Denpasar dapat dilihat gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1 Peta Kota Denpasar

Wilayah Kota Denpasar yang luasnya 12.778,00 Ha atau 128,61 Km² tidak memiliki daerah pegunungan dan perbukitan. Dengan demikian, luas wilayah Kota Denpasar sekitar 2,18 persen dari luas Provinsi Bali termasuk tambahan reklamasi Pantai Serangan seluas 380 Ha. Keadaan lahan di Kota Denpasar relatif bagus karena lahan pertaniannya termasuk kategori lahan subur serta wilayah pesisirnya yang potensial untuk sumber penghidupan penduduknya. Bahkan, relatif banyak wilayah pesisir, di mana pantainya berkembang menjadi obyek wisata, antara lain pantai Padanggalak, Sanur, Mertasari, dan Serangan.

Lahan pertanian sawah di Kota Denpasar yang masih bertahan sampai sekarang ini, dapat ditanami secara intensif sepanjang tahun karena didukung oleh aliran air sungai yang memadai. Di wilayah Kota Denpasar terdapat sungai besar bernama Tukad Badung yang sementara ini tidak pernah kering. Selain itu, juga terdapat sungai- sungai yang lain di mana penggunaan airnya dikelola oleh lembaga tradisional bernama subak. Pimpinan subak disebut pekaseh bertugas untuk mengatur pemanfaat air sunyai (irigasi) kepada petani yang menjadi warga subak di wilayah kerja subak yang bersangkutan. Untuk lebih jelaslah pemanfaat lahan di Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Luas Tanah di Kota Denpasar Dirinci per Kecamatan (Ha) Tahun 2020

No	Kecamatan	Lahan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Sawah (Ha)	Lahan Bukan Pertanian (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Denpasar Utara	677,00	46,38	2.428,62	3.152,00
2	Denpasar Timur	690,00	164,00	1.377,00	2.231,00
3	Denpasar Selatan	536,00	263,00	4.200,00	4.999,00
4	Denpasar Barat	217,00	-	2.189,00	2.406,00
Kota Denpasar		1.903,00	473,38	10.194,62	12.788,00

Sumber : BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2021

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Denpasar Selatan merupakan wilayah terluas di Kota Denpasar, yaitu sekitar 4.999,00 Ha (49,99 Km²) atau 39,09 persen dari luas Kota Denpasar. Luas wilayah Kecamatan Denpasar Selatan lebih dari dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Timur (2.231,00 Ha) dan juga dua kali lipat luas Kecamatan Denpasar Barat (2.406,00 Ha). Luas wilayah Kecamatan Denpasar Utara menduduki peringkat ke dua, yaitu sekitar 3.152,00 Ha atau 31,52 Km² (24,65 persen dari luas Kota Denpasar).

Lahan sawah yang masih tersisa di Kota Denpasar sementara ini sekitar 1.903 Ha. Data ini menunjukkan bahwa lahan sawah di Kota Denpasar yang tersisa relatif sedikit sehingga dapat diduga bahwa warga Kota Denpasar relatif sedikit menekuni profesi sebagai petani jika dibanding dengan profesi yang lain. Demikian pula, lahan yang bukan sawah, hanya seluas 473,38 Ha. Di sisi lain, justru lahan yang luasnya paling tinggi berupa lahan bukan pertanian seluas 10.194,62 Ha. Lahan yang bukan pertanian ini antara lain berupa tanah yang dimanfaatkan untuk perumahan (tempat tinggal), perkantoran, pertokoan, supermarket, hotel, lapangan, sekolah, rumah sakit

dan lainnya. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta intensitas pembangunan yang berkembang dalam berbagai bidang tentu saja akan menyebabkan ikut meningkatnya permintaan akan lahan, di mana lahan pertanian produktif akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, fasilitas penunjang pariwisata seperti hotel, villa, home stay, dan lain-lain. Hal inilah yang kemudian mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

3.2 Sekilas Sejarah Berdirinya Kota Denpasar

Ditinjau dari segi historisnya, Kota Denpasar mempunyai riwayat yang relatif panjang yang pada akhirnya menjadi Ibu Kota Daerah Tingkat II Kota Denpasar dan menjadi Ibu Kota Provinsi Bali. Asal usul kata Denpasar berasal dari dua suku kata, yaitu den dan pasar. Kata den berarti utara dan kata pasar berarti pasar atau peken. Sesuai dengan asal-usul katanya, Denpasar berarti di utara pasar yang sekaligus juga menunjukkan lokasi puri yang saat itu menjadi pusat orientasi penduduk berada di sebelah utara pasar (Salain dalam Wiasti, 2010; 52).

Ditinjau dari segi ruang (*space*), pada awalnya Kota Denpasar menjadi pusat Kerajaan Badung, yang pada mulanya merupakan sebuah taman. Taman ini disebut-sebut bukanlah sekadar taman karena taman ini merupakan kesayangan Raja Badung Kyai Jambe Ksatria yang beristana di Puri Jambe Ksatria di Pasar Satria sampai ke utara, yang sampai sekarang pasar ini masih tetap ajeg.

Selain itu, taman ini dilengkapi pula dengan tempat peraduan yang diperuntukkan khusus bagi tamu-tamu yang datang dari luar Badung. Taman itu terletak di sebelah utara pasar, tepatnya di rumah jabatan Gubernur Bali, sekarang

bernama Jaya Sabha. Awalnya pasar terletak di lapangan Puputan Badung sekarang, tapi pada zaman Belanda pasar itu dipindah ke dekat Tukad Badung sehingga dikenal sebagai Pasar Badung. Oleh karena itu, Kota Denpasar merupakan perkembangan dari wilayah kerajaan yang saat itu Puri Denpasar menjadi pusat pemerintahannya.

Pada tahun 1779 terjadi konflik antara Kyai Jambe Ksatrya dengan I Gusti Ngurah Rai. Padahal, I Gusti Ngurah Rai tak lain orang kepercayaan Kyai Jambe Ksatrya, terutama dalam hal permainan aduan ayam. Konflik ini berujung pada terbunuhnya Kyai Jambe Ksatrya. Pascaterbunuhnya Kyai Jambe Ksatrya, kekuasaan dilimpahkan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan. Pelimpahan kekuasaan kepada I Gusti Ngurah Made Pemecutan menandai berakhirnya kekuasaan Puri Jambe Ksatrya. Pasalnya, I Gusti Ngurah Made Pemecutan mendirikan istana baru di Taman Denpasar. Istana baru itulah dinamai Puri Denpasar dan di-pelaspas pada tahun 1788. I Gusti Ngurah Made Pemecutan pun dinobatkan sebagai Raja Denpasar I. Tahun 1788 inilah sebagai tonggak kelahiran Kota Denpasar (Sujaya: <http://www.balebong.net>).

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, dan selanjutnya pada tahun 1958 Kota Denpasar dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus menjadi ibu kota. Pada awalnya Kota Denpasar dijadikan sebagai kota Administratif dengan fokus orientasi pada urusan administrasi pemerintahan. Selanjutnya, dengan dijadikannya sebagai pusat pemerintahan Daerah Tingkat II Badung dan sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, maka tidak bisa dipungkiri menjadi pusat orientasi berbagai aspek kehidupan dari berbagai penjurur wilayah pemerintahan sehingga secara pasti mengalami

perkembangan yang sangat cepat, baik di bidang fisik, ekonomi, sosial dan budaya maupun demografinya.

Selain sebagai pusat pemerintahan, secara otomatis Kota Denpasar juga menjadi pusat perdagangan, pusat pendidikan dan pusat pariwisata yang pada awalnya secara keseluruhan wilayahnya di bagi menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Selatan. Melihat perkembangan kota administratif ini dari berbagai sektor begitu pesat, maka tidak mungkin ditangani oleh pemerintahan sebatas pemerintahan yang berstatus kota administratif. Oleh karena itu, selanjutnya sesuai dengan perkembangan kota serta berbagai pertimbangan antara provinsi Bali dan Kabupaten Badung sepakat untuk meningkatkan status kota administratif Denpasar menjadi Kota Denpasar. Akhirnya pada tanggal 15 Januari 1992 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kota Denpasar lahir dan telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Februari 1992. Setelah kota Denpasar dirubah statusnya, yaitu dari kota administratif menjadi Kota Denpasar berarti juga merupakan babak baru bagi penyelenggaraan pemerintahan kota.

3.3 Lambang Kota Denpasar dan Penjelasannya

Masing-masing daerah tingkat II kabupaten/kota di wilayah Provinsi Bali telah memiliki lambang tersendiri. Lambang Kota Denpasar berbentuk segi lima sama sisi sebagai berikut.



Gambar 3.2 Lambang Kota Denpasar

Sumber: Denpasar dalam Angka 2022

Warna dasar segi lima sama sisi pada lambang Kota Denpasar, yaitu berwarna biru laut, sedangkan garis pinggirnya berwarna hitam. Pita berwarna putih pada bagian bawahnya tertulis motto “PURADHIPA BHARA BHAVANA”, yang mengandung arti, yaitu “kewajiban pemerintah adalah meningkatkan kemakmuran rakyat”. Di dalam segi lima sama sisi tersebut, terdapat pula lukisan-lukisan yang merupakan unsur-unsur lambang Kota Denpasar. Adapun unsur-unsur lambang yang dimaksud sebagai berikut.

1. Segi lima sama sisi
 - a) Dasarnya berbentuk segi lima sama sisi berarti bahwa dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.

- b) Warna dasar biru laut melambangkan keagungan.
 - c) Garis pinggir berwarna putih melambangkan kesucian/ budi luhur, dan warna hitam melambangkan kekuatan.
2. Padmasana Jagatnatha
- a) Melambangkan alam semesta tempat suci untuk pemujaan Ida Sanghyang Widhi Wasa.
 - b) Jagatnatha dapat pula diartikan sebagai tempat pemerintahan atau penguasa. Jadi Jagatnatha dalam hal ini diartikan sebagai Denpasar merupakan pusat pemerintahan.
 - c) Warna kuning emas pada Pura Jagadnatha melambangkan tempat suci untuk pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa.
3. Keris
- a) Melambangkan jiwa/melintas keperwiraan yang lazim disebut jiwa keperwiraan.
 - b) Keris juga melambangkan bahwa Kota Denpasar sebagai kota perjuangan.
 - c) Warna hitam dalam keris melambangkan ketegasan.
4. Candi Bentar
- a) Melambangkan kebudayaan, yakni Kota Denpasar memiliki kebudayaan yang bersifat khas.
 - b) Candi bentar juga diartikan sebagai pintu gerbangnya Provinsi Bali.

5. Tangga yang berjumlah tiga buah

Melambangkan bahwa konsep pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Denpasar selalu berlandaskan konsep TRI KAYA PARISUDHA.

6. Lingkaran bunga teratai yang jumlahnya 8 (delapan) helai melambangkan asta dala atau asta beratha.

7. Padi Kapas serta rantai (gelang) 2 (dua) melambangkan

a) Padi yang berjumlah 27 (dua puluh tujuh) buah melambangkan tanggal 27.

b) Rantai (gelang) berjumlah dua buah melambangkan bulan dua (Februari).

c) Kapas dengan bunga berjumlah 9 (Sembilan) buah dan daun dua helai melambangkan tahun 92. Dengan demikian, padi, kapas, serta rantai sebagai pengikat padi kapas melambangkan bahwa Kota Denpasar lahir pada tanggal 27 Februari 1992.

3.4 Visi dan Misi

Kota Denpasar yang dipimpin oleh Walikota sebagai pucuk pimpinan didalam melaksanakan roda pemerintahan merumuskan program-program pembangunan dan kebijakan-kebijakannya. Penyusun-an program-program dan kebijakan-kebijakan tersebut dijabar-kan dengan mengacu kepada visi dan misi yang disampaikan oleh pasangan calon yang terpilih menjadi Walikota (Walikota dan Wakilnya). Visi dan misi ini mengarahkan pembangunan Kota Denpasar sebagai berikut.

3.4.1 Visi

Rumusan visi Kota Denpasar adalah “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”. Konsep kota kreatif menitikberatkan pada Denpasar Kota Hidup, dimana kota hidup memberikan kesadaran dinamis terhadap sumber daya alam untuk menggugah inovasi, sumberdaya manusia untuk menggugah dinamika kultur dan sumber daya spiritual yang dapat menggugah kreasi aparatur. Kebudayaan yang berintikan agama menjadi spirit kreatifitas, baik penciptaan, pelestarian maupun penyempurnaan tatanan nilai dalam rangka memelihara keteraturan, ketertiban dan keseimbangan sosial. Berbasis budaya pada gilirannya dapat memelihara keseimbangan kekuatan regulasi, kemampuan pemberdayaan, kesanggupan pelayanan, dan perkembangan pembangunan. Dengan keseimbangan ini, Denpasar menjadi kota makmur, aman, jujur, dan unggul.

3.4.2 Misi

Relevan dengan rumusan visi tersebut di atas maka dirumuskan misi Kota Denpasar sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- b) Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana.
- c) Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat Reformasi Birokrasi dan menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).

- d) Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.
- e) Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

3.5 Sistem Pemerintahan

Dalam upaya mengefektifkan roda pemerintahan maka wilayah administrasi Kota Denpasar dibagi menjadi empat kecamatan. Adapun keempat kecamatan yang dimaksud, yaitu (1) Kecamatan Denpasar Selatan, (2) Kecamatan Denpasar Timur, (3) Kecamatan Denpasar Barat, dan (4) Kecamatan Denpasar Utara. Masing-masing kecamatan tersebut dipimpin oleh satu orang sebagai pucuk pimpinan yang bernama camat.

Secara fungsional dan struktural di masing-masing camat terbagi menjadi beberapa desa dinas/kelurahan, dan desa adat. Pucuk pimpinan di level desa dinas bernama perbekel atau kepala desa, sedangkan di level kelurahan bernama lurah dan di level desa adat bernama bendesa. Selanjutnya, di level desa secara fungsional dan struktural dibagi lagi menjadi banjar dinas dan banjar adat.

Dalam konteks ini, di Bali pada umumnya dan di Kota Denpasar khususnya di level pemerintahan di tingkat desa dan banjar telah terjadi pemisahan penanganan di bidang kedinasan dan bidang adat. Demikian pula, di level banjar, ada disebut banjar adat dan banjar dinas. Walaupun demikian, dalam menjalani kewajiban sehari-hari antara desa dinas dan desa adat serta antara banjar dinas dan banjar adat bersinergi, baik secara intern maupun ekstern. Jumlah desa/kelurahan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Denpasar tidak mengalami

perubahan dari tahun 2017-2021, yaitu sebanyak 43 desa/kelurahan.

Tabel 3.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2017-2021

Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
Denpasar Selatan	10	10	10	10	10
Denpasar Timur	11	11	11	11	11
Denpasar Barat	11	11	11	11	11
Denpasar Utara	11	11	11	11	11
Denpasar	43	43	43	43	43

Sumber: BPS, Kota Denpasar Dalam Angka 2022

3.6 Kondisi Demografi

Denpasar yang menjadi Ibu Kota Provinsi Bali telah menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perekonomian, pusat pariwisata di Bali. Hal ini menjadi faktor penarik para migran, baik yang berasal dari Pulau Bali maupun luar Pulau Bali yang datang dan tinggal di kota Denpasar dengan berbagai kepentingan. Di antara migran tersebut relatif banyak juga yang memiliki tempat tinggal di Kota Denpasar dan akhirnya menjadi penduduk di kota ini.

Ditinjau dari pendekatan identitas, dapat dibedakan dengan jelas atribut-atribut yang melekat pada seseorang yang membedakan seseorang apakah penduduk asli Bali maupun

tidak asli Bali. Atribut yang paling menonjol, yaitu pada umumnya dari nama lengkapnya. Oleh karena itu, penduduk Kota Denpasar bersifat heterogen. Heterogenitas yang menonjol penduduk Kota Denpasar dapat ditinjau berdasarkan atas beberapa indikator, antara lain suku, bahasa, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Di Denpasar, penduduknya tidak saja merupakan suku Bali, tetapi berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, dalam percakapan sehari-hari acapkali terdengar dialek-dialek atau logat yang berbeda-beda. Misalnya, logat Bali, logat Jawa, logat NTT yang relatif mudah dikenali di Kota Denpasar. Demikian pula, di kalangan orang yang merasa berasal dari satu suku acapkali pula menggunakan bahasa daerahnya untuk bercakap-cakap dengan sesama teman-temannya. Selanjutnya, Tabel 3.3 di bawah ini menunjukkan penduduk Kota Denpasar menurut jenis kelamin berdasarkan kelompok umurnya.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2021

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	25 322	24 116	49 438
5–9	25 541	24 398	49 939
10–14	28 567	26 874	55 441
15–19	29 280	27 387	56 667
20–24	30 287	29 456	59 743
25–29	29 618	29 317	58 935
30–34	28 905	29 188	58 093
35–39	28 121	29 486	57 607
40–44	29 534	29 849	59 383
45–49	27 899	28 533	56 432
50–54	26 376	25 562	51 938
55–59	21 119	19 824	40 943
60–64	14 916	13 864	28 780
65–69	10 510	10 019	20 529
70–74	6 105	5 790	11 895
75+	4 808	6 028	10 836
Kota Denpasar	366 908	359 691	726 599

Sumber: BPS, Kota Denpasar Dalam Angka, 2022

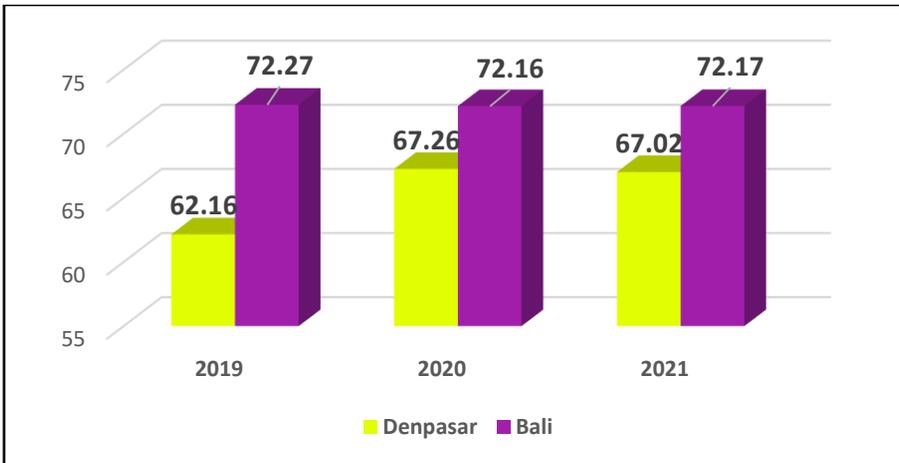
Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 20-24 tahun (30.287 jiwa), sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan paling banyak berada di kelompok umur 40-44 tahun. Data ini menunjukkan penduduk di Kota Denpasar mayoritas berada pada kategori produktif. Tabel 3.3 di atas juga

menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2021 jika ditinjau dari jenis kelaminnya tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang mencolok. Namun, dari perspektif gender, jumlahnya penduduk Kota Denpasar didominasi oleh jenis kelamin laki-laki.

3.7 Indek Pemberdayaan Gender (IDG)

Indek pemberdayaan gender merupakan salah satu indikator untuk mengetahui sejauhmana sumbangan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di masyarakat. Indek pemberdayaan gender atau disingkat IDG terdiri dari tiga dimensi yakni keterwakilan di parlemen dengan indikator persentase anggota parlemen laki-laki dan perempuan, pengambilan keputusan dengan indikator persentase pejabat tinggi, manajer, pekerja profesional dan teknisi, distribusi pendapatan dengan indikator persentase upah buruh nonpertanian disesuaikan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Denpasar pada tahun 2019-2021 lebih rendah dibandingkan IDG Provinsi Bali. IDG Kota Denpasar mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 5,1 poin dan sebesar 4,86 poin pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir.



Gambar 3.3 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Sumber: <https://bali.bps.go.id/indicator/40/134/1/indeks-pemberdayaan-gender-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>

3.8 Indek Pembangunan Gender (IPG)

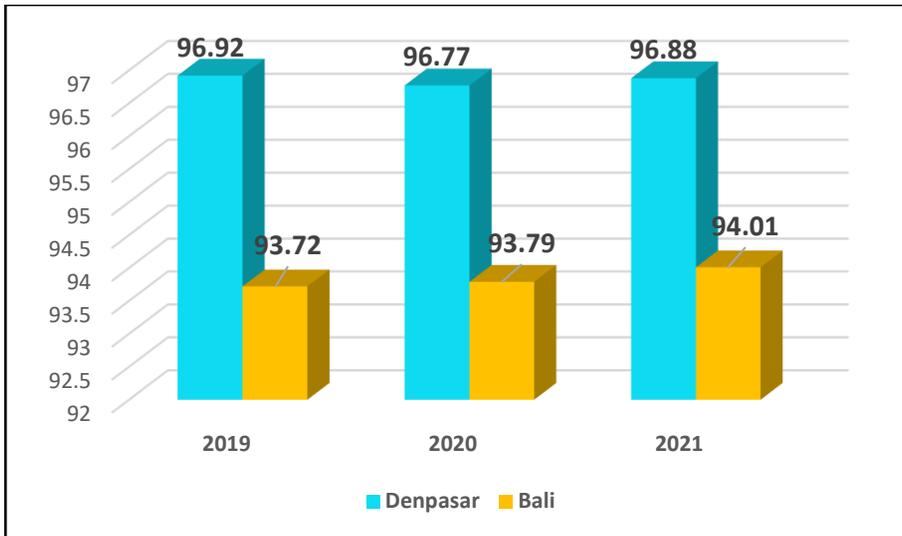
Pembangunan manusia yang dilakukan diarahkan dan ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Meskipun demikian pada kenyataannya perempuan senantiasa tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup.

Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup perempuan adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Padahal sesuai amanah pemerintah dalam Undang-undang jelas sekali disebutkan bahwa pembangunan adalah hak bagi setiap warga negara.

Beberapa ukuran tentang kesetaraan dan keadilan gender telah digunakan banyak pihak, meski ukuran tersebut masih bersifat tunggal (*single variable*). Namun di dalam perkembangan waktu serta tuntutan akan tingkat keakurasian, maka ukuran yang bersifat komprehensif dan representatif mutlak dibutuhkan. UNDP melalui Laporan Pembangunan Manusia Tahun 1995 memperkenalkan ukuran pembangunan manusia yang bersifat gabungan (komposit) dari empat indikator, yang menyoroti tentang status perempuan khususnya mengukur prestasi dalam kemampuan dasar. Ukuran komposit yang dimaksud adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Pembangunan gender atau pembangunan yang berhubungan dengan gender (*Gender Development* atau *Gender Related Development*), ditujukan untuk mengetahui ada tidaknya ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Ketimpangan di antara laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam suatu angka atau indeks. Semakin besar ketimpangan di antara keduanya dalam pembangunan manusia, semakin rendah nilai indeks tersebut.

IPG sebagai indeks komposit juga memiliki komponen-komponen pembentuk yang turut menentukan nilai dari IPG itu sendiri. Komponen pembentuk tersebut sama dengan yang digunakan dalam pengukuran IPM, yakni angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pendidikan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.



Gambar 3.4 Indeks Pembangunan Gender Kota Denpasar dan Provinsi Bali Tahun 2019-2021

Sumber: <https://bali.bps.go.id/indicator/40/132/1/indeks-pembangunan-gender-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota.html>

Dari data pada gambar 3.3 di atas tampak bahwa angka IPG Kota Denpasar tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan tahun 2019. Jika dibandingkan dengan kondisi IPG Provinsi Bali, IPG Denpasar masih berada di atas IPG Bali. Ini menandakan kondisi kesetaraan gender di Denpasar masih lebih bagus dibandingkan Bali secara keseluruhan. Dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut. Hal ini menandakan bahwa ketimpangan gender di beberapa aspek yang terkait dengan indikator IPG seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi disparitas gendernya semakin mengecil. Sebagai informasi, IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

BAB IV

PENDIDIKAN

Dibelahan dunia manapun pendidikan merupakan indikator penting untuk menentukan kualitas sumberdaya manusianya. Oleh karena itu setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara-cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam perkembangan masyarakat, pendidikan merupakan hal yang paling utama, hal itu dapat dilihat dari pendapat beberapa ahli berikut Jean Jaqqes Rosseau, seorang tokoh pembaharu Perancis menyebutkan, Semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi melalui pendidikan, selanjutnya Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani kuno berpendapat, bahwa perbaikan masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki sistem pendidikan. Tokoh Pendiri nasional yakni Ir. Soekarno dan Ki Hajar Dewantara, juga menyebutkan bahwa satu-satunya yang dapat mengubah nasib suatu bangsa hanyalah Pendidikan. Oleh karena itu pendidikan merupakan sector yang perlu mendapat perhatian yang lebih, mengingat kemajuan pendidikan merupakan barometer kemajuan sebuah Negara.

Mengacu pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 Ayat (1) tegas disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya pada Ayat (3) dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu setiap komponen Bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Bila dilihat secara konseptual, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi dan tujuan pendidikan demikian sesuai dengan visi pendidikan nasional itu sendiri, yaitu terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yakni berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dalam rangka peningkatan pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Denpasar tidak bisa lepas dari peningkatan kualitas penduduknya (sumber daya manusia/

SDM). Terlebih lagi di era pembangunan yang berwawasan otonomi daerah saat ini. Pembangunan di sektor pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas SDMnya, diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat dalam artian diselenggarakan oleh pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerjasama yang saling melengkapi dan memperkuat dalam pengendalian mutu layanan pendidikan.

Sebagaimana terdapat dalam salah satu misi pendidikan kota Denpasar, bawasannya Pemerintah Kota Denpasar ingin menciptakan Pemerataan Peningkatan akses Pendidikan. Ini menunjukkan bahwa setiap anak (laki dan perempuan) diharapkan memperoleh akses yang sama dibidang pendidikan. Kondisi seperti ini secara normative dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam Pasal 9 Ayat (1) yang menyatakan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Analisis kebijakan tersebut tidak menunjukkan adanya diskriminasi gender, namun demikian, dalam kenyataannya masih terlihat adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Oleh karena itu Profil gender terkait pendidikan penting dikemukakan sebagai sarana strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan.

Berikut ini adalah analisis gender terhadap beberapa indikator pendidikan di Kota Denpasar.

4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan antara penduduk usia sekolah yang masih bersekolah dengan penduduk usia sekolah. APS biasa diterapkan untuk kelompok umur sekolah menurut jenjang pendidikan SD (7-12 tahun), SMP (13-15 tahun) dan SMA (16-18 tahun). Cara menghitung APS adalah penduduk usia tertentu yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk tertentu dikalikan seratus. Dengan demikian, jika menghitung APS Sekolah Dasar, maka jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikalikan seratus. Demikian seterusnya untuk APS SMP dan SMU. Atas dasar hal tersebut, APS SD –SMA di Kota Denpasar akan diuraikan berikut ini.

Tabel 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Kota Denpasar (Persen), 2019/2020

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
7-12 tahun	100.00	99.10	100.00	100.00	100.00	99.51
13-15 tahun	100.00	98.48	96.61	100.00	98.42	99.23
16-18 tahun	73.37	83.29	74.10	68.92	73.74	75.47

Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar, 2021

Dari tabel 4.1 tampak bahwa APS anak usia 7-12 tahun atau setara SD di Kota Denpasar sudah 100% untuk laki-laki baik di tahun 2019 maupun tahun 2020, namun untuk anak perempuan masih kurang dari 100% yakni hanya 99,10% pada tahun 2020; ini artinya bahwa semua anak usia sekolah SD sudah bersekolah. Sementara itu jika dilihat perbandingan APS laki-laki dan perempuan tampaknya sudah tidak terlalu menunjukkan perbedaan yang menyolok atau bisa dikatakan sudah setara. Jika dibandingkan persentase APS tahun 2019 dan 2020 tampak tidak jauh berbeda.

Demikian juga mereka yang duduk di SMP tidak semuanya berusia 13-15 tahun. Jika dilihat dari perspektif gender, secara umum untuk jenjang pendidikan SMP APS anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding APS anak perempuan di tahun 2019. Kondisi sebaliknya terjadi juga pada anak laki-laki dimana pada tahun 2020 APS anak laki-laki lebih rendah dari APS perempuan..

Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA tampaknya berbeda dengan APS jenjang pendidikan di bawahnya yang secara umum mencapai seratus persen. APS di jenjang SMA secara umum berada di bawah angka 100%. Pada jenjang ini APS anak perempuan masih lebih rendah dibandingkan APS anak laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa akses anak perempuan untuk mencapai jenjang Pendidikan SMA masih lebih terbatas dibandingkan anak laki-laki.

4.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Memahami angka partisipasi dalam pendidikan adalah sangat penting bagi semua pihak, sebab dengan mengetahui angka partisipasi maka akan diketahui sejauh mana upaya

pemerataan dan perluasan akses di bidang pendidikan telah dicapai. Oleh karena itu dengan angka partisipasi akan dapat diketahui mengenai karakter, ketidakmerataan atau kesenjangan dalam memperoleh akses di bidang pendidikan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sukses tidaknya sebuah upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Pengertian APM adalah perbandingan antara jumlah siswa kelompok umur yang relevan dengan jumlah penduduk usia sekolah jenjang tertentu. Seperti diketahui, penduduk usia sekolah dasar adalah anak umur 7 s.d. 12 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan pertama adalah anak umur 13 s.d. 15 tahun. Penduduk usia sekolah lanjutan atas adalah remaja umur 16 s.d. 18 tahun. Dengan demikian, kalau kita ambil contoh jenjang pendidikan dasar, yaitu sekolah dasar (SD) maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa APM SD merupakan perbandingan antara jumlah siswa SD dan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Kondisi APM Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD dan SMP pada tahun 2019/2020 dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Kota Denpasar (2019 - 2020)

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
SD Sederajat	94.35	95.26	94.64	93.10	94.50	94.27
SMP Sederajat	76.38	79.14	77.59	80.97	76.94	80.04
SMA Sederajat	64.74	69.12	64.10	61.48	64.42	64.96

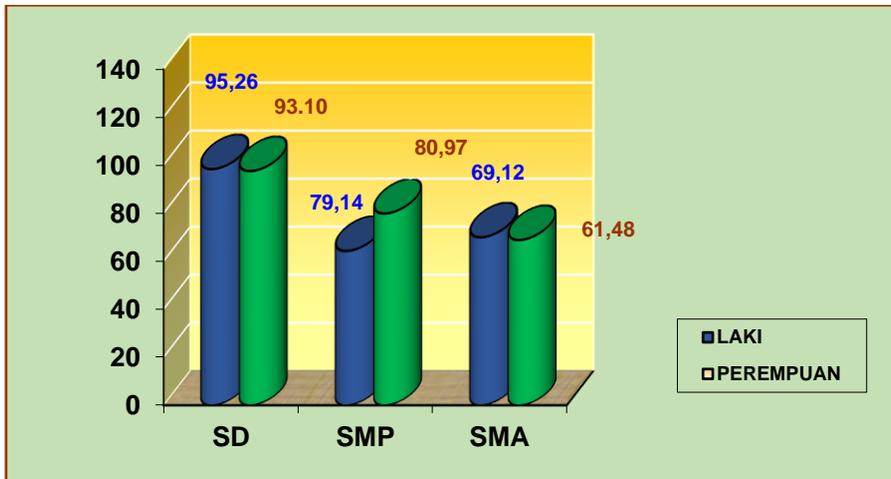
Sumber: Susenas, BPS Kota Denpasar, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Denpasar pada jenjang pendidikan SD mencapai angka rata-rata 94.50% di tahun 2019 dan 94,27% di tahun 2020. Namun demikian, secara keseluruhan pemerataan pendidikan di Kota Denpasar masih perlu ditingkatkan karena terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan Angka Partisipasi Murni siswa semakin menurun. Hal ini dapat dilihat dari angka partisipasi murni di tingkat SMP. Pada jenjang pendidikan SMP, rata-rata Angka Partisipasi Murni masih pada angka 76,94 tahun 2019 dan 80,04% tahun 2020. Persentase ini tampak semakin merendah ketika memasuki jenjang pendidikan SMA. Angka partisipasi murni di SMA hanya 64,42% tahun 2019 dan 64,96 di tahun 2020. Ini artinya bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka angka partisipasi murni penduduk semakin rendah.

Dikaji dari perspektif gender, masih tampak terjadinya disparitas gender atau perbedaan gender pada semua jenjang pendidikan. Pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, disparitas gender APM terjadi di tingkat SD dengan dominasi laki-laki sementara pada APM SMP didominasi oleh Perempuan sedangkan disparitas gender APM SMA dengan dominasi

perempuan. Disparitas gender pada APM SD menunjukkan angka tipis. Pada APM SMP disparitasnya tidak terlalu signifikan. sedangkan disparitas gender APM di tingkat SMA menunjukan angka menurun untuk perempuan pada tahun 2020 yaitu dari 64,10\$ menjadi 61,48% tahun 2020. Secara umum ketimpangan gender pada angka partisipasi murni baik di tingkat SD, SMP dan SMA tidak terlalu menyolok.

Untuk dapat melihat secara lebih jelas perbandingan APM laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan SD-SMA, tahun 2020 dapat dilihat Grafik 4.1.



Gambar 4.1. Perbandingan APM SD-SMA Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2020

4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah salah satu indikator untuk melihat partisipasi penduduk dalam bidang pendidikan. Angka ini biasanya digunakan untuk melihat gambaran kondisi siswa pada suatu jenjang pendidikan. APK tersebut menjelaskan

penduduk pada jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat usia mereka. Angka Partisipasi Kasar (APK) ini sesungguhnya adalah proporsi anak yang bersekolah pada tiap-tiap jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umurnya. Berkenaan dengan itu, sebagai contoh penghitungan APK SD digunakan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan jumlah penduduk yang usia 7-12 tahun dikalikan 100. Dengan demikian maka APK dibedakan menurut jenjang pendidikan, yaitu APK TK, SD, SMP, dan SMA seperti yang tertera pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel : 4.3. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan kota Denpasar Tahun 2021

Tingkatan Sekolah	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Persentase (%)
SD/MI	104	102,49	98,55
SMP/MTs	104	92,05	88,51
SMA/MA/SMK	104	86,80	83,46
Rata-rata	104	98,77	93,53

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

Dari tabel 4.3 tampak bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD tahun 2021 berjumlah 98,55%, sedangkan untuk tingkat SMP/MTs persentasenya lebih kecil dibandingkan APK SD yang hanya mencapai 88,51%. Ini artinya APK SD, SMP, dan SMA yang ditargetkan mencapai 104% belum tercapai. Ini artinya masih perlu upaya untuk bisa mencapai target di tahun berikutnya.

4.4 Jumlah Siswa

Berbagai program di bidang pendidikan telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan penduduk, salah satunya adalah program wajib belajar sembilan tahun. Program ini dimaksudkan untuk mendorong penduduk agar menempuh pendidikan paling tidak sampai SMP. Di samping itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan suatu bangsa, khususnya di bidang pendidikan dapat dilihat juga dari tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Tingkat partisipasi sekolah penduduk menunjukkan capaian dari niat dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh penduduk. Sementara itu, dewasa ini kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan juga sudah semakin meningkat sehingga hampir tidak ada lagi penduduk usia sekolah di kota Denpasar yang tidak bersekolah. Terkait dengan jumlah penduduk yang tercatat mengikuti pendidikan mulai dari tingkat PAUD, siswa sekolah dasar (SD), SMP, dan SMA, yang tercatat di Kota Denpasar akan diuraikan berikut ini.

4.4.1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Saat ini pendidikan anak usia dini memang sangat penting karena pendidikan sejak dini akan dapat membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Melalui pendidikan ini anak-anak dapat menikmati masa kanak-kanak dan dapat tumbuh kembang sesuai usianya. Jika dilihat dari perspektif gender, secara global jumlah anak perempuan tampaknya lebih sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki.

Saat ini ada kecenderungan hampir di setiap desa ada satu TK karena sepertinya sudah menjadi kewajiban setiap anak yang mau masuk sekolah dasar (SD) harus melewati sekolah

taman kanak-kanak (TK). Pendidikan Taman kanak-kanak sangat penting untuk tumbuh kembang anak karena pendidikan ini merupakan salah satu media untuk membentuk karakter anak melalui berbagai permainan, oleh karena itu fasilitas pendidikan ini paling tidak sudah harus ada di setiap desa. Di samping itu, taman kanak-kanak adalah jembatan bagi anak-anak untuk ke Sekolah Dasar sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah, agar wadah kelompok bermain dan taman kanak-kanak negeri lebih banyak dengan biaya pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat seperti halnya di sekolah dasar. Pada kenyataannya saat ini biaya pendidikan TK masih relatif tinggi, terutama di TK swasta. Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada tahun 2021 seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel: 4.4. Jumlah PAUD berdasarkan jenis kelamin di Kota Denpasar pada Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	54	54	108
2	Kec. Denpasar Selatan	71	44	115
3	Kec. Denpasar Timur	137	125	262
4	Kec. Denpasar Utara	70	55	125
Jumlah		332	278	610

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

Dari tabel 4.4 tampak bahwa secara absolut jumlah siswa PAUD terbanyak ada di kecamatan Denpasar Barat yakni 262

anak, sementara jumlah PAUD paling sedikit ada di Kecamatan Denpasar Selatan. Sedikit banyaknya jumlah ini tergantung dari jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa jumlah PAUD laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan.

4.4.2 Jumlah Siswa Sekolah Dasar (SD)

Setelah mengikuti Pendidikan di tingkat PAUD, selanjutnya anak-anak akan memasuki pendidikan berikutnya yakni ke tingkat sekolah dasar (SD). Usia anak wajib masuk SD adalah 7– 12 tahun. Secara umum angka partisipasi sekolah pada jenjang sekolah dasar biasanya lebih tinggi dibandingkan jenjang Pendidikan lainnya seperti SMP dan SMA karena jenjang sekolah dasar merupakan Pendidikan yang paling dasar dan murah secara ekonomis.

Tingkat partisipasi sekolah penduduk menunjukkan capaian dari niat dan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi seluruh penduduk. Sementara itu, dewasa ini kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan juga sudah semakin meningkat sehingga hampir tidak ada lagi penduduk usia sekolah di Kota Denpasar yang tidak bersekolah. Terkait dengan jumlah penduduk yang tercatat mengikuti pendidikan tingkat sekolah dasar (SD), yang tercatat di Kota Denpasar seperti tampak pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel : 4.5. Jumlah Siswa SD menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	11.575	10.921	22.496
2	Kec. Denpasar Selatan	11.053	9.954	21.007
3	Kec. Denpasar Timur	9.018	8.134	17.152
4	Kec. Denpasar Utara	11.248	10.256	21.504
Jumlah		42.894	39.265	82.159

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

Dari tabel 4.5 di atas tampak bahwa jumlah siswa SD terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Barat (22.496) dan jumlah terkecil ada di Kecamatan Denpasar Timur yakni 17.102 siswa. Jika dilihat perbandingan menurut jenis kelamin tampak bahwa secara total jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan siswa perempuan yakni 42.894 siswa berbanding 39.265 siswa.

4.4.3 Jumlah Siswa SMP

Secara umum bila memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi partisipasi penduduk biasanya akan semakin kecil. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah siswa SD dan SMP, dan SMA. Jumlah siswa SMP lebih sedikit dibandingkan SD, demikian juga jumlah siswa SMA lebih kecil dari SMP. Belakangan ini dengan diluncurkannya program wajib belajar sembilan tahun partisipasi penduduk usia sekolah nampak

semakin tinggi karena kebijakan ini dapat mendorong penduduk untuk bisa menempuh jenjang pendidikan paling tidak sampai SMP. Namun demikian seringkali para orang tua khususnya masyarakat yang masih ada di pedesaan masih membatasi kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi anak perempuannya karena anak perempuan dianggap tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena mereka akan menjadi milik orang lain. Stereotipe gender yang demikian ini yang menyebabkan semakin tinggi jenjang pendidikan maka persentase partisipasi sekolah anak perempuan akan menjadi semakin kecil.

Kondisi ini tampak juga pada jenjang pendidikan SMP, dimana untuk di Kota Denpasar partisipasi anak perempuan dan anak laki-laki yang duduk di jenjang pendidikan SMP masih menunjukkan sedikit ketimpangan, dimana jumlah anak perempuan yang masuk di SMP masih lebih kecil dibandingkan siswa laki-laki. Kondisi ini dipaparkan pada Tabel 4.6 berikut ini. Dari table ini tampak bahwa secara umum jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah siswa perempuan yakni 18.785 : 17.423. Ini artinya masih tampak terjadi disparitas gender yang relative tinggi. Jika dilihat kondisi per kecamatan tampak bahwa jumlah siswa SMP terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Delatan yakni 14.593 siswa, sementara jumlah siswa yang paling sedikit ada di Kecamatan Denpasar Barat. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas Pendidikan yang ada di masing-masing kecamatan.

Tabel : 4.6. Jumlah Siswa SMP menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Tahun 2020-2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kec. Denpasar Barat	3.172	2.941	6.113
2	Kec. Denpasar Selatan	7.675	6.918	14.593
3	Kec. Denpasar Timur	3.724	3.649	7.373
4	Kec. Denpasar Utara	4.214	3.915	8.129
Jumlah		18.785	17.423	36.208

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

4.5 Siswa Putus Sekolah

Seperti kita ketahui Bersama selama situasi pandemic covid 19 masyarakat secara umum dan Kota Denpasar secara khusus mengalami keterpurukan ekonomi. Ini sangat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Hampir semua kegiatan termasuk kegiatan Pendidikan harus dilakukan secara daring. Sistem pembelajaran seperti ini dengan sendirinya menuntut kemampuan keluarga untuk memiliki IT terutama computer atau hand pon (HP). Hal ini menjadi salah satu factor terjadinya putus sekolah bagi anak-anak yang kurang mampu atau penduduk miskin. Siswa yang putus sekolah/ *drop out* adalah murid yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya pada jenjang pendidikan tertentu, yang disebabkan oleh persyaratan tertentu gagal dipenuhi oleh murid yang bersangkutan.

Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoaalah drop out seperti kebijakan wajib

belajar (wajar) sembilan tahun, program bea siswa sampai pada pemberian dana BOS. Program-program yang demikian ini sudah tentu sangat membantu keberlangsungan pendidikan penduduk terutama sangat dirasakan oleh penduduk miskin. Namun demikian, sampai saat ini masih saja ada anak-anak yang putus sekolah/drop out (DO). Angka DO menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar tahun 2021 seperti terpapar pada tabel berikut.

Tabel : 4.7. Jumlah Siswa SD/MI yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021
1	Kec. Denpasar Barat	86
2	Kec. Denpasar Selatan	6
3	Kec. Denpasar Timur	48
4	Kec. Denpasar Utara	9
	Jumlah	149

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

Mencermati tabel 4.7 di atas tampak bahwa pada tahun 2021 ada 149 siswa sekolah dasar/madrasah Islamiah (SD/MI) yang putus sekolah di Kota Denpasar. Angka putus sekolah terbanyak ada di Kecamatan Denpasar Barat yang mencapai 86 orang sedangkan angka putus sekolah terendah ada di Kecamatan Denpasar Selatan. Sayangnya data tersebut di atas tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak diketahui apakah yang lebih banyak putus sekolah anak laki-laki atau anak perempuan.

Tidak bisa dipungkiri, selain putus sekolah terjadi di jenjang pendidikan sekolah dasar, putus sekolah juga terjadi pada jenjang pendidikan SMP, hal ini seperti tampak pada tabel berikut ini. Dari tabel ini tampak bahwa pada jenjang pendidikan SMP/MTs siswa yang putus sekolah berjumlah 110 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah angka DO di SD. Sayangnya data ini tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin sehingga tidak bisa dilakukan analisis gender.

Tabel : 4.8. Jumlah Siswa SMP/MTs yang Putus Sekolah berdasarkan Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Tahun 2021
1	Kec. Denpasar Barat	56
2	Kec. Denpasar Selatan	20
3	Kec. Denpasar Timur	19
4	Kec. Denpasar Utara	15
	Jumlah	110

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

4.6 Jumlah Guru

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan management pendidikan adalah keberadaan guru. Keberhasilan pembangunan pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Oleh karena itu, guru sangat penting untuk memiliki kompetensi dan pendidikan yang memadai. Kelayakan guru meliputi kompetensinya serta relevansi keahliannya (ijazah pendidikannya) dengan bidang studi yang diajar. Pada masa lalu

seorang guru cukup memiliki ijazah terakhir dari sekolah pendidikan guru, seperti Sekolah Guru Bawah (SGB), Sekolah Pendidikan Guru (SPG), Pendidikan Guru Agama (PGA), Sekolah Guru Olah Raga (SGO) dan lain-lain, dimana sekolah-sekolah tersebut memang sudah dipersiapkan khusus untuk mencetak guru. Namun dalam perkembangan terakhir, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Guru dan Dosen, seorang guru minimal berpendidikan Strata 1 (S1). Karena itu, pendidikan terakhir guru pada masing-masing jenis kelamin penting ditampilkan untuk melihat profil gender pada indikator mutu dan relevansi pendidikan. Disamping itu salah satu indikator yang dipakai alat ukur untuk mengukur kelayakan guru adalah melalui sertifikasi. Apabila seorang guru sudah memiliki sertifikat sebagai seorang guru, maka ia dianggap sebagai pendidik yang profesional dan dianggap layak menjadi seorang pendidik. Eksistensi guru di Kota Denpasar tidak hanya tamatan SLTA keguruan, namun sudah relatif banyak yang berijazah sarjana strata satu (S1) dan sarjana strata dua (S2). Terkait dengan keberadaan guru di Kota Denpasar akan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.9 ini menunjukkan bahwa sampai saat ini sebagian besar guru SD di Kota Denpasar masih ada yang berpendidikan SMA sebanyak 41 orang yang terdiri dari 13 guru laki-laki dan 19 guru perempuan. Nampaknya sebagian besar dari guru SD di Denpasar sudah berijazah sarjana (S1), hanya sebagian kecil (6 orang) yang memiliki ijazah strata dua (S2). Jika dilihat dari perspektif gender tampak dengan jelas terjadi ketimpangan yang sangat menonjol dimana jumlah guru laki-laki jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan guru perempuan. Kondisi ini menandakan bahwa di masyarakat masih tertanam *mindset* yang sangat kuat bahwa urusan pengasuhan anak

lebih pantas dilakukan oleh perempuan. Dalam konteks ini, anak SD identik dengan anak-anak yang perlu diasuh secara profesional. Peran pengasuhan seperti ini secara ideologis masih dianggap sebagai peran perempuan. Oleh karena itu, secara umum tidak saja di Kota Denpasar guru SD didominasi oleh kaum perempuan, tetapi kondisi ini terjadi hampir di seluruh Kabupaten/kota di Bali. Untuk mengatasi persoalan ini masih perlu ada sosialisasi bahwa guru SD bisa dilakukan oleh kaum laki-laki karena urusan anak pada dasarnya adalah urusan orang tua, bukan hanya menjadi urusan perempuan/istri. Jika hal ini sudah disadari oleh masyarakat maka guru SD tidak didominasi oleh kaum perempuan.

Tabel : 4.9. Jumlah Guru SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Kecamatan	Jenjang Pendidikan							
	SMA		Dip 1/2/3		S1		S2	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Denpasar Utara	4	12	32	73	81	235	0	0
Denpasar Timur	8	15	20	66	96	274	0	3
Denpasar Selatan	1	0	29	79	72	191	1	1
Denpasar Barat	0	2	14	37	32	109	0	1
Jumlah	13	29	95	255	281	809	1	5

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2022

4.7 Guru yang Tersertifikasi

Saat ini pemerintah menginginkan semua pendidik agar meningkatkan profesionalisme kerjanya dalam mendidik anak-anaknya di sekolah. Untuk kepentingan ini, maka pemerintah telah mengeluarkan UU. No. 15/ 2006 tentang guru dan dosen.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan bahwa seorang guru baik guru SD, SMP maupun SMA minimal harus bergelar sarjana strata satu (S1) dan dosen paling tidak harus mempunyai ijazah master (S2). Bila tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai yang diatur dalam undang-undang maka mereka tidak boleh ikut sertifikasi. Jika tidak tersertifikasi konsekwensinya adalah tidak memperoleh tunjangan profesi sebagai seorang guru/dosen. Hal ini pada dasarnya dapat memotivasi para guru/dosen untuk meningkatkan pendidikannya paling tidak memiliki ijazah S1 bagi guru dan ijazah S2 bagi dosen.

Namun demikian tidaklah mudah bagi para guru dan dosen untuk bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti tersebut di atas. Oleh karena itu sampai saat ini jumlah guru dan dosen yang tersertifikasi tampaknya masih relatif sedikit, disamping karena persyaratan yang cukup ketat juga karena ada pembatasan kuota. Jumlah guru yang sudah tersertifikasi menurut jenjang pendidikan di Kota Denpasar seperti tertera pada Tabel: 4.9 berikut ini.

Jika Tabel 4.9 dicermati lebih dalam tampak bahwa jumlah guru SD yang sudah tersertifikasi tahun 2021 berjumlah 1.739 orang yang terdiri dari 443 (25,5%) guru laki-laki dan 1.296 (74,5%) guru perempuan. Ini artinya semua guru SD di Kota Denpasar sudah tersertifikasi.

Tabel: 4.10. Jumlah Guru SD yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2020/2021	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa dan Sastra Bali	2	11
Bahasa Inggris	1	11
Bahasa Jepang	1	0
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	0	1
Ekonomi	1	0
Guru Kelas SD/MI	285	1040
Kependidikan Dasar	2	4
Kewirausahaan	0	1
Lainnya	0	7
Matematika	0	3
Muatan Lokal Bahasa Daerah	5	16
Pendidikan Agama Budha	1	4
Pendidikan Agama Hindu	27	129
Pendidikan Agama Islam	23	32
Pendidikan Agama Katholik	1	4
Pendidikan Agama Kong hu chu	0	3
Pendidikan Agama Kristen	0	1
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	93	27
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	0	1
Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn)	1	1
Seni Budaya		
Jumlah	443	1296

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2020/202

Tabel : 4.11. Jumlah Guru SMP yang Tersertifikasi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Bidang Studi Sertifikasi	Tahun 2020/2021	
	Laki-laki	Perempuan
Bahasa Bali	4	3
Bahasa Indonesia	23	64
Bahasa Inggris	18	68
Bahasa Prancis	0	1
Bimbingan dan Konseling (Konselor)	6	31
Fisika	3	1
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	34	61
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	29	59
Keterampilan	1	6
KKPI	1	0
Matematika	54	58
Muatan Lokal Bahasa Daerah	14	18
Pendidikan Agama Budha	0	1
Pendidikan Agama Hindu	12	28
Pendidikan Agama Islam	8	6
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	24	39
Pendidikan Agama Katholik	0	1
Pendidikan Agama Kong hu chu	1	3
Pendidikan Agama Kristen Protestan	1	1
Pendidikan Biologi	1	4
Pendidikan Ekonomi	1	2
Pendidikan Jasmani (OR dan kesehatan)	38	5
Sejarah	1	1
Seni Budaya	11	39
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	5	4
Lainnya	0	4
Jumlah	290	508

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2020/2021

Sementara itu jumlah guru SMP yang sudah tersertifikasi dapat dilihat seperti table 4.10 berikut ini. Dari table 4.11 ini tampak bahwa guru SMP yang sudah tersertifikasi berjumlah 798 orang yang terdiri dari 290 guru laki-laki dan 508 guru perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa jumlah guru perempuan jauh lebih banyak dibandingkan guru laki-laki. Apakah ini disebabkan karena guru perempuan lebih tekun dan rajin untuk mengurus sertifikasi atau karena factor lainnya. Hal ini masih perlu dilakukan kajian lebih jauh sehingga mendapat jawaban yang tepat.

4.8 Kepala Sekolah

Jika berbicara kepala sekolah biasanya yang melakoninya adalah lebih banyak laki-laki. Hal ini tentu tidak lepas dari ideologi familialisme yang menempatkan laki-laki sebagai kepala dalam keluarga, sehingga hal ini terbawa pada peran publik. Berposisi sebagai kepala dalam suatu lembaga sudah tentu ia berperan juga dalam pengambilan keputusan. Pada lingkungan sekolah, kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sosok kepala sekolah, sebab pengambil keputusan disekolah adalah kepala sekolah. Dengan demikian, kualitas pendidikan sebuah sekolah juga ditentukan oleh kualitas kepala sekolahnya, disamping faktor-faktor lainnya, seperti sarana dan prasarana, kurikulum, buku ajar, proses belajar mengajar, dan sebagainya. Apakah kebijakan/program/kegiatan sekolah responsif gender atau tidak, tentu saja sangat dipengaruhi oleh kepekaan gender dari kepala sekolah. Hal itu dipengaruhi pula oleh proporsi kepala sekolah menurut jenis kelamin. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kepala sekolah selalu didominasi oleh kaum laki-laki. Namun pada saat ini kondisi ini sudah mulai berubah dimana kepala sekolah sudah

banyak diduduki oleh perempuan, seperti halnya yang terlihat pada data di table 4.12 berikut ini.

Tabel : 4.12. Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Tahun 2021	
	Laki-laki	Perempuan
<S1	0	1
S1	67	99
>S1	28	42
Jumlah	95	142

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Denpasar

Dari Tabel 4.13 di atas menggambarkan bahwa jumlah kepala sekolah di SD di Kota Denpasar tahun 2021 didominasi oleh kaum perempuan. Dari 237 kepala sekolah di SD yang ada di Kota Denpasar 95 orang (40,1%) adalah laki-laki sementara 142 orang (59 %) perempuan. Kondisi ini tentu sangat menggembirakan karena selama ini kepala sekolah baik di tingkat SD maupun SMP selalu didominasi oleh laki-laki. Ini artinya akses perempuan untuk menjadi pemimpin sudah mulai terbuka.

BAB V

KESEHATAN

Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan, yakni ketahanan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, kualitas SDM, revolusi mental, memperkuat infrastruktur serta pelayanan dasar, lingkungan hidup, dan terakhir memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Tujuan akhir dari agenda pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Indonesia sesuai dengan amanat yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya diiringi dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia atau SDM. Kualitas SDM dapat dicapai salah satunya melalui peningkatan kualitas kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya bebas dari penyakit dan cacat. Sedangkan menurut Notoadmodjo (2012) kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pembangunan kesehatan secara nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam tiga dekade terakhir telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara bermakna. Derajat kesehatan masyarakat telah menunjukkan perbaikan seperti dapat dilihat dari angka

kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan umur harapan hidup. Kondisi ini implikasi dari peningkatan dari pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sepanjang siklus kehidupannya dari sejak dilahirkan, proses tumbuh kembang, hingga masa tua dan akhirnya meninggal dunia. Peningkatan derajat kesehatan yang terus meningkat dengan diiringi oleh peningkatan derajat lainnya seperti bidang pendidikan, ekonomi dan sosial tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

Kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, khususnya pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada capaian pembangunan kesehatan dengan menitikberatkan pada beberapa tolak ukur sebagai berikut.

5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

Kelahiran merupakan awal dari siklus kehidupan seseorang, berawal dari pelayanan kesehatan yang tepat maka proses pra kelahiran dan pasca kelahiran menjadi indikator bagi lahirnya SDM yang berkualitas karena penambahan jumlah penduduk melalui kelahiran generasi yang sehat maka akan menambah SDM yang berkualitas.

Penghitungan jumlah kelahiran di suatu wilayah menurut Badan Pusat Statistik adalah banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama atau dikenal dengan nama Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR). Kegunaan dari Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) Untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu daerah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah Angka kelahiran bayi di

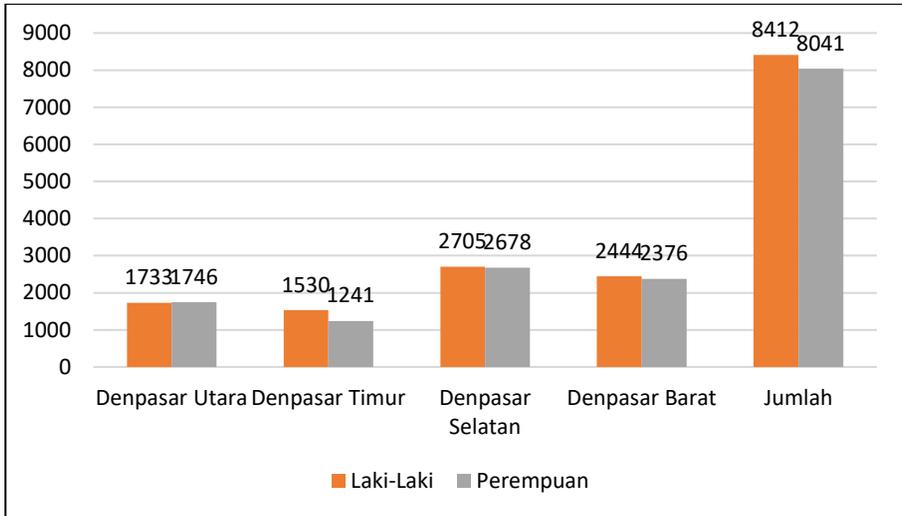
kota Denpasar secara khusus dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel: 5.1. Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	2020		2021	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	1.733	1.746	1.718	1.712
2.	Denpasar Timur	1.530	1.241	1.508	1.253
3.	Denpasar Selatan	2.705	2.678	2.761	2.807
4.	Denpasar Barat	2.444	2.376	2.462	2.516
Jumlah		8.412	8.041	8.449	8.288

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari Tabel 5.1 tentang Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 5.1 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Gambar 5.2 Jumlah Angka Kelahiran Bayi di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Dari tabel dan grafik 5.1, memperlihatkan secara kuantitatif angka kelahiran bayi secara akumulatif pada tahun 2020 berjumlah 16.453 meningkat menjadi 16.737 pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan 284 kelahiran atau 1,7 %. Selisih jumlah angka kelahiran bayi laki-laki dengan jumlah angka kelahiran bayi perempuan adalah 371 atau 22,5% di tahun 2020 dan 161 atau 1% di tahun 2021 dari total jumlah kelahiran bayi. Jumlah angka kelahiran bayi tertinggi berada di kecamatan Denpasar Selatan dengan prosentase 32,7 % pada tahun 2020 dan 33,3% pada tahun 2021 dari jumlah angka kelahiran bayi di tiga kecamatan lainnya. Jumlah angka kelahiran bayi terendah berada di wilayah Denpasar Timur.

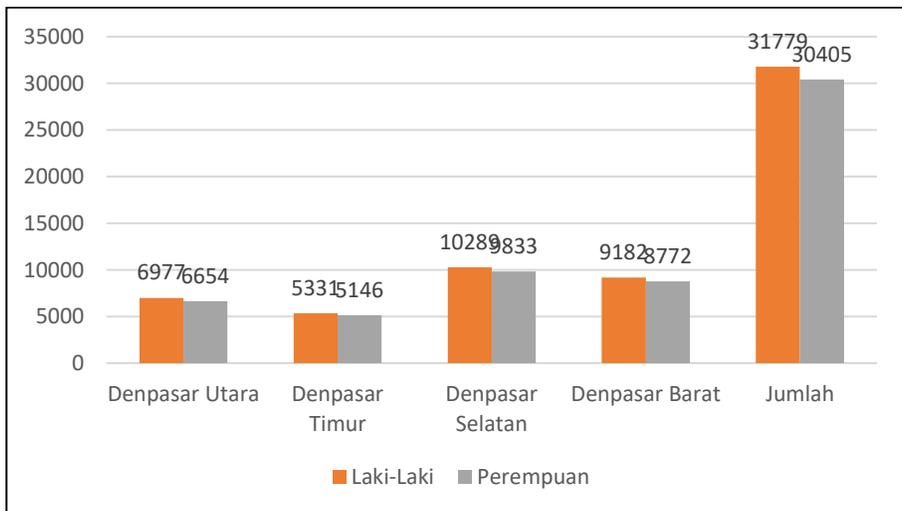
5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (2011) menjelaskan balita merupakan usia dimana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Proses pertumbuhan dan perkembangan setiap individu berbeda-beda, bisa cepat maupun lambat tergantung dari beberapa faktor, yaitu nutrisi, lingkungan dan sosial ekonomi keluarga. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2014, anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan. Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interselular, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Jumlah angka balita di kota Denpasar pada tahun 2020 dan 2021 secara khusus terlihat pada tabel dan grafik berikut.

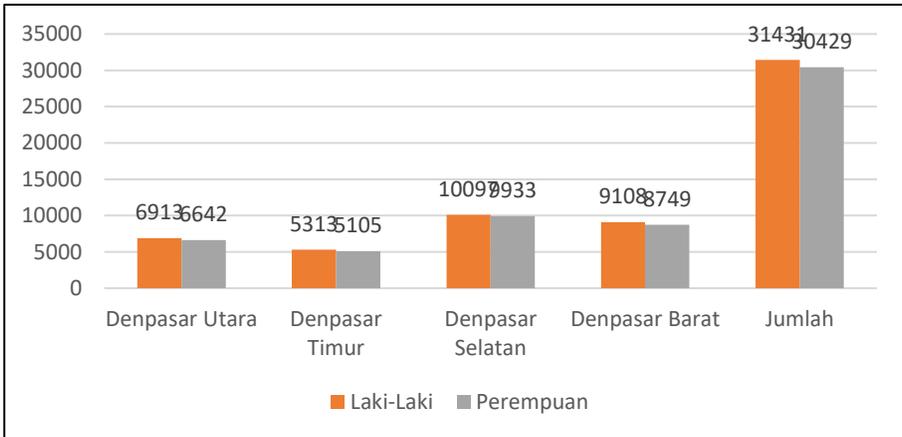
Tabel : 5.2. Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	2020		2021	
		L	P	L	P
1.	Denpasar Utara	6.977	6.654	6.913	6.642
2.	Denpasar Timur	5.331	5.146	5.313	5.105
3.	Denpasar Selatan	10.289	9.833	10.097	9.933
4.	Denpasar Barat	9.182	8.772	9.108	8.749
Jumlah		31.779	30.405	31.431	30.429

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022



Gambar 5.3 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020



Gambar 5.4 Jumlah Angka Balita di Kota Denpasar Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Dari tabel dan grafik 5.2, memperlihatkan secara kuantitatif jumlah balita pada tahun 2020 berjumlah 62.184, pada tahun 2021 berkurang 324 balita menjadi 61.860 atau turun 0,5% pada tahun 2021. Turun atau berkurangnya jumlah balita sangat kontradiktif jika dikaitkan dengan jumlah angka kelahiran bayi yang mengalami peningkatan 1,7% di tahun 2021. Penyebab berkurang atau turunnya jumlah balita ini perlu diteliti lebih lanjut. Jumlah balita berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dari balita jenis kelamin perempuan. Selisih jumlah angka balita berjenis kelamin laki-laki dengan balita perempuan adalah 1.374 atau 2,2% di tahun 2020 dan 1.002 atau 1,6% di tahun 2021 dari total jumlah balita. Jumlah angka balita tertinggi berada di kecamatan Denpasar Selatan dan terendah di kecamatan Denpasar Timur.

5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Rekomendasi *World Health Organization* (WHO) itu bahwa makanan yang terbaik untuk bayi dan anak ada 4. Yang pertama IMD, kedua ASI eksklusif, ketiga MPASI, keempat bayi diberi ASI sampai usia 2 tahun. Pengertian tentang ASI Eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif adalah ASI atau Air Susu Ibu yang diberikan kepada Bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Beberapa data kajian dan fakta global dalam *The Lancet Breastfeeding Series* tahun 2016 membuktikan bahwa ASI eksklusif menurunkan angka kematian karena infeksi sebanyak 88% pada bayi berusia kurang dari 3 bulan.

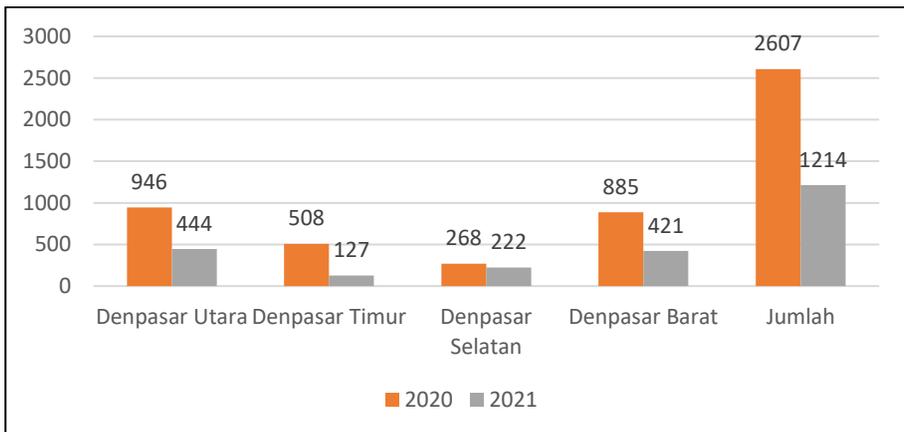
Pemberian ASI yang tepat atau ASI Eksklusif sangat menentukan kualitas fisik dan psikis bagi tumbuh kembang sang anak (bayi dan batita), karena kandungan ASI sangat sesuai dengan kebutuhan fisik bayi untuk tumbuh kembang dan tak tergantung. Sedang secara psikologis dengan pemberian ASI maka kedekatan antara ibu dengan sang anak atau *bounding* terbentuk secara alami dan ini bagian dari pemenuhan kebutuhan kasih sayang paling awal dari proses tumbuh kembang sang anak. Secara khusus pemberian ASI Eksklusif di kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel : 5.3. ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Denpasar Utara	946	444
2.	Denpasar Timur	508	127
3.	Denpasar Selatan	268	222
4.	Denpasar Barat	885	421
Jumlah		2.607	1.214

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari Tabel 5.3 tentang ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut kecamatan tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



Gambar 5.5 ASI Eksklusif di Kota Denpasar menurut Kecamatan Tahun 2020 dan 2021

Dari tabel 5.3 memperlihatkan secara kualitatif ASI Eksklusif dari tahun 2020 berjumlah 2.607 turun menjadi 1.214 pada tahun 2021 atau turun 1.393 (53,4%). Kondisi ini sangat kontradiktif jika dikaitkan dengan tabel 5.1 tentang jumlah kelahiran bayi pada tahun 2021 sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kondisi ini serta penyebab penurunan ASI Eksklusif. Gerakan pemberian ASI Eksklusif harus terus disosialisasikan kepada berbagai tingkatan masyarakat, karena kesadaran pemberian ASI secara eksklusif tidak berkorelasi langsung dengan tingkat Pendidikan dan pengetahuan, perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya keluarga dekat.

5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Status gizi menurut Kemenkes RI dan WHO adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh untuk metabolisme. Pengukuran Status Gizi yang paling mudah dimengerti oleh masyarakat umum dengan menggunakan indeks BB/U (Berat Badan menurut Umur). Indeks BB/U adalah pengukuran total berat badan termasuk air, lemak, tulang dan otot (As'ad, 2002). Status Gizi dengan Indikator BB/U menurut baku WHO NCHS kategori Z- Score Status gizi lebih $> 2,0$ SD Status gizi baik $- 2,0$ sampai $2,0$ SD Status gizi kurang $< - 2,0$ SD Status gizi buruk $\leq - 3,0$ SD (Persagi, 2003).

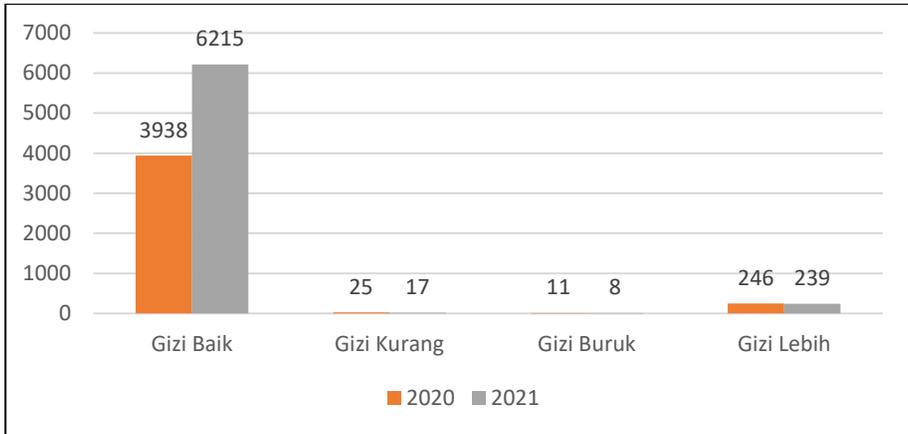
Secara khusus gambaran tentang status gizi dari masyarakat kota Denpasar pada tahun 2020-2021 terlihat pada data tabel dan grafik berikut.

Tabel : 5.4. Status Gizi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

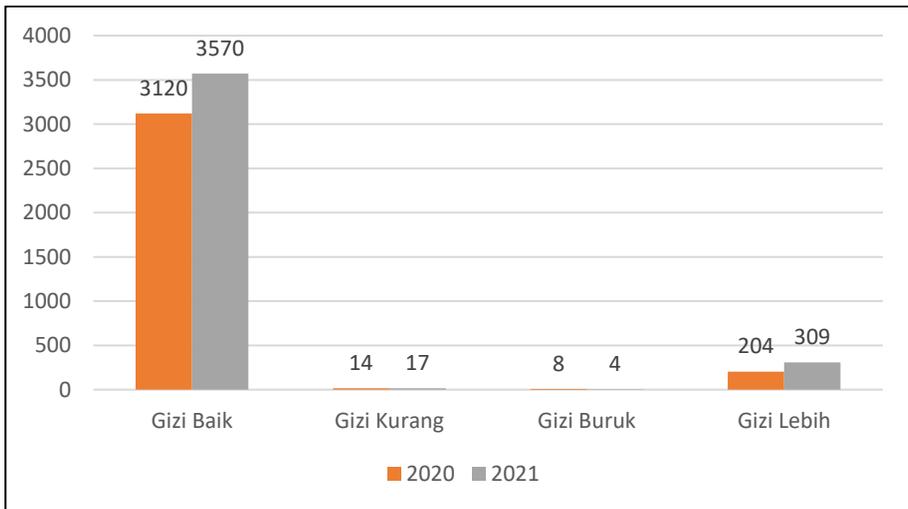
No	Kecamatan	Status Gizi	2020	2021
1.	Denpasar Utara	Gizi Baik	3.938	6.215
		Gizi Kurang	25	17
		Gizi Buruk	11	8
		Gizi Lebih	246	239
2.	Denpasar Timur	Gizi Baik	3.120	3.570
		Gizi Kurang	14	17
		Gizi Buruk	8	4
		Gizi Lebih	204	309
3.	Denpasar Selatan	Gizi Baik	4.482	5.767
		Gizi Kurang	20	10
		Gizi Buruk	9	1
		Gizi Lebih	270	252
4.	Denpasar Barat	Gizi Baik	1.989	3.901
		Gizi Kurang	34	45
		Gizi Buruk	3	5
		Gizi Lebih	303	434

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar

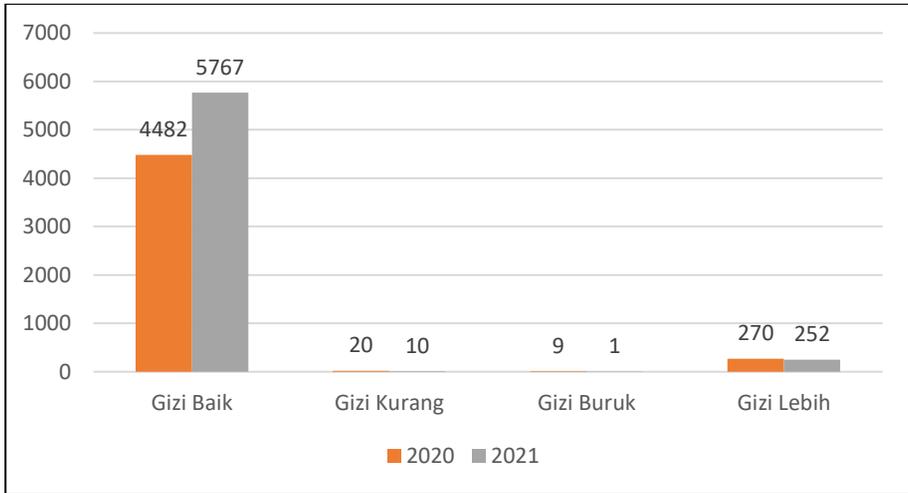
Dari Tabel 5.4 tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



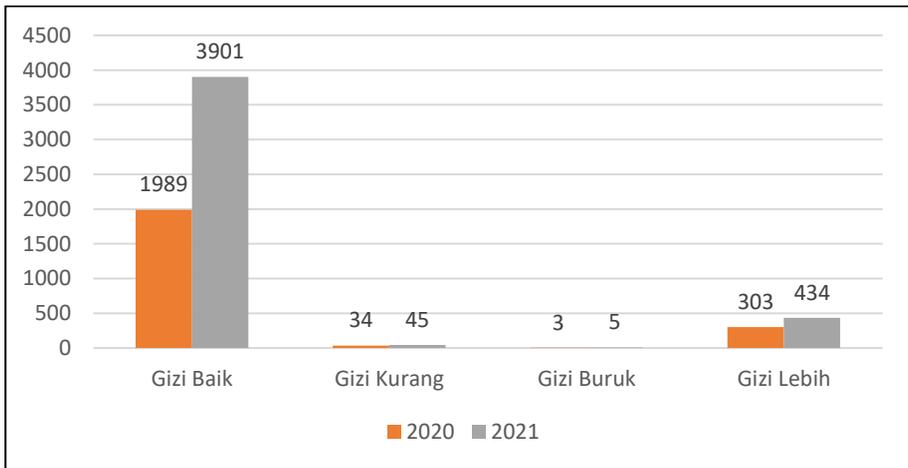
Gambar 5.6 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.7 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.8 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.9 Status Gizi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2020 dan Tahun 2021

Dari tabel dan grafik 5.4 tentang Status Gizi di Kota Denpasar tahun 2020 dan 2021, memperlihatkan bahwa secara umum jumlah status Gizi Baik mengalami peningkatan pada tahun 2021. Peningkatan Status Gizi Baik pada tahun 2021 pada masing-masing kecamatan sebagai berikut di kecamatan Denpasar Utara meningkat 2.274, di kecamatan Denpasar Timur meningkat 450; di kecamatan Denpasar Selatan 1.285 ; di kecamatan Denpasar Barat meningkat 1.912. Status Gizi Kurang, Gizi Buruk dan Gizi Lebih pada tahun 2021 di kecamatan Denpasar Utara dan Denpasar Selatan mengalami penurunan, sedang pada kecamatan Denpasar Timur dan Denpasar Barat mengalami peningkatan.

5.5. Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Pojok ASI atau ada pula yang menyebutnya dengan Ruang Laktasi atau *Nursing Room* adalah sebuah ruangan khusus yang sengaja disediakan oleh institusi (perkantoran, perusahaan, tempat bekerja) yang memiliki fungsi untuk memberikan privasi bagi seorang ibu menyusui yang juga bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya ataupun untuk memerah ASI. Pojok ASI merupakan implementasi dari Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

Penggunaan istilah “Pojok ASI” bagi sebagian orang kurang disukai, penggunaan kata 'pojok' memang bermakna negatif karena mengesankan bahwa menyusui tidak lebih penting dari aktivitas lain sehingga harus dilakukan sambil 'mojok' alias menyingkir ke pojok. Kesan lain dari kata pojok

adalah tempat yang sempit dan seadanya. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan makna penting pemberian ASI, dalam prosesnya diperlukan ketenangan bagi si ibu dan sang buah hati agar kualitas ASI maksimal. Maka muncul usulan untuk menggunakan istilah Ruang Menyusui sebagai pengganti istilah Pojok ASI dari Dr Utami Roesli, SpA, IBCLC, FABM, pakar laktasi dari RS St Carolus, meskipun saat ini yang lebih dikenal dan digunakan oleh instansi atau masyarakat adalah Pojok ASI.

Kenyataan di masyarakat tidak semua institusi (perkantoran, perusahaan, tempat bekerja) menyediakan Ruang Menyusui, di kota Denpasar jumlah dari Ruang Menyusui dapat dilihat pada tabel dan grafik 5.5. Pada tabel dan grafik 5.5. menggambarkan data Ruang Menyusui yang ada di Puskesmas, belum menggambarkan yang ada di perkantoran atau di tempat-tempat umum yang ada di wilayah Kota Denpasar.

Tabel : 5.5. Pojok ASI di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Instansi	Tahun	
		2020	2021
1	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
2	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
3	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara	1	1
4	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
5	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat	1	1
6	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1
7	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Timur	1	1

8	UPTD Puskesmas I Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
9	UPTD Puskesmas II Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
10	UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
11	UPTD Puskesmas IV Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan	1	1
12	Dikes Kota Denpasar	1	1
Jumlah		12	12

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari tabel 5.5 data tentang Pojok ASI di Kota Denpasar tersebar pada 11 Puskesmas yang ada di wilayah 4 kecamatan sejumlah sebelas (11) pojok ASI dan satu pada kantor Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Jumlah Pojok ASI ini dari tahun 2020 hingga tahun 2021 masih sama atau tidak mengalami peningkatan secara kuantitatif yaitu 12 Pojok ASI.

5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan (Kemenkes,2017). Menurut Permenkes RI Nomor 12 tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan umum Imunisasi turunnnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Tujuan khusus program ini antara lain adalah sebagai berikut: 1) Tercapainya cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target RPJMN. 2) Tercapainya Universal Child Immunization/UCI (Prosentase minimal 80% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan) di

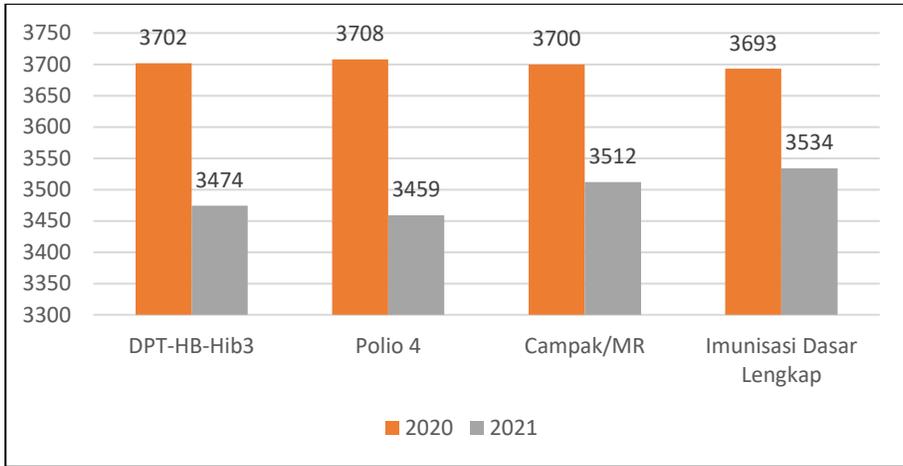
seluruh desa/kelurahan. Rincian tentang cakupan imunisasi pada bayi di kota Denpasar tahun 2020 dan 2021 terlihat pada data tabel dan grafik berikut.

Tabel : 5.6. Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

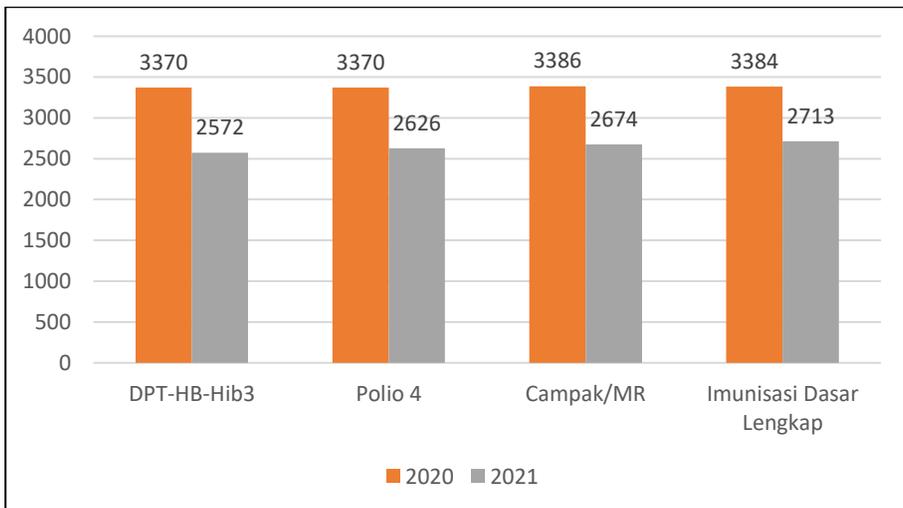
Kecamatan	Bayi Diimunisasi	2020	2021
Denpasar Utara	DPT-HB-Hib3	3.702	3.474
	Polio 4*	3.708	3.459
	Campak / MR	3.700	3.512
	Imunisasi Dasar Lengkap	3.693	3.534
Denpasar Timur	DPT-HB-Hib3	3.370	2.572
	Polio 4*	3.370	2.626
	Campak / MR	3.386	2.674
	Imunisasi Dasar Lengkap	3.384	2.713
Denpasar Selatan	DPT-HB-Hib3	3.608	5.561
	Polio 4*	3.624	5.463
	Campak / MR	3.652	5.743
	Imunisasi Dasar Lengkap	3.651	5.940
Denpasar Barat	DPT-HB-Hib3	4.858	4.523
	Polio 4*	4.856	4.582
	Campak / MR	4.882	4.597
	Imunisasi Dasar Lengkap	4.856	4.639
Jumlah		62.300	67.633

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

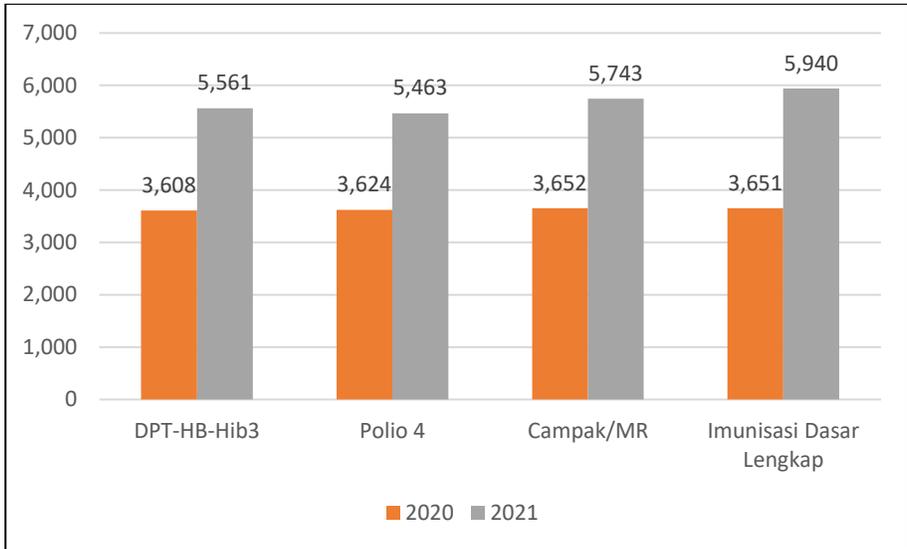
Dari Tabel 5.6 tentang Cakupan Imunisasi Pada Bayi di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut.



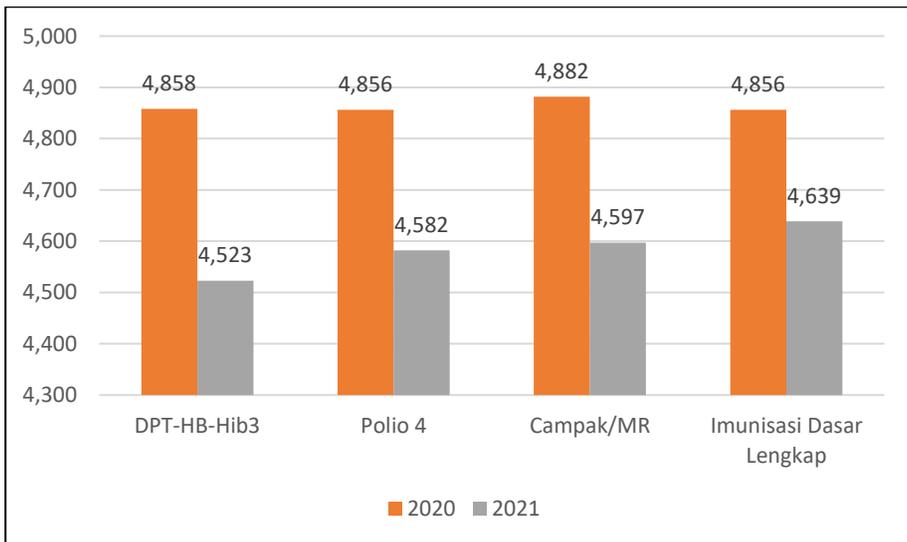
Gambar 5.10 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Utara Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.11 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.12 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Selatan Tahun 2020 dan 2021



Gambar 5.13 Cakupan Imunisasi pada Bayi di Kecamatan Denpasar Barat Tahun 2020 dan 2021

Dari tabel 5.6 cakupan imunisasi bayi di kota Denpasar dari tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlahnya meningkat 5.333. Namun demikian jika dilihat data di tiap kecamatan, jumlah cakupan imunisasi bayi yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hanya terjadi di kecamatan Denpasar Selatan, sedangkan pada 3 kecamatan lainnya yaitu Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Utara jumlahnya menurun.

5.7. Jumlah Dokter Umum di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Tenaga medis atau paramedis adalah salah satu faktor penentu terwujudnya derajat kesehatan masyarakat, salah satunya adalah dokter. Tugas dokter tidak hanya mengobati tetapi juga bertugas sebagai advokat di bidang kesehatan bagi pasien. Dokter mendampingi, memberikan edukasi, memotivasi, memberdayakan pasien serta mengajarkan tentang perilaku kesehatan yaitu tindakan preventif dan kuratif terhadap penyakit kepada pasien, keluarga pasien dan masyarakat pada umumnya.

Profesi dokter hingga saat ini merupakan salah satu profesi favorit di masyarakat, namun demikian tentunya harus diimbangi dengan peningkatan profesionalitas dari individu dokter. Secara khusus profesi dokter dapat diklasifikasikan antara lain dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dan ketiga klasifikasi profesi dokter ini, ditugaskan pada unit pelayanan kesehatan dari tingkat Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum. Secara khusus data dokter di wilayah kota Denpasar terlihat pada tabel dan grafik 5.7 dan 5.8. Pada tabel dan grafik 5.7 menjelaskan tentang jumlah dokter umum yang ada atau yang

bertugas di Puskesmas pada 4 wilayah kecamatan di kota Denpasar.

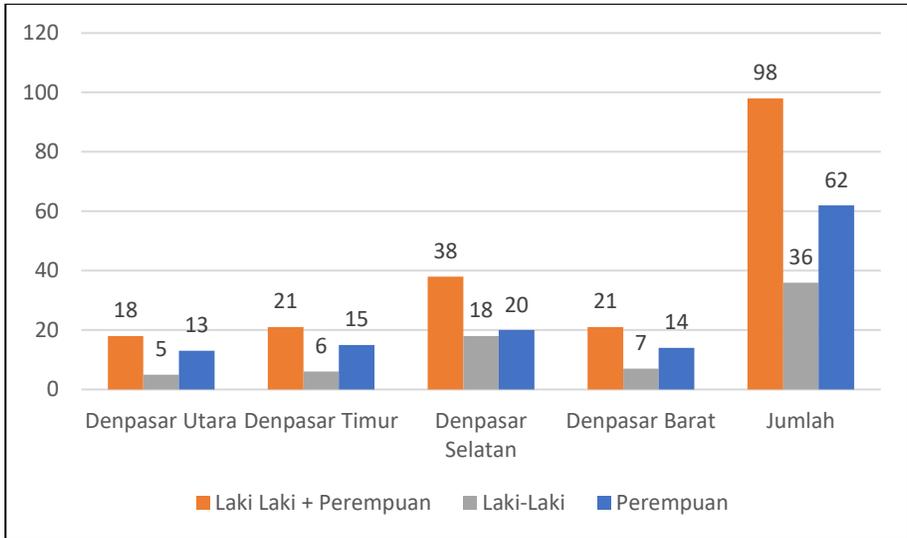
Dokter umum adalah tenaga medis yang diperkenankan untuk melakukan praktik medis tanpa harus spesifik memiliki spesialisasi tertentu, hal ini memungkinkannya untuk memeriksa masalah-masalah kesehatan pasien secara umum untuk segala usia (<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter>).

Tabel : 5.7. Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

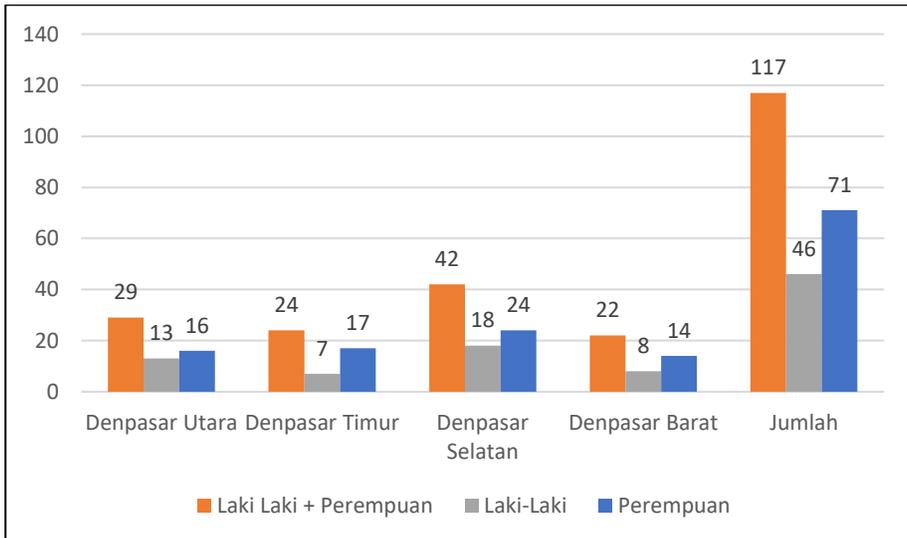
No	Tempat Tugas	Dokter Umum					
		2020			2021		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Puskesmas Denpasar Utara	5	13	18	13	16	29
2	Puskesmas Denpasar Timur	6	15	21	7	17	24
3	Puskesmas Denpasar Selatan	18	20	38	18	24	42
4	Puskesmas Denpasar Barat	7	14	21	8	14	22
Jumlah		36	62	98	46	71	117

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari Tabel 5.7 tentang Jumlah Dokter Umum menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar tahun 2020 dan 2021 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 5.14 Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020



Gambar 5.15 Jumlah Dokter Umum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Dari tabel dan grafik 5.7 memperlihatkan bahwa jumlah dokter di Kota Denpasar pada 2020 berjumlah 98 orang dokter menjadi 117 orang dokter pada tahun 2021. Wilayah kecamatan Denpasar Selatan dengan jumlah dokter relative terbanyak diantara 3 wilayah kecamatan lainnya. secara akumulatif jumlah dokter dengan jenis kelamin perempuan jumlahnya lebih banyak dari dokter berjenis kelamin laki-laki. Dokter berjenis kelamin perempuan di kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 62 orang atau 63 % dari jumlah dokter yang ada dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 71 orang atau 60% dari jumlah yang ada. Data dokter berdasarkan jenis kelamin ini merupakan salah satu bukti dari adanya kesetaraan gender khususnya di bidang kesehatan.

5.8. Jumlah Dokter Spesialis di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu. Untuk menjadi seorang dokter spesialis, seorang dokter harus menempuh program pendidikan dokter spesialis (PPDS). Program pendidikan dokter spesialis sendiri merupakan program lanjutan dari program profesi dokter setelah seorang dokter menyelesaikan program profesi, lolos Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, dan menjalani internsip di bawah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program pendidikan dokter spesialis di Indonesia hanya tersedia di fakultas-fakultas kedokteran universitas negeri. Lama program pendidikan bervariasi antar spesialis, dari 6 hingga 11 semester. Peserta program pendidikan dokter spesialis juga disebut sebagai residen (<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter>).

Kedokteran gigi adalah ilmu mengenai pencegahan dan perawatan penyakit atau kelainan pada gigi dan mulut melalui tindakan tanpa atau dengan pembedahan. Seseorang yang mempraktikkan ilmu kedokteran gigi disebut sebagai dokter gigi. Praktik kedokteran gigi umum meliputi tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap kondisi gigi dan mulut individu ataupun masyarakat. Tindakan perawatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter gigi umum antara lain penambalan gigi berlubang, pembersihan karang gigi, pencabutan gigi, pembuatan gigi tiruan, dan merapikan gigi dengan alat ortodonsia lepasan. Seorang dokter gigi sering kali menggunakan sinar-x dalam menegakkan diagnosis. Untuk dapat menangani kasus-kasus yang lebih sulit dan komprehensif, dokter gigi dapat melanjutkan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis untuk mendapatkan gelar dokter gigi spesialis (S-2) (<https://id.wikipedia.org/wiki/Dokter>).

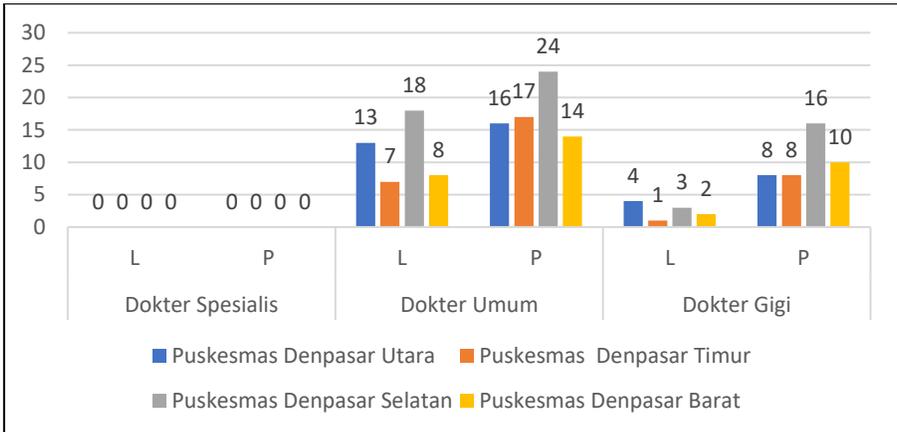
Secara khusus data jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di kota Denpasar sebagai berikut.

Tabel : 5.8. Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

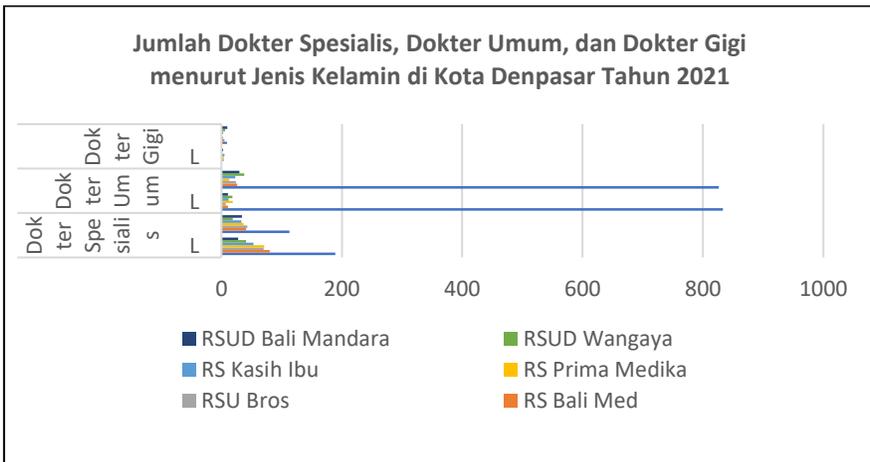
No	Tempat Tugas	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi		Jml
		L	P	L	P	L	P	
1	Puskesmas Denpasar Utara	0	0	13	16	4	8	41
2	Puskesmas Denpasar Timur	0	0	7	17	1	8	33
3	Puskesmas Denpasar Selatan	0	0	18	24	3	16	61
4	Puskesmas Denpasar Barat	0	0	8	14	2	10	34
Sub Total 1		0	0	46	71	10	42	169
1	RSUP Sanglah	189	113	833	826	1	9	1.971
2	RSK Mata Ramata	4	13	2	7	0	0	26
3	RSIA Pucuk Permata Hati	10	2	1	1	0	0	14
4	RSUD Wangaya	41	19	18	38	0	6	122
5	RS Tk II Udayana	29	17	7	16	0	5	74
6	RS Manuaba	10	4	2	3	0	2	21
7	RS Mata RSBM	3	11	5	8	0	0	27
8	RS Surya Husada	40	27	12	8	2	3	92
9	RSU Bros	70	43	7	24	4	3	151
10	RS Kasih Ibu	53	33	12	23	5	3	129
11	RS Darma Yadnya	33	13	8	5	0	0	59
12	RS Puri Raharja	46	16	15	20	0	2	99
13	RS Bakti Rahayu	9	8	7	12	0	0	36
14	RSIA Harapan Bunda	10	6	2	3	0	0	21
15	RSGM Kedokteran Mahasaraswati	0	0	0	0	16	41	57
16	RS Prima Medika	71	37	19	13	4	1	145
17	RS Bali Med	80	41	11	26	1	5	164
18	RSIA Puri Bunda	34	16	7	10	0	0	67
19	RS Bayangkara	23	12	11	19	0	3	68
20	RS Surya Husada Ubung	25	23	6	8	1	4	67
21	RSUD Bali Mandara	28	34	11	30	3	10	116
Sub Total 2		808	488	996	1.100	37	97	3.526

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari Tabel 5.8 tentang Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021 dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut.



Gambar 5.16 Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021



Gambar 5.17 Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis Menurut Jenis Kelamin dan Rumah Sakit di Kota Denpasar Tahun 2021

Dari tabel dan grafik 5.17 tentang Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021, memperlihatkan bahwa di setiap Puskesmas hanya memiliki Dokter Umum dan Dokter Gigi. Dokter Spesialis hanya ada di rumah sakit dan terbanyak berada di RSUP Sanglah. Jumlah Dokter Umum 2.096 atau 59%, Dokter Spesialis 1.296 atau 36,8% dan Dokter Gigi 134 atau 3,8%. Komposisi jumlah yang kurang berimbang antara dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi. Rendahnya jumlah dokter gigi mengindikasikan bahwa dokter gigi kurang populer dan juga mengindikasikan bahwa masyarakat masih kurang memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut.

5.9. Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu dari 4 pilar program intervensi penurunan kematian ibu (maternal) pada save motherhood. Penurunan angka kematian ibu sebagai indikator peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga. Program KB melalui pemakaian kontrasepsi menurunkan kematian maternal melalui dua mekanisme: (1) penurunan kelahiran, dan (2) penurunan kehamilan risiko tinggi. Tidak ada kelahiran tidak ada kematian ibu, dan penurunan kehamilan risiko tinggi berarti penurunan risiko kematian ibu.

Program KB tidak melarang tetapi mengatur supaya kehamilan terjadi hanya apabila ibu telah siap fisik, mental dan sosial. Apabila ibu belum siap hamil, ingin membatasi atau menunda kehamilan, program KB menganjurkan ibu memakai alat kontrasepsi sesuai kebutuhan kesehatan ibu. Sebagai prinsip, kehamilan sebaiknya terjadi pada situasi risiko terendah untuk mengalami gangguan kesehatan.

5.9.1 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB

Fasilitas kesehatan yang melayani KB di Kota Denpasar terdiri atas puskesmas, klinik pratama, klinik utama, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Pada tahun 2021 terdapat 100% puskesmas, 51,35% klinik pratama, 20% klinik utama, 100% RS Umum dan 50% RS Khusus yang melayani KB.

Tabel: 5.9 Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB di Kota Denpasar

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas	11
2	Klinik Pratama	19
3	Klinik Utama	5
4	RS Umum	15
5	RS Khusus	3
	Jumlah	53

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

5.9.2 Alat/Cara KB yang Digunakan

Salah satu wujud dari program Keluarga Berencana ini adalah pemakaian alat kontrasepsi yang dimaksudkan untuk menunda/mencegah kehamilan. Berbagai alat kontrasepsi diproduksi untuk dapat dipilih dan digunakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Alat kontrasepsi dapat dibagi menjadi alat kontrasepsi yang bersifat temporer (sementara) dan alat kontrasepsi permanen (selamanya). Dilihat dari jenisnya ada

beberapa jenis alat kontrasepsi yang diharapkan akan dapat menjadi pilihan bagi seorang suami atau istri yang dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan, perasaan nyaman dan aman pemakainya. Pada tabel 8.1 di bawah ada 7 (tujuh) jenis alat kontrasepsi yang dapat dijadikan pilihan bagi laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar tahun 2021, yaitu MOW/tubektomi; AKDR/IUD/Spiral, Suntikan KB;MOP; Pil KB; Kondom/karet KB' dan Implan.

Tabel : 5.10. Jumlah Perempuan Pernah Nikah Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Nikah Menurut Alat/Cara KB yang Digunakan

Alat/Cara KB yang Digunakan	2021
MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi	3.684
AKDR/IUD/Spiral	11.384
Suntikan KB	8.343
MOP	146
Pil KB	3.110
Kondom/Karet KB	1.309
IMPLAN	704
MAL	35
Total	28.715

Sumber : PPPAPPKB Kota Denpasar, 2022

Pada tabel tersebut menunjukkan jumlah penggunaan alat kontrasepsi oleh laki-laki dan perempuan yang pernah kawin usia 15-49 tahun yang berstatus kawin tahun 2021. Secara umum di Kota Denpasar jumlah laki-laki dan perempuan yang menggunakan alat kontrasepsi sebanyak 28.715 orang.

Penggunaan kontrasepsi terbanyak adalah AKDR/IUD/Spiral sebanyak 11.384 orang. AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim) atau IUD (Intra Uterine Device) atau spiral adalah alat kontrasepsi yang berupa perangkat plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim dengan maksud untuk menghadang sperma agar tidak membuahi sel telur. Satu kelebihan dari AKDR adalah pemakaiannya cukup satu kali saja tetapi berlaku untuk jangka waktu yang cukup panjang.

Suntikan KB merupakan alat kontrasepsi yang mejadi pilihan terbanyak kedua bagi perempuan yaitu sebanyak 8.343 orang. Suntikan KB ada yang digunakan untuk menunda kehamilan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan dan ada pula yang untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Oleh karenanya alat kontrasepsi ini termasuk kategori temporer dan tergolong murah.

Pilihan berikutnya adalah MOW/Tubektomi dan MOP/Vasektomi. Terdapat 3.684 orang yang menggunakan cara ber-KB ini. MOW/tubektomi adalah salah satu metode kontrasepsi permanen bagi perempuan yang dapat dilakukan melalau prosedur pembedahan.

Alat KB berikutnya adalah pil KB. Pil KB yang merupakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang khusus diperuntukkan bagi perempuan. Terdapat 3.110 orang yang memilih alat KB tersebut. Ada dua jenis pil KB, yaitu pil KB kombinasi dan pil KB khusus progestin. Pil KB bekerja dengan cara memengaruhi kerja indung telur dan rahim, sehingga mencegah terjadinya proses pembuahan, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Pil KB merupakan jenis alat kontrasepsi hormonal yang perlu dikonsumsi secara teratur pada waktu yang sama setiap harinya agar efektif.

Kondom/karet KB merupakan pilihan berikutnya. Di Kota Denpasar pada tahun 2021 terdapat 1.309 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini. Alat kontrasepsi ini sangat familiar di kalangan pasangan suami-istri. Kondom sebagai alat kontrasepsi terbuat dari bahan karet latex berbentuk silinder. Sesungguhnya kondom digunakan dan atau dipakaikan pada alat kelamin laki-laki maupun wanita tetapi pada kenyataannya paling familiar digunakan oleh laki-laki. Tak hanya itu, alat kontrasepsi ini juga efektif untuk mencegah penularan penyakit menular seksual bila digunakan dengan tepat.

KB atau kontrasepsi implan merupakan jenis kontrasepsi hormonal. Metode yang digunakan adalah melepaskan hormon progesterin ke dalam tubuh agar kehamilan tidak terjadi. Implan adalah batang plastik seukuran batang korek api yang akan dimasukkan ke lengan atas, tepat di bawah kulit. Terdapat 704 orang yang menggunakan alat KB tersebut.

MOP atau bisa disebut dengan vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen bagi pria dengan prosedur klinis untuk menghentikan kemampuan reproduksi pria dengan jalan melakukan pengikatan/ pemotongan saluran sperma (vas deferens) sehingga pengeluaran sperma terhambat dan pembuahan tidak terjadi. Terdapat 146 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini.

Pilihan terakhir alat kontrasepsi yang sedikit digunakan adalah MAL. Metode Amenore Laktasi (MAL) adalah metode kontrasepsi alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan. MAL memiliki cara kerja berupa penekanan ovulasi. Peningkatan hormon prolaktin (hormon pembentukan ASI) usai persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi (pematangan

sel telur) tidak terjadi. Terdapat 35 orang yang menggunakan alat kontrasepsi ini.

Jika dilihat berdasarkan peserta KB aktif, persentase penggunaan alat KB AKDR/IUD/Spiral paling tinggi dibandingkan alat KB lainnya baik pada tahun 2020 maupun pada tahun 2021. Pencapaian ini terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan (Puskesmas IV Denpasar Selatan) yaitu 61,8% dan 57,6%. Sedangkan penggunaan alat KB MOP paling kecil diminati, yaitu rata-rata sebanyak 0,1% di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Sedangkan dilihat dari peserta KB pasca persalinan, sebanyak 78,3% yang menggunakan jenis AKDR/IUD/spiral pada tahun 2020 (Kecamatan Denpasar Timur) dan pada tahun 2021 terdapat 85,2% yang menggunakan alat KB suntik di Kecamatan Denpasar Selatan.

5.10. Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2020 dan 2021

Kebutuhan air bersih semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Banyak limbah yang dihasilkan dari berbagai macam kegiatan sehari-hari. Peningkatan jumlah penduduk juga menjadi pemicunya. Pengolahan air bersih selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tidak sembarang air bisa dikatakan air bersih. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk sanitasi. Menurut WHO, air domestik adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan domestik seperti konsumsi, air minum dan persiapan makanan.

Manfaat air bersih antara lain adalah: 1. Memenuhi cairan dalam tubuh yaitu Kadar air yang ada di tubuh manusia adalah 50%-80% sehingga kamu sangat membutuhkan air. Kekurangan

air dapat menyebabkan konsentrasi turun dan rentan terhadap penyakit. Pasti ketika kamu sakit akan dianjurkan minum air putih yang cukup; 2. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci, MCK; 3. Irigasi pertanian; 4. Menjaga ekosistem lingkungan, ekosistem yang ada akan terjaga dengan adanya air bersih. Ciri-ciri air bersih antara lain adalah: tidak memiliki rasa, tidak memiliki bau, jernih, memiliki pH netral, tidak mengandung zat kimia berlebih, dan tidak mengandung bakteri. Sedangkan sumber air bersih adalah: 1. Air angkasa ini adalah air dari hasil penyubliman awan atau uap air contohnya salju. Air yang dihasilkan dari salju yang meleleh bisa dimanfaatkan sebagai sumber air; 2. Air hujan bisa ditampung lalu dijadikan air minum. Namun harus ditambahkan kalsium kedalamnya karena air hujan tidak memiliki kalsium; 3. Air yang berada di permukaan bumi. Air sungai, air danau, dan air laut masuk ke dalam kategori air permukaan. Namun air permukaan ini mudah terkontaminasi dan cenderung keruh. Harus memilih area yang tepat untuk menjadikannya sumber air bersih; 4. Air tanah adalah sebagian dari air hujan yang meresap ke dalam tanah melalui pori-pori dan akar tanaman. Air tanah yang berada pada dua lapisan tanah kedap air disebut air tanah dalam sedangkan air tanah dangkal adalah air tanah yang berada dekat pada permukaan tanah dan kestabilan volume airnya dipengaruhi oleh curah hujan; 5. Mata air Air tanah yang muncul secara alamiah disebut mata air. Air ini bisa langsung dijadikan air minum karena belum tercemar namun kamu harus tetap waspada. Rebuslah air dari mata air ini agar terjaga keamanannya. Kondisi pemanfaatan air bersih di kota Denpasar dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel : 5.11. Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2020 dan 2021

Jenis	2020	2021
Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih dari PDAM	443.746	465.862
Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih selain dari PDAM	1.460.225	1.524.261

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Denpasar, 2022

Dari Tabel 5.11 tentang Rumah Tangga dengan Akses Air Bersih Tahun 2020 dan 2021 memperlihatkan bahwa secara umum penggunaan air bersih yang berasal dari PDAM berkisar 30,4 %, sisanya menggunakan air bersih dari sumber selain PDAM, seperti air sumur bor. Tingginya penggunaan air bersih selain dari PDAM menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di kota Denpasar relatif sangat mudah diperoleh. Namun demikian pembuatan sumur bor yang berlebihan berdampak negative terhadap ketersediaan cadangan sumber air bersih yang pada akhirnya dapat mengakibatkan krisis air bersih. Perda tentang pembuatan sumur bor sudah ada, yang perlu ditingkatkan sosialisasi serta implementasinya di masyarakat, sehingga krisis air bersih dapat dicegah.

BAB VI

EKONOMI

Pemberdayaan perempuan dalam ekonomi merupakan sebuah proses agar perempuan memiliki daya untuk menjadi “*bread winner*” sehingga mampu menghilangkan ketergantungan ekonomi dan melepaskan dari jerat kemiskinan (Elliott, 2008). Sementara itu, pemberdayaan dalam politik bermakna proses untuk meningkatkan ketertarikan perempuan dalam dunia politik dan berperan serta dalam pengambilan keputusan (World Bank, 2011). Pemberdayaan perempuan merupakan alat agar perempuan menjadi lebih berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Sumodiningrat (2009) menyatakan bahwa tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan pendapatan perempuan yang masih berada di tingkat bawah sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas perempuan untuk dapat meningkatkan kegiatan sosial ekonomi yang produktif dan juga untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas perempuan dalam kelembagaan masyarakat, baik yang bertindak sebagai aparatur pemerintah dan juga masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, perempuan juga perlu diberikan kesempatan untuk menduduki posisi pengambilan keputusan, baik sebagai pengusaha ataupun bagian dari tim manajerial. Memberikan akses kepada perempuan untuk lebih berpartisipasi dalam area publik, termasuk dunia kerja, bermanfaat baik untuk pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri juga untuk meningkatkan persaingan. Dengan kehadiran kaum hawa, maka

dunia kerja lebih berwarna. Pasar tenaga kerja menjadi lebih kompetitif terutama untuk menghadapi globalisasi (Seguino, 2000; World Bank, 2011). Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

Penelitian Klasen & Lamanna (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan. yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar empat kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan.

Kota Denpasar yang berstatus pula sebagai Ibu Kota Provinsi Bali, sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan, dan pusat pariwisata sehingga berkembang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi di Bali. Penetapan Kota Denpasar menjadi pengembangan pembangunan ekonomi di Bali bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Implikasi penetapan ini dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Bali secara merata sehingga kesenjangan kehidupan warga masyarakat di bidang ekonomi tidak berbeda secara tajam. Dalam konteks ini, sumber daya manusia (SDM) atau human resources mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi di Kota Denpasar.

Kota Denpasar sebagai pusat pendidikan di Bali, menjadi faktor penarik bagi orang-orang yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selain itu, relatif banyak juga tamatan SMU, SMK,

dan yang sederajat untuk melanjutkan pendidikan di level diploma dan yang sederajat. Setelah mereka berhasil menamatkan pendidikannya, relatif banyak yang tidak kembali ke asalnya, namun mencari kerja di Denpasar.

Dengan demikian, pelaksanaan sensus ekonomi menjadi sangat signifikan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi angkatan kerja dengan menanyakan tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut dikaitkan dengan variabel ekonomi seperti tingkat dan laju GNP (Gross National Product/ Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor. Tujuannya adalah untuk menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor.

Di sini, tidak saja terjadi persaingan secara vertikal antara orang yang berpendidikan tinggi, berpendidikan sedang, dan berpendidikan rendah dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, di antara mereka juga mulai tampak terjadi persaingan secara horizontal, antara orang berjenis kelamin laki-laki dengan berjenis kelamin perempuan yang memiliki derajat pendidikan yang sama. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini, menunjukkan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

6.1 Kegiatan Utama Penduduk

Pada dekade ini, desa-desa di Kota Denpasar semuanya sudah mengota. Desa mengota yang dimaksud adalah

masyarakat desa yang sudah banyak ciri-ciri kotanya (Suyono, 1985: 88). Beberapa indikator yang mencirikan desa tersebut mengotakan antara lain terjadinya perkembangan masyarakat yang bersangkutan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dan semakin heterogennya warga masyarakatnya. Heterogenitas warga masyarakat dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain mata pencaharian, agama, dan etnis (suku bangsa).

Semakin heterogennya warga masyarakat Kota Denpasar disebabkan karena Kota Denpasar menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, dan pusat pariwisata sehingga relatif banyak terciptanya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini menjadi rebutan bagi pencari kerja di Kota Denpasar. Pencari kerja tersebut tidak saja direbutkan oleh pencari kerja yang berasal dari Kota Denpasar dan luar Kota Denpasar yang masih di lingkungan Pulau Bali, tetapi juga berasal dari luar Bali. Para migran yang merantau ke Kota Denpasar, ternyata bagi yang berhasil sebagian tinggal menetap di Kota Denpasar dan menjadi penduduk kota ini.

Semakin banyak para migran yang tinggal menetap di Bali, baik yang berasal dari Bali maupun luar Bali membawa implikasi terhadap pemanfaatan lahan di Kota Denpasar. Dengan demikian, penyempitan lahan di Kota Denpasar tidak terbendung lagi sehingga relatif banyak lahan sawah yang subur telah dialihkan fungsinya, yaitu dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana tempat tinggal. Sementara ini, di wilayah Kota Denpasar dijumpai pula lahan pertanian yang belum beralih fungsi yang tampak terbengkalai karena tidak ada yang menggarap.

Kaum migran yang hidup di Bali, baik yang tinggal sementara maupun tinggal menetap pada umumnya mengambil

pekerjaan di sektor informal. Sementara ini, warga lokal Kota Denpasar sangat selektif memilih pekerjaan yang dijadikan mata pencaharian hidupnya. Pada dekade ini pula generasi muda Kota Denpasar sangat jarang yang menekuni profesi menjadi petani sehingga pemilik lahan pertanian merasa kesulitan mencari penggarap atau penyakap. Dewasa ini pula tampak kecenderungan warga lokal Kota Denpasar memilih bekerja di kantoran, bank, hotel, restoran, perusahaan, dan tempat-tempat wisata. Selain itu, semakin bertambah banyak juga generasi muda warga lokal Bali yang bekerja di luar negeri dan menjadi karyawan di kapal pesiar.

Berbeda halnya dengan para migran yang mengadu nasib dan menetap di Kota Denpasar, justru tidak begitu memilih pekerjaan di sektor informal yang diabaikan oleh generasi muda warga kota ini. Misalnya, menjadi buruh, tukang batu, tukang gali tanah, pedagang kaki lima keliling, dan pekerjaan serabutan lainnya. Bahkan, pedagang kaki lima yang mangkal dan atau menyewa toko di pinggir jalan di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar semakin banyak didominasi oleh penduduk pendatang.

Dengan semakin bertambah banyaknya migran yang menetap dan bekerja atau mengais rejeki di Kota Denpasar menyebabkan penduduk Kota Denpasar menjadi heterogen, baik dari segi etnis, ras, agama, maupun pekerjaan. Dengan demikian, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan relatif tinggi, baik di sektor formal maupun informal.

Di Kota Denpasar, daya beli masyarakat menjadi relatif tinggi sehingga secara kuantitas mempengaruhi juga pemanfaatan tenaga manusia di sektor informal, antara lain semakin banyak yang menekuni profesi sebagai pedagang, karyawan toko, karyawan kios, karyawan supermarket, dan

sejenis. Selain itu, relatif banyak juga di kalangan penduduk lokal dan pendatang membuat bidang usaha sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fakta menunjukkan, penduduk lokal yang pemukimannya di pinggir-pinggir jalan tampak membuat bangunan baru dan atau merubah beberapa bangunan rumahnya yang terletak di pinggir- pinggir jalan tersebut menjadi warung, kios, atau toko. Oleh karena itu, di pinggir-pinggir jalan di empat kecamatan di lingkungan Kota Denpasar tampak relatif banyak adanya warung, kios, dan atau toko. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini menguraikan tentang pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja, produktivitas, dan pendapatan penduduk yang bekerja dalam berbagai sektor sebagai berikut.

6.2 Penduduk Usia 15-59 Tahun Menurut Jenis Kelamin

Di Indonesia, penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 59 tahun dikategorikan sebagai penduduk yang produktif. Ketika seseorang sudah berumur 15 tahun apabila ia menempuh penduduk secara normal maka ia telah menamatkan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Di Denpasar, sebagian besar di antara mereka yang telah menamatkan SMP biasanya melanjutkan ke SMU atau SMK. Bagi yang melanjutkan ke SMU, sebagian besar akan melanjutkan ke universitas, sedangkan bagi yang melanjutkan ke SMK biasanya melanjutkan ke politeknik atau ke jenjang pendidikan diploma. Jumlah Penduduk usia produktif (15-59 th) menurut jenis kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel : 6.1. Jumlah Penduduk Usia Produktif (0 – 60 Tahun+) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Kelompok Umur	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 14 Tahun	80.621	76.337	156.958	79.430	75.388	154.818
15 – 59 Tahun	250.459	248.125	498.584	251.139	248.602	499.741
60 Tahun +	35.221	34.551	69.772	36.339	35.701	72.040
Jumlah	366.301	359.013	725.314	366.908	359.691	726.599

Sumber : BPS Kota Denpasar, 2022

Tabel 6.1 diatas menggambarkan mengenai jumlah secara keseluruhan penduduk yang berusia produktif (15-59 tahun) di Kota Denpasar, yaitu sekitar 726.599 orang. Jumlah penduduk usia produktif laki-laki untuk tahun 2020 dan 2021 lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk usia produktif perempuan. Terjadi peningkatan hanya sebesar 0,27% untuk laki-laki dan 0,19% untuk perempuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kota Denpasar berpopulasi tinggi dengan jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar. Dengan adanya bonus demografi ini, diuntungkan dan memiliki peluang untuk dapat menggenjot pertumbuhan produktifitas masyarakatnya. Bonus demografi diartikan secara sederhana adalah peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu wilayah sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif.

6.3 Kegiatan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Ditinjau menurut status pekerjaan, secara umum pilihan masyarakat untuk menjadi buruh/karyawan masih memiliki persentase tertinggi, yaitu sekitar 59-68 persen selama kurun waktu tahun 2018-2020. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu dominan sebagai buruh/karyawan. Pilihan kedua yang terbanyak adalah berusaha sendiri, yang persentasenya berkisar antara 12-20 persen dalam periode tiga tahun terakhir. Diantara semua pilihan status pekerjaan tersebut, yang menarik adalah pilihan untuk menjadi pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga.

Dibandingkan penduduk laki-laki, kaum perempuan yang bekerja sebagai status ini jauh lebih banyak. Secara rata-rata jumlahnya mencapai hampir tiga kali lipat pekerja laki-laki. Kemungkinan besar, pilihan ini dipilih karena cenderung lebih fleksibel dan tidak terikat jam kerja sehingga pekerja perempuan jauh lebih banyak yang termasuk pada status ini.

Tabel: 6.2 Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar, 2018-2020

Status Pekerjaan	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020
Berusaha Sendiri	10.45	21.48	18.50	14.85	17.00	20.64	12.33	19.65	19.43
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	4.81	5.63	7.06	8.46	8.50	9.10	6.37	6.81	7.95
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Tak Dibayar	9.59	5.47	4.02	4.41	2.28	1.41	7.38	4.16	2.88
Buruh/Karyawan/Pegawai	72.31	63.30	62.08	61.46	61.30	55.21	67.67	62.48	59.07
Pekerja Bebas	0.62	2.11	3.77	1.15	1.70	1.72	0.85	1.94	2.87
Pekerja Keluarga	2.20	2.01	4.57	9.68	9.22	11.92	5.40	4.96	7.79

*Angka *backcasting* dengan penimbang proyeksi berbasis SUPAS 2015

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

Disamping pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai, status pekerjaan berusaha sendiri memiliki peluang untuk dikerjakan oleh kaum perempuan di Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan daerah perkotaan yang juga terkena dampak pandemic Covid-19. Berbagai upaya telah disosialisasikan oleh pemerintah setempat, diantaranya kegiatan urban farming.

Urban farming atau pertanian perkotaan mencakup beragam proyek dan aktivitas penghasil makanan. Kebangkitan pertanian baru-baru ini di dalam dan sekitar kota, orang telah terhubung kembali ke pertanian dengan menanam makanan sendiri dan mengunjungi pasar petani. Fenomena yang berkembang pesat ini berpotensi menyehatkan masyarakat dan menciptakan peluang ekonomi. Pertanian perkotaan populer karena beberapa alasan seperti keberlanjutan, keterjangkauan, kesehatan, dan kenyamanan. *Urban Farming* adalah bentuk pertanian perkotaan menanam makanan di daerah perkotaan di darat, biasanya di halaman belakang atau di tanah kosong, tetapi terkadang ruang terabaikan seperti median jalan, yang biasanya tidak didedikasikan untuk memproduksi makanan. *Urban farming* paling sering ditemukan di daerah perkotaan yang telah mengalami beberapa tingkat penurunan, di mana ruang tersedia dan tidak mahal.

Terkait dengan kegiatan *urban farming*, terbentuklah kelompok-kelompok wanita tani. Terdapat 14 kelompok wanita tani (KWT) yang aktif di Kota Denpasar pada tahun 2021.

Kota Denpasar Selatan memiliki jumlah KWT yang paling banyak. Salah satu contohnya KWT Sanur Asri Lestari adalah sebuah organisasi wanita yang bergerak di bidang usaha tani, dengan jumlah anggota sebanyak 34 orang yang berdomisili di Desa Sanur Kauh. KWT ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 2018. Beberapa jenis tanaman yang dibudidayakan sebagian besar jenis hortikultura seperti sayur, cabai, terong, labu, pisang dan tanaman bumbu dapur seperti sereh, kunyit, lemo. Selain mendapatkan bantuan dari pemerintah

dalam pengembangan usaha tani dalam kelompok, modal lainnya bersumber dari simpanan wajib, iuran serta simpanan lainnya (Utari, 2020).

Tabel : 6.3. Jumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kota Denpasar Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah KWT Tahun 2021
Denpasar Utara	4
Denpasar Timur	3
Denpasar Selatan	5
Denpasar Barat	2
Jumlah	14

Sumber : Dinas Pertanian Kota Denpasar, 2022

6.4 Tenaga Penyuluh Pertanian

Keberlanjutan urban farming sangat dipengaruhi juga oleh keterlibatan para penyuluh pertanian. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat

kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Penyuluh pertanian adalah orang yang bertugas dalam memberikan dorongan kepada petani agar mampu mengubah cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan, baik pengetahuan budidaya maupun teknologi. Penyuluh pertanian berperan : 1. Penyuluh sebagai inisiator, yang senantiasa selalu memberikan gagasan/ide-ide baru; 2. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan, baik dalam penyuluh/proses belajar mengajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahatani. Dalam hal penyuluh penyuluh memfasilitasi dalam hal : kemitraan usaha, berakses ke pasar, permodalan dan sebagainya; 3. Penyuluh sebagai motivator, penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu; 4. Penyuluh sebagai penghubung (penghubung dengan pemerintah, dalam hal ini penyuluh sebagai penyampai aspirasi masyarakat tani sebagai contoh dalam bentuk program penyuluhan pertanian, Penyuluh sebagai penyampai kebijakan dan peraturan-peraturan yang menyangkut kebijakan dan peraturan bidang pertanian; 5. Penghubung dengan peneliti, dalam hal ini penyuluh senantiasa membawa inovasi baru hasil-hasil penelitian untuk dapat memajukan usaha tani; 6. Penyuluh sebagai guru, pembimbing petani, yang senantiasa mengajar, melatih petani sebagai orang dewasa; 7. Penyuluh sebagai organisator dan dinamisator, yang selalu menumbuhkan dan mengembangkan kelompok tani agar mampu berfungsi sebagai kelas belajar-mengajar, wahana kerjasama dan sebagai unit produksi; 8. Penyuluh sebagai penganalisa, penyuluh dituntut untuk mampu menganalisa masalah, sebab yang ada di

usahatani dan di keluarga tani mampu menganalisa kebutuhan petani yang selanjutnya merupakan masukan dalam membuat program penyuluhan pertanian; 9. Penyuluh sebagai agen perubahan, penyuluh senantiasa harus dapat mempengaruhi sasarannya agar dapat merubah dirinya ke arah kemajuan. Dalam hal ini penyuluh berperan sebagai katalis, pembantu memecahkan masalah (*solution gives*), pembantu proses (*process helper*), dan sebagai sumber penghubung (*resources linker*).

Di Kota Denpasar, proporsi tenaga penyuluh pertanian berjenis kelamin perempuan lebih banyak (9 orang) dibandingkan jumlah penyuluh laki-laki (5 orang).

Tabel : 6.4. Jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Kecamatan	No	Nama	Jenis Kelamin
1	Denpasar Utara	1	Luh Ketut Ari Abadi, S.P	P
		2	Rully Fitri Sianti Dewi, S.Pt, MP	P
		3	I Ketut Budiawan, S.P	L
		4	Ida Bagus Made Hendra Negara, S.P	L
2	Denpasar Timur	1	Marcela Wayan Kartika Rini, S.P, M.Agb	P
		2	Ni Wayan Lilis Sukmadewi	P
		3	Ir. Luh Mas Ayustini	P
		4	Drh. Putu Gede Eka Dharmana, S.HK	L
3	Denpasar Selatan	1	I Made Jaya	L
		2	I Putu Mindra, S.P	L
		3	Ni Nyoman Ayu Trisna Kartika, S.P	P
		4	Drh. Man Hetik, S.HK	P
4	Denpasar Barat	1	Luh Ayu Sukarmi, S.P	P
		2	Drh. Kadek Nancy Marcolina, S.HK	P

Sumber : Dinas Pertanian Denpasar, 2022

Pada kondisi pandemi ini, profesi penyuluh pertanian lebih diminati oleh kaum perempuan. Berbeda pada kondisi sebelumnya, profesi penyuluh lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini membuktikan bahwa perempuan memiliki akses dan kemampuan yang sama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, terlebih-lebih kemampuan bertani dalam *urban farming* lebih sering dilakukan oleh kaum perempuan.

6.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator ketenagakerjaan yang menggambarkan persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang tergolong sebagai angkatan kerja, atau dengan kata lain penduduk yang aktif secara ekonomi. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja, namun tidak mampu diserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia.

Tabel : 6.5 TPAK dan TPT Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar (Persen), 2018-2020

Jenis Kelamin	TPAK			TPT		
	2018*	2019*	2020	2018*	2019*	2020
Laki-laki	82.94	83.02	78.91	2.57	2.44	8.64
Perempuan	63.68	59.88	62.55	0.91	2.08	6.28
Laki-laki + Perempuan	73.52	71.70	70.91	1.87	2.29	7.62

*Angka *backcasting* dengan penimbang proyeksi berbasis SUPAS 2015

Sumber: Sakernas, BPS Kota Denpasar

TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2018 TPAK Denpasar sebesar 73,52%, yang memiliki arti bahwa sebanyak 73,52% dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) aktif secara ekonomi atau tersedia untuk kegiatan produksi. Sementara sisanya bukan merupakan angkatan kerja, yang dalam hal ini bisa jadi masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya. Memasuki tahun 2020, TPAK Denpasar menurun menjadi sebesar 70,91%, kemudian pada tahun 2021 TPAK menurun kembali menjadi sebesar 68,67%.

Berdasarkan jenis kelamin, selama periode tahun 2018 hingga tahun 2020, TPAK laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki selama periode tersebut berada pada kisaran 78-83 persen, sedangkan TPAK penduduk perempuan berada jauh dibawahnya, yaitu berkisar 59-64 persen. Lebih rendahnya TPAK perempuan ini dinilai wajar, mengingat secara umum perempuan bukanlah tumpuan ekonomi keluarga, apalagi setelah menikah kebanyakan perempuan akan mengurus rumah tangga. Selain itu, jika dilihat tren selama tiga tahun terakhir, TPAK perempuan cenderung mengalami penurunan meskipun masih relatif rendah.

Dari TPAK kita dapat mengetahui gambaran penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun untuk melihat seberapa banyak angkatan kerja yang tidak mampu diserap oleh lapangan usaha yang tersedia, dapat dilihat melalui indikator TPT. Angka TPT Denpasar selama kurun waktu tahun 2018-2020 cenderung meningkat. TPT Denpasar pada tahun 2018 sebesar 1,87%, kemudian naik signifikan menjadi 7,62% pada tahun 2020. Selanjutnya sedikit menurun menjadi sebesar 7,02% pada tahun 2021. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT

penduduk laki-laki memiliki persentase yang cenderung lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk perempuan. TPT laki-laki selama kurun waktu lima tahun terakhir berada pada kisaran 2 sampai 9 persen, sedangkan TPT penduduk perempuan berkisar 1 hingga 6 persen.

Dilihat dari 291 perusahaan berdasarkan wajib lapor tahun 2021 di Kota Denpasar, didapatkan jumlah tenaga kerja laki-laki adalah 6.511 orang dan tenaga kerja perempuan adalah 1.604 orang (Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2022).

6.6 Tenaga Kerja Asing Pendetang

Persaingan mencari kesempatan kerja di Kota Denpasar bukan saja terjadi (1) antara sesama warga Kota Denpasar yang menjadi penduduk asli Bali dan (2) antara warga kota Denpasar dengan pendatang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, namun terjadi juga antara penduduk Kota Denpasar dengan tenaga kerja asing. Keadaan ini dapat dipahami karena Bali sebagai daerah tujuan wisata (DTW) yang sudah terkenal di dunia sehingga Pulau Bali banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Wisatawan yang berkunjung dan menginap di Bali, maka memerlukan sarana dan prasarana serta jasa yang berlevel internasional. Dengan demikian, jasa tenaga kerja asing sementara ini masih diperlukan pada bidang-bidang tertentu untuk memberikan pelayanan yang berlevel nasional kepada wisatawan, antara lain di hotel dan restoran. Selain itu, pernah juga berembus wacana yang menyebut-nyebut bahwa tenaga kerja asing pendatang juga dipekerjakan dibidang proyek pembangunan. Tabel 6.6

berikut ini mencantumkan jumlah tenaga kerja asing pendatang yang bekerja di Kota Denpasar.

Tabel : 6.6. Tenaga Kerja Asing Pendatang Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Jenis Kelamin	Tahun 2020 (orang)	Tahun 2021 (orang)
Laki-laki	195	142
Perempuan	163	106
Laki-laki + Perempuan	358	248

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, 2022

Pada Tabel 6.6 menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja asing pendatang mengalami penurunan sebesar 30,73% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Jumlah tenaga asing perempuan lebih sedikit dibandingkan tenaga asing laki-laki. Menurunnya jumlah tenaga asing di Kota Denpasar sebagai salah satu dampak dari pandemic Covid-19.

6.7 Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Hidup sehat sudah menjadi nilai budaya bagi setiap manusia. Berkaitan dengan nilai budaya hidup sehat ini, Pemerintah Kota Denpasar menciptakan sebuah slogan yang di dalamnya menyelipkan kata sehat. Adapun slogan yang dimaksud: “Kota Denpasar BERSERI (Bersih, Sehat, Rindang, dan Indah) yang Berwawasan Budaya”. Makna slogan Kota

Denpasar ini sesuai pula dengan makna pada sebuah pepatah yang menyebutkan “hidup bersih pangkal kesehatan”. Pepatah “hidup bersih pangkal kesehatan” ini acapkali dipublikasikan kepada masyarakat, mulai dari pemasangan tulisan yang dipasang di sekolah-sekolah di Denpasar. Selain itu, budaya hidup sehat tersebut juga disosialisasikan oleh instansi-instansi terkait secara langsung kepada masyarakat. Dengan melakukan sosialisasi budaya hidup sehat itu yang dituangkan dalam slogan Kota Denpasar diharapkan pemandangan Kota Denpasar menjadi bersih, sehat, rindang, dan indah sehingga warga masyarakat akan merasa nyaman dan sehat. Demikian pula, pengunjung dan wisatawan yang berkunjung atau tour ke Denpasar meninggalkan kesan dan kenangan yang indah selama berada di Pulau Bali, yang telah populer mendapat berbagai julukan, antara lain Pulau Seribu Pura, Pulau Dewata, Pulau Sorga.

Sebagai ujung tombak untuk mewujudkan Kota Denpasar “BERSERI” yang berwawasan budaya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjadi ujung tombaknya, yang berwenang mengatur petugas kebersihan untuk menunaikan tugasnya setiap hari, yaitu menyapu, mengumpulkan, dan mengangkut sampah organik dan anorganik dari tempat pembuangan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Daerah Pesanggaran Denpasar Selatan. Sampah organik dan anorganik yang terdapat di Kota Denpasar, terutama berasal dari sampah rumah tangga dan pedagang. Bahkan, pada hari-hari raya besar yang dirayakan oleh umat Hindu, tampak terjadi penumpukan sampah yang berasal dari sesaji. Sampah dipilah di TPS 3R yang mana sampah organik dijadikan kompos. Sampah anorganik dijual ke bank sampah dan sampah residu dibuang ke TPA. Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Kota Denpasar sudah memiliki petugas kebersihan yang sehari-harinya secara khusus menangani sampah dalam upaya menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Denpasar.

Untuk menjaga merawat tanaman, menata taman dan memelihara ruang terbuka hijau publik memerlukan perawatan secara intensif yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Pada Tabel 6.7 terlihat bahwa jumlah tenaga kebersihan dan pertamanan di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki sejumlah 126 orang. Pada kegiatan perawatan dan penyiraman lebih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender dalam pekerjaan ini karena lebih banyak memerlukan kekuatan fisik.

Tabel : 6.7. Jumlah Tenaga Kebersihan dan Pertamanan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sektor Taman Kota	13	4	17
2	Sektor Lapangan Lumintang	6	4	10
3	Sektor Puputan Badung	1	10	11
4	Sektor Taman Janggan	4	3	7
5	Sektor Penyiraman	29	0	29
6	Sektor Pembibitan	7	0	7
7	Sektor Perawatan	66	3	69
Jumlah		126	24	150

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, 2022

6.8 Juru Parkir

Juru parkir, tukang parkir yang disebut juga dengan lakuran jukir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir. Jukir juga bekerja

untuk mengumpulkan retribusi parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir. Tarif parkir pada tempat parkir yang demikian biasanya bertarif tetap, tidak tergantung waktu karena karcis tidak dilengkapi dengan waktu kedatangan dan waktu kendaraan meninggalkan ruang parkir.

Dari empat kecamatan yang ada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat memiliki juru parkir yang paling banyak yaitu 257 orang, terdiri dari 251 orang juru parkir laki-laki dan 6 orang juru parkir perempuan. Secara keseluruhan jumlah juru parkir di Kota Denpasar masih didominasi oleh laki-laki. Jenis pekerjaan ini lebih banyak menggunakan fisik dan ketrampilan memarkirkan kendaraan. Juru parkir perempuan sangat jarang ditemui. Rata-rata mereka bekerja sebagai juru parkir karena sebagai tulang punggung keluarga atau menggantikan suami yang sedang sakit.

Tabel : 6.8. Jumlah Juru Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pelantaran menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Kecamatan	Tahun 2021		
	L	P	Jumlah
Denpasar Utara	155	1	156
Denpasar Timur	166	4	170
Denpasar Selatan	216	1	217
Denpasar Barat	251	6	257
Jumlah	788	12	900

Sumber : Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, 2022

6.9 Tenaga Kerja di Sektor Pariwisata

Pariwisata merupakan jenis usaha jasa yang sangat tergantung dengan musim liburan, yaitu musim sepi-ramai-puncak (*low-high-peak season*). Kondisi ini menuntut pengelola dan pemilik usaha pariwisata melakukan strategi dan taktik dalam rangka menghemat pengeluaran gaji untuk karyawan di saat musim sepi. Salah satu komponen penting tenaga kerja yang memberikan ciri khusus industri pariwisata adalah tenaga kerja paruh waktu.

Sejak awal konsentrasi perekonomian di Bali memang bertumpu pada pariwisata, sehingga perkembangan pariwisata di Bali, sesungguhnya sudah mulai dibangun sejak 1930 silam, sehingga satu hal yang sangat mendasar adalah ketertarikan pada budaya Bali, dimana Bali yang belum mengenal media promosi saat itu hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, sehingga perkembangan pariwisata pada tahun 1970 an menjadi tonggak lonjakan pariwisata paling tinggi yang merupakan sebuah peradaban dan pengalaman yang kemudian dikembangkan untuk menuju Bali yang berkualitas, pariwisata sebagai sebuah pengalaman sehingga perlu dilakukan pengembangann budaya yang tidak ditemukan di daerah lain, dengan budaya ramah dan gotong royong sebagai pengalaman wisatawan untuk datang pada satu wilayah, yang dilihat pada perbedaan untuk mengembangkan dan memperkenalkan pariwisata sebagai potensi wisata dunia adalah karena keindahan alam yang dimiliki banyak wilayah, sedangkan untuk mengangkat strategi wisata adalah menjaga potensi yang dimiliki dengan tujuan agar tidak mengalami degradasi, dan usahakan jangan sampai hilang, sehingga diperlukan keterlibatan dan dapat memberikan manfaat maksimal kepada warga Bali

sebagai pelaku dan pendukung budaya bali yang memberikan daya tarik pariwisata.

Distribusi tenaga kerja di Bali mengalami perubahan yang terlihat dari penurunan pekerja sektor akomodasi makan minum dan peningkatan jumlah pekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah tenaga kerja di sektor akomodasi makan minum di Bali per 2019 adalah sebanyak 328.000 pekerja. Pada 2020, jumlahnya menurun 28,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya (year on year/YoY) menjadi 236.000 pekerja. Kondisi sebaliknya terjadi di sektor pertanian, dengan peningkatan 17,9 persen YoY pada 2020 menjadi 546.000 pekerja (<https://bali.bisnis.com/read/20210304/538/1363760/tenaga-kerja-di-sektor-pariwisata-bali-turun-ini-penyebabnya>).

Hal senada juga terjadi di Kota Denpasar. Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor pariwisata tidak menunjukkan perbedaan yang jauh antara tenaga kerja laki-laki dengan tenaga kerja perempuan.

Tabel : 6.9. Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap di Sektor Pariwisata menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Jenis Usaha	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usaha Rekreasi dan Usaha Pariwisata	182	176	358

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2022

Data yang dimiliki Dinas Pariwisata Denpasar tercatat jumlah akomodasi usaha perhotelan, pondok wisata dan vila sebanyak 551 usaha pada tahun 2020. Namun, akibat pandemic, dari jumlah tersebut sebanyak 16 usaha jenis hotel non berbintang, pondok wisata dan vila dinyatakan tutup permanen. Sedangkan 141 usaha yang tergolong hotel berbintang non berbintang, pondok wisata dan vila dinyatakan tutup sementara.

(<https://www.balipost.com/news/2021/08/31/212955/Belasan-Akomodasi-Wisata-di-Denpasar...html>).

Jumlah penanggung jawab usaha akomodasi di Kota Denpasar pada tahun 2021 berjumlah 464 orang. Dari jumlah tersebut, penanggung jawab usaha akomodasi lebih banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 330 orang. Terjadi ketimpangan gender. Kondisi ini diakibatkan oleh jiwa bisnis laki-laki terhadap *high risk* pada masa pandemic lebih kuat dibandingkan perempuan.

Tabel : 6.10 . Jumlah Penanggung Jawab Usaha Akomodasi di Kota Denpasar menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Jenis Usaha	Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usaha Akomodasi	330	134	464

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2022

Tenaga kerja yang terserap di hotel dan restaurant juga mengalami perubahan yang drastis. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap di hotel dan restaurant berjumlah 11.201 orang. Sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi

3.622 orang. Terjadi penurunan sebesar 67,66% selama tiga tahun terakhir. Kondisi ini juga merupakan dampak dari pandemic Covid-19.

Tabel : 6.11. Tenaga Kerja yang Diserap pada Bidang Usaha Hotel dan Restaurant menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Jenis Usaha	Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sektor Pariwisata (Hotel dan Restaurant)	2.714	908	3.622

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Denpasar, 2022

Pandemi Covid-19 ini mengajarkan agar semua pihak khususnya pelaku wisata mulai melakukan pembenahan terutama dalam menjangkau kluster wisatawan yang bertujuan mendapatkan atau meningkatkan kualitas pariwisata, dimana pariwisata ke depan tidak hanya memberikan pertumbuhan ekonomi spesifik terhadap para pelaku dan pengusaha saja, melainkan pariwisata yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kualitas hidup bagi masyarakat Bali secara menyeluruh.

Indonesia sampai saat ini belum membuka destinasi pariwisata akibat semakin banyaknya kasus positif Covid-19 setiap harinya, Bali yang memiliki sekitar 354 destinasi terus mencoba melakukan pembenahan termasuk wajib menyiapkan sarana protokol kesehatan bagi pemilik usaha. Pandemi Covid-19 meluluhlantakan perekonomian Bali selama hampir enam (6) bulan belakangan, sehingga pertumbuhan ekonomi Bali berada

paling bawah di Indonesia mencapai 10,98 minus kontraksi terdalam di Indonesia pada triwulan pertama adalah 1,14% (<https://www.baliprov.go.id/web/pandemi-ajarkan-pelaku-wisata-lakukan-pembenahan-dan-tingkatkan-kualitas/>).

Dalam penanganan Covid-19 Pemerintah Daerah secara serius melakukan sejumlah upaya untuk kembali dapat memulihkan perekonomian Bali, segala sesuatu diharapkan dapat di bantu dan didukung oleh masyarakat luasnya. Karena membina akomodasi disaat pandemi padat karya dan padat modal itu sangat dibutuhkan, sehingga persoalan yang kita hadapi adalah tentang sumber daya manusia (SDM) dan modal yang tertanam. Untuk menggerakkan dunia pariwisata di tengah krisis akibat pandemi Covid-19 terdapat tiga (3) hal yang mutlak di miliki yakni:

- a). Modal (modal sendiri atau modal yang bersumber dari pinjaman) yang digunakan sebagai obyek untuk memutar roda penjualan dan perekonomian.
- b). Bisnis plan (mimpi atau harapan) dalam membangun relasi sehingga dapat bertahan di masa pandemi.
- c). *Cash flow* adalah ketersediaan tetesan keuntungan dari modal dan usaha yang sedang dijalani.

6.10 Pemilik Usaha Salon Kecantikan

Warga masyarakat Kota Denpasar, khususnya yang tingkat pendapatannya semakin mapan cenderung semakin banyak yang tumbuh kesadarannya untuk merawat dan mempercantik dirinya. Merawat dan mempercantik diri menjadi bagian dari suatu usaha untuk merawat kesehatan tubuhnya. Dengan demikian, merawat tubuh dengan menggunakan jasa

salon kecantikan sudah sepantasnya mendapat perhatian, baik bagi yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Semakin bertambah banyak orang yang timbul kesadaran dirinya untuk mencari tempat perawatan tubuh maka implikasinya semakin bertambah banyak pula orang melihat momentum ini sebagai peluang untuk membuka salon kecantikan. Tabel 6.10 di bawah ini mencantumkan data mengenai jumlah usaha salon kecantikan yang tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar.

Tabel : 6.12. Usaha Salon Kecantikan menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	(Orang)	(Orang)	(Orang)
Denpasar Utara	2	22	24
Denpasar Timur	5	27	32
Denpasar Selatan	9	53	62
Denpasar Barat	5	29	34
Jumlah	31	131	153

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, 2022

Data yang tertera dalam tabel 6.12 di atas yang diakses dari Dinas Koperasi dan UMKM tahun 2022 menunjukkan bahwa kepemilikan usaha salon kecantikan di Kota Denpasar meningkat pada saat pandemic Covid-19. Dibandingkan tahun 2018 terjadi peningkatan pemilik salon sebesar 81%. Data menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pemilik usaha salon tersebut sebanyak 153 orang pada tahun 2021. Pemilik usaha

salon tersebut didominasi oleh kaum perempuan, yaitu sebanyak 131 orang, sedangkan di pihak laki-laki hanya sebanyak 31 orang. Ini berarti terjadi ketimpangan gender dalam hal kepemilikan usaha salon kecantikan di Kota Denpasar, dan perbedaan jumlahnya sangat mencolok. Meningkatnya jumlah pemilik salon oleh kaum perempuan disebabkan oleh kondisi pandemic yang kemudian memotivasi para kaum perempuan untuk membantu perekonomian keluarga. Usaha salon ini masih memberikan peluang bagi perempuan dalam menjalankan bisnisnya.

BAB VII

SEKTOR PUBLIK

Keterlibatan perempuan berperan pada sektor produktif sepertinya bukan hal baru untuk diperbincangkan. Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran yang sering pula disebut dengan peran di sektor publik. Sektor publik lebih identik dengan karakter maskulin yang tegas, berani, cekatan dan cepat dalam mengambil keputusan, sehingga dikatakan bahwa sektor publik merupakan domain laki-laki. Kekuasaan publik identik dengan persaingan dan konflik dalam penyelesaian masalah, sedangkan karakteristik unggul dari feminitas berupa kesabaran, kejujuran dan kesetiaan dianggap tidak perlu dan tidak memiliki karakteristik unggul. Meskipun jumlah komposisi perempuan yang bekerja di sektor publik masih rendah dibandingkan jumlah laki-laki yang bekerja di sektor publik, tetapi jumlah perempuan yang bekerja di sektor publik dari tahun ketahun terus meningkat. Hal ini disebabkan selain kebutuhan ekonomi yang perempuan dan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan. Faktor ini yang membuat peningkatan pada perempuan untuk bekerja semakin meningkat, juga karena adanya permintaan penerimaan tenaga kerja.

Dalam konteks mewujudkan Buku Statistik Gender Kota Denpasar 2019, sektor publik dijadikan satu bab tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Denpasar berkiprah di sektor publik. Sektor publik yang dibahas pada bab

ini secara garis besar terklasifikasi ke dalam eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

7.1 Eksekutif

7.1.1 ASN menurut Golongan Kepangkatan

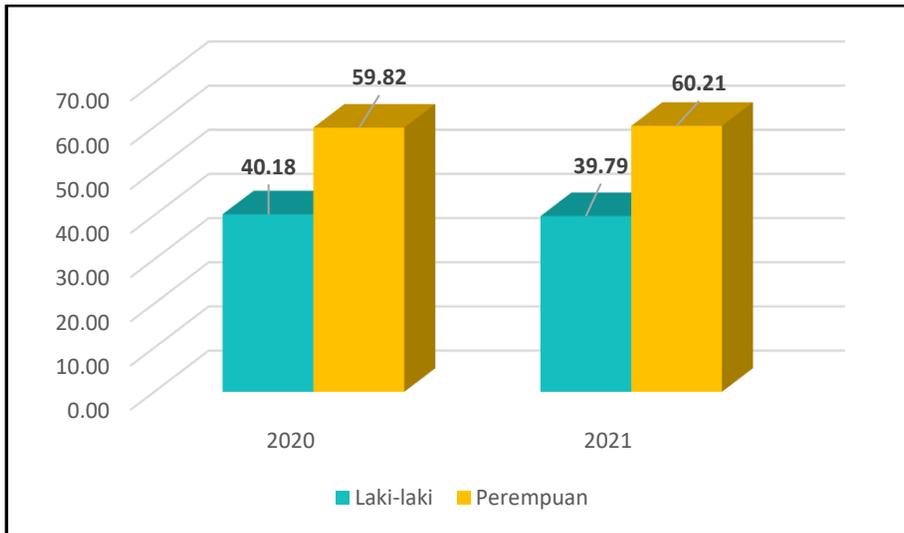
Eksekutif adalah salah satu lembaga negara yang melaksanakan undang-undang yang diamanatkan oleh Montesquieu selain lembaga legislatif dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang familiar disebut dengan pemerintah merupakan lembaga negara yang paling pokok dan paling mendapat perhatian publik dalam berjalannya pemerintahan di Negara Indonesia. Kinerja eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat dan diukur yaitu dari keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain yang semuanya itu dimaksudkan untuk kesejahteraan hidup masyarakat. Guna mengetahui peran serta laki-laki dan perempuan di Kota Denpasar dalam lembaga eksekutif dapat dilihat pada paparan berikut.

Tabel : 7.1. Komposisi ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Gol	ASN					
	Tahun 2020			Tahun 2021		
	L	P	L+P (Orang)	L	P	L+P (Orang)
I	70	47	117	56	43	99
II	620	356	976	558	330	888
III	1.028	1.876	2.904	1.005	1.816	2.821
IV	531	1.069	1.600	454	948	1.402
Jumlah	2.249	3.348	5.597	2.073	3.137	5.210

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Pada Tabel 7.1 di atas menyajikan data terpilah mengenai komposisi ASN menurut golongan kepangkatan tahun 2020 dan 2021. Terlihat bahwa jumlah ASN di Kota Denpasar secara keseluruhan selama dua tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 6,47% baik dari jumlah laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menunjukkan belum adanya penerimaan ASN selama masa pandemi dan diikuti dengan pegawai yang pensiun. Pada golongan II-IV telah terjadi ketimpangan gender yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Ketimpangan yang tajam terjadi pada golongan III, dimana jumlah ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki. Pada tahun 2020 jumlah ASN laki-laki sebanyak 1.028 orang (40,18%), perempuan sebanyak 1.876 orang (59,82%), sedangkan pada tahun 2021 jumlah ASN laki-laki sebanyak 1.005 orang (39,79%) dan jumlah ASN perempuan sebanyak 1.816 orang (60,21%).



Gambar 7.1 Persentase ASN Menurut Golongan Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

7.1.2 Pegawai Non ASN

Tabel 7.2 di bawah menggambarkan roda pemerintahan di Kota Denpasar tidak hanya dijalankan oleh pegawai negeri sipil tetapi juga oleh Pegawai-Non ASN. Jumlah pegawai Non-ASN laki-laki pada tahun 2020 sebanyak 4.230 orang lebih banyak dibandingkan perempuan sebanyak 3.603 orang. Begitupula pada tahun 2021 baik pegawai Non-ASN laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, namun laki-laki masih lebih banyak dibandingkan perempuan. Kondisi ini disebabkan pekerjaan yang ditawarkan lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki. Keadaan ini perlu menjadi pemikiran bagi pihak-pihak terkait untuk memberikan kesempatan bagi kaum perempuan agar tidak terjadi ketimpangan gender.

Tabel : 7.2. Jumlah Pegawai Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Pegawai Non ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	4.230	3.603	7.833
2021	4.245	3.955	8.200

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

7.1.3 Pegawai yang Mengikuti Diklat

Sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Dibandingkan dengan faktor-faktor lain, sumberdaya manusia merupakan aset yang paling berharga dan menentukan dalam

organisasi. Peranan sumberdaya manusia adalah sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sumberdaya manusia merupakan human capital dan intellectual capital yang akan menentukan efektivitas dari faktor-faktor lain dalam organisasi seperti modal, peralatan, teknologi organisasi, dan struktur.

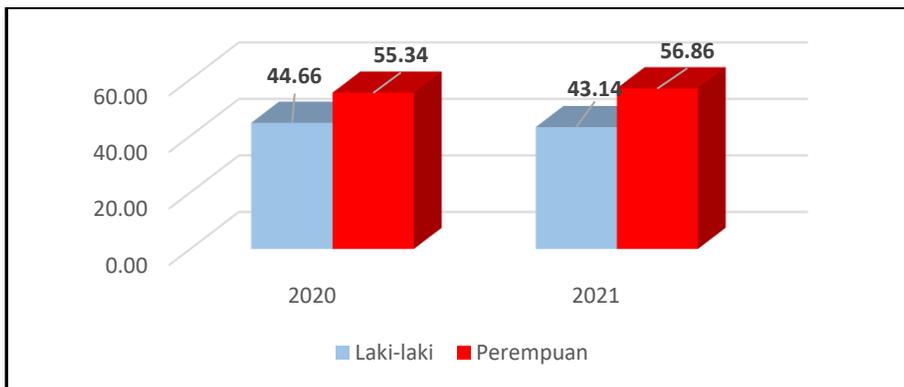
Sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan sumber ASN yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pendidikan dan pelatihan merupakan instrumen utama untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia yang mencakup peningkatan pengetahuan, peningkatan keahlian dan keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku serta koreksi terhadap kelemahan kinerja. Pada birokrasi pemerintah, pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengembangan atau peningkatan kualitas SDM ASN telah dilembagakan secara formal dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan ASN, yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini Diklat ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.

Tabel : 7.3. Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

Tahun	ASN		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	748	927	1.675
2021	692	912	1.604

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Berdasarkan Tabel 7.3 terlihat bahwa meskipun ada penurunan jumlah ASN yang mengikuti Diklat karena keterbatasan anggaran pada masa pandemi, ASN perempuan yang mengikuti Diklat lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki dari tahun 2020-2021. Tercatat pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti Diklat adalah 748 orang laki-laki (44,66%) dan 927 orang perempuan (55,34%). Sedangkan pada tahun 2021 terdiri atas 692 laki-laki (43,14%) dan 912 orang perempuan (56,86%). Terjadi ketimpangan gender meskipun tidak terlalu signifikan.



Gambar 7.2 Persentase ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang Pernah Mengikuti Diklat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

Terkait dengan kepemimpinan, terdapat Diklat Kepemimpinan / Pelatihan Kepemimpinan Nasional (Diklat PIM). Diklat PIM merupakan proses penyelenggaraan belajar-mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklat PIM terdiri atas Diklat PIM Tingkat I, Tingkat II, Tingkat III, dan Tingkat IV.

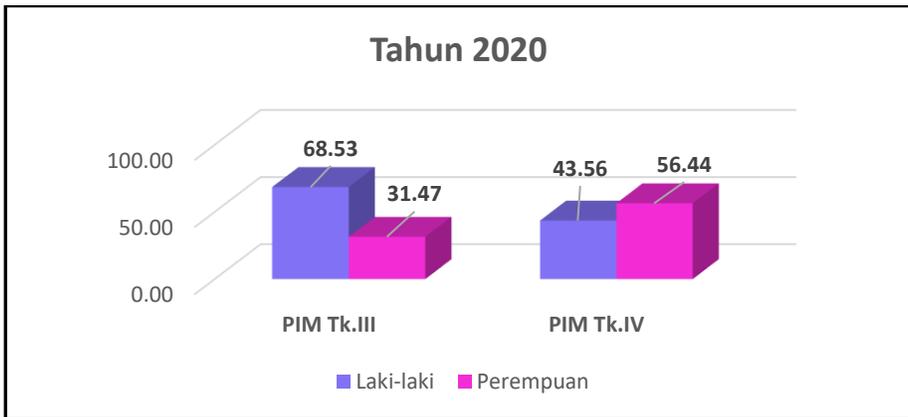
Tujuan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat I adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon I yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Tujuan Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat II adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Tujuan Penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat III adalah mengembangkan kompetensi kepemimpinan taktikal pada pejabat struktural eselon III yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Sedangkan tujuan penyelenggaraan Diklat PIM Tingkat IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing (<http://puskan.lan.go.id/statis-8-programdiklatpim.html>).

Tabel : 7.4. Jumlah Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Nama Diklat Pejabat	Tahun					
		2020			2021		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PIM. TK. I	1	0	1	0	0	0
2	PIM. TK. II	15	6	21	12	6	18
3	PIM. TK. III	98	45	143	90	43	133
4	PIM. TK. IV	176	228	404	160	209	369
Jumlah		290	279	569	262	258	520

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

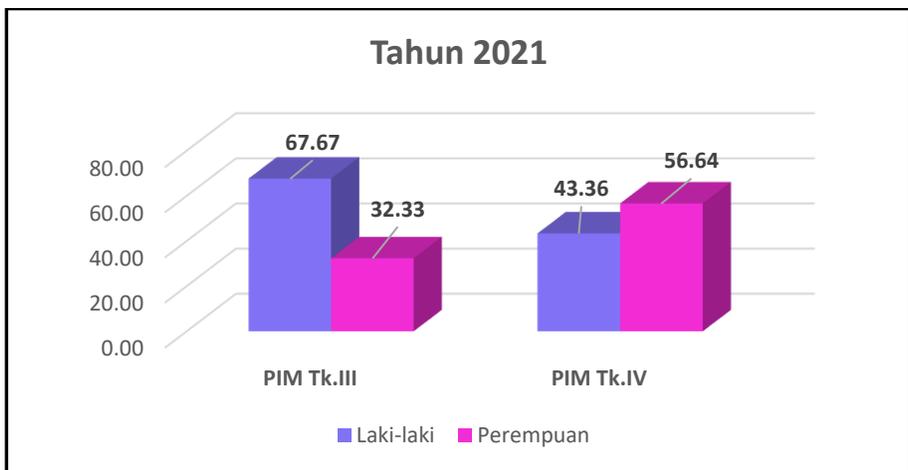
Pada Tabel 7.4 terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah pejabat laki-laki yang mengikuti Diklat PIM lebih banyak dibandingkan pejabat perempuan untuk tahun 2020 dan 2021. Terjadi ketimpangan gender yang signifikan pada Diklat PIM Tingkat III dan Tingkat IV.



Gambar 7.3 Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020

Pada tahun 2020 terdapat 98 orang laki-laki (68,53%) dan 45 orang perempuan (31,47%) pejabat yang mengikuti Diklat PIM Tk. III. Sedangkan pada Diklat PIM Tk. IV diikuti oleh 176 orang laki-laki (43,56%) dan 228 orang perempuan (56,44%).

Pada tahun 2021 terdapat 90 orang laki-laki (67,67%) dan 43 orang perempuan (32,33%) pejabat yang mengikuti Diklat PIM Tk.III. Sedangkan pada Diklat PIM Tk.IV diikuti oleh 160 orang laki-laki (43,36%) dan 209 orang perempuan (56,64%).



Gambar 7.4 Persentase Pejabat Yang Sudah Mengikuti Diklat Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

7.1.4 ASN berdasarkan Unit Kerja

Pada Tabel 7.5 menunjukkan jumlah ASN secara terpisah menurut jenis kelamin di Kota Denpasar yang berugas di sejumlah unit kerja di Kota Denpasr.Unit-unit kerja tersebut meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Taman Kanak-Kanak TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).SKPD merupakan perangkat pemerintahan

daerah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia. SKPD sebagai pelaksana fungsi eksekutif saling berkoordinasi agar pemerintahan dapat berjalan dengan lancar. Taman Kanak-kanak (TK) merupakan jenjang pendidikan dalam bentuk formal bagi anak-anak usia dini. Kurikulumnya lebih menekankan pada rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sebagai upaya untuk menyiapkan mereka menyongsong pendidikan lebih lanjut. Sekolah Dasar sebagai jenjang paling dasar pada jenjang pendidikan formal di Indonesia yang ditempuh dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yaitu mulai kelas 1 (satu) sampai kelas 6 (enam). Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagai jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di Indonesia setelah dinyatakan lulus sekolah dasar atau sederajat. SMP ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun yaitu kelas 1 (satu) sampai kelas 3 (tiga).

Tabel : 7.5. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin dan Unit Kerja di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Unit Kerja	2020			2021		
		L	P	Jmlh	L	P	Jmlh
1	SKPD Kota Denpasar	1.616	1.784	3.400	1.518	1.729	3.247
2	Taman Kanak-kanak	0	65	65	0	53	53
3	Sekolah Dasar	439	1.143	1.582	395	1.057	1.452
4	Sekolah Menengah Pertama	194	356	550	167	316	483
Jumlah		2.249	3.348	5.597	2.080	3.155	5.235

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Secara keseluruhan terjadi ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan walaupun tidak signifikan. Pada unit

kerja SKPD Kota Denpasar terjadi keseimbangan gender dimana terdapat 1.616 orang laki-laki dan 1.784 orang perempuan pada tahun 2020; 1.518 orang laki-laki dan 1.729 orang perempuan pada tahun 2021. Pada unit kerja Taman Kanak-kanak terjadi ketimpangan gender yang signifikan, dimana tidak ada ASN laki-laki. Taman Kanak-kanak lebih diminati oleh kaum perempuan dan naluri keibuan sangat dibutuhkan di unit kerja tersebut. Kondisi ini juga terjadi pada unit kerja Sekolah Dasar, jumlah laki-laki berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 adalah 439 dan 395 orang, sedangkan perempuan sebanyak 1.143 dan 1.057 orang. Pada unit kerja Sekolah Menengah Pertama, terjadi ketimpangan gender tapi tidak terlalu signifikan, dimana berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021 berjumlah 194 dan 167 orang laki-laki; 356 dan 316 orang perempuan.

7.1.5 ASN Menurut Eselon

Pada Tabel 7.6 menunjukkan secara keseluruhan jumlah ASN di Kota Denpasar Tahun 2020 sebanyak 5.597 orang dengan rincian laki-laki sebanyak 2.249 orang dan perempuan sebanyak 3.348 orang. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 2.080 orang laki-laki dan 3.155 orang perempuan. Terjadi peningkatan dari 51,9% menjadi 54,15%. Ketimpangan gender terlihat disini meskipun tidak terlalu signifikan. Jumlah ASN terbanyak terdapat pada Gol III yaitu Jika dirinci berdasarkan golongan kepangkatannya, jumlah ASN perempuan untuk golongan III dan IV lebih banyak daripada ASN laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan sudah dapat menunjukkan kemampuannya untuk mengakses, mengisi, dan mengemban tugas sebagai ASN.

Tabel : 7.6. Komposisi ASN Menurut Golongan Kepegawaian dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Gol	ASN							
	Tahun 2020				Tahun 2021			
	L	P	L+P (Orang)	(%)	L	P	L+P (Orang)	(%)
I	70	47	117	2.1	56	43	99	1.90
II	620	356	976	17,4	558	330	888	17.04
III	1.028	1.876	2.904	51.9	1.005	1.816	2.821	54.15
IV	531	1.069	1.600	28,6	454	948	1.402	26.91
Jumlah	2.249	3.348	5.597	100	2.073	3.137	5.210	100

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Jika berdasarkan eselon, untuk eselon II – IV lebih didominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Terjadi ketimpangan gender dalam posisi eselon tersebut. Eselon IIa pada tahun 2021 diduduki oleh 1 orang laki-laki. Pada eselon IVa, jumlah pejabat perempuan di tahun 2020 lebih banyak dibandingkan laki-laki. Untuk non eselon juga terjadi ketimpangan gender, dimana jumlah perempuan lebih banyak, yaitu 3.014 orang di tahun 2020 dan 3.022 orang di tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kaum perempuan memiliki peluang lebih sedikit untuk menduduki posisi eselon II-III dikarenakan prinsip-prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan belum semua terpenuhi.

Tabel : 7.7. Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Eselon	Tahun					
		2020			2021		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	II.a				1		1
2	II.b	26	4	30	22	5	27
3	III.a	31	7	38	24	4	28
4	III.b	63	45	108	56	40	96
5	IV.a	208	239	447	65	50	115
6	IV.b	44	39	83	40	34	74
7	Non Eselon	1.877	3.014	4.891	1.872	3.022	4.894
Jumlah		2.249	3.348	5.597	2.080	3.155	5.235

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar, 2022

Berdasarkan persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Denpasar tahun 2021, paling banyak yang berpangkat Pembina Tk. I yaitu sebesar 19,47% pada tahun 2020 dan 18,10% pada tahun 2021. Sedangkan persentase terkecil berada pada posisi pangkat Pembina Utama Madya yaitu 0,15% pada tahun 2020 dan 0,16% pada tahun 2021.

Tabel : 7.8. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

No	Pangkat	Tahun			
		2020		2021	
		Perempuan	(%)	Perempuan	(%)
1	Juru Muda Tk.I	15	0,45%	14	0,44%
2	Juru Tk.I	20	0,60%	28	0,89%
3	Juru	12	0,36%	1	0,03%
4	Pembina	338	10,10%	287	9,10%
5	Pembina Tk.I	652	19,47%	571	18,10%
6	Pembina Utama Madya	5	0,15%	5	0,16%
7	Pembina Utama Muda	74	2,21%	85	2,69%
8	Penata	366	10,93%	382	12,11%
9	Penata Muda	547	16,34%	500	15,85%

10	Penata Muda Tk.I	474	14,16%	450	14,26%
11	Penata Tk.I	489	14,61%	502	15,91%
12	Pengatur	158	4,72%	114	3,61%
13	Pengatur Muda	20	0,60%	6	0,19%
14	Pengatur Muda Tk.I	71	2,12%	67	2,12%
15	Pengatur Tk.I	107	3,20%	143	4,53%
Jumlah		3.348	100,00%	3.155	100,00%

Sumber : BKPSDM Kota Denpasar

7.2 Legislatif

Legislatif merupakan lembaga yang bertugas memproduksi dan mengawasi pelaksanaan undang-undang dan juga mengatur keuangan negara. Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam yudikatif adalah MPR, DPR (DPRD Tk I dan DPRD Tk. II) dan DPD. Pemilihan anggota legislatif ini melalui proses politik yang sangat panjang dan melelahkan sama seperti proses pemilihan pejabat pemerintah lainnya mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan wakilnya. Proses inilah yang harus melibatkan lembaga-lembaga tertentu seperti Partai Politik, Panwaslu, Bawaslu, PPK dan sebagainya.

7.2.1 Keanggotaan DPRD

Tabel 7.9 di bawah menyajikan data terpilah mengenai jumlah keanggotaan DPRD Kota Denpasar menurut partai politik Tahun 2019- 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Tercatat ada 7 (tujuh) partai politik yang berhasil mengantarkan kadernya menduduki kursi DPRD Kota Denpasar.

Ketujuh partai politik dengan perolehan kursinya masing-masing adalah PDIP (22 kursi), Golkar (8 kursi), Demokrat (4 kursi), PSI (2 kursi), Hanura (2 kursi), Nasdem (3 kursi), dan Gerinda (4 kursi). Data yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum tersebut menunjukkan kesenjangan gender yang amat sangat signifikan. Dikarenakan dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang ternyata hanya ada 4 orang perempuan saja dan berasal dari PDIP, Partai Golkar, dan PSI yang bisa menjadi anggota DPRD Kota Denpasar. Kondisi seperti ini perlu disikapi mengingat dalam negara demokrasi, isu kesetaraan gender seharusnya lebih dimunculkan dan tidak sekadar retorika melainkan aksi nyata. Peran partai politik sebagai instrumen sistem demokrasi sudah semestinya mengambil langkah tegas dalam melakukan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang posisi mereka terkait isu kesetaraan gender. Proses sosialisasi dan edukasi semacam itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya langkah konkret kaderisasi baik anggota, caleg maupun upaya meloloskan perempuan dalam posisi strategis yang notabena lebih sulit meraih sektor publik akibat dominasi sistem patriarki.

Tabel : 7.9. Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Partai Periode 2019-2024 dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar

No	Partai	Periode 2019-2024		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	0	0	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	4	0	4
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	20	2	22
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	7	1	8

5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
6	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	0	0	0
7	Partai Berkarya	0	0	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	0	0	0
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	0	0
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	1	2
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	0	0	0
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	0	2
14	Partai Demokrat	4	0	4
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0
JUMLAH		41	4	45

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

7.2.2 Pimpinan Partai Politik

Berdasarkan Tabel 7.10, pimpinan partai politik di Kota Denpasar berjumlah 23 orang, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Perubahan (Garuda), Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrat.

Tabel : 7.10. Jumlah Pimpinan Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Partai	Tahun 2021		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	0	2
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1	0	1
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	0	1	1
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	0	1
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	0	1
6	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	1	0	1
7	Partai Berkarya	4	0	4
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	0	1
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	0	1	1
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	1
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	4	1	5
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2	0	2
14	Partai Demokrat	1	0	1
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0
JUMLAH		20	3	23

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

Terjadi ketimpangan gender, dimana jumlah pimpinan perempuan hanya berjumlah 3 orang yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Persatuan

Indonesia (Perindo), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Terkait dengan jumlah pengurus partai politik, terjadi kondisi yang sama dimana jumlah perempuan (151 orang) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pengurus laki-laki (347 orang).

Tabel : 7.11. Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) Menurut Nama Partai dan Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Partai	Tahun 2021		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	74	22	96
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17	19	36
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan	30	14	44
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	37	18	55
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	20	7	27
6	Partai Gerakan Perubahan (Garuda)	5	2	7
7	Partai Berkarya	44	12	56
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3	2	5
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3	2	5
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	7	8	15
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	3	2	5
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	14	6	20
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	18	9	27
14	Partai Demokrat	72	28	100
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	0	0	0
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0	0	0
JUMLAH		347	151	498

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

Kondisi diatas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan.

Saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%. Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya pengambilan keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Dengan adanya pembentukan dari Rancangan Perpres “*Grand Design* Keterwakilan Perempuan” pada dunia politik di Indonesia dapat menjadi angin segar bagi seluruh perempuan yang ingin ikut berpartisipasi secara langsung mewakili aspirasi dari kaum perempuan. Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di lembaga legislatif terdapat dua metode, yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu kementerian dan lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital.

7.2.3 Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan suatu lembaga pengawas Pemilu yang dibentuk dan bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ini diatur

di dalam bab IV Undang-undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada Tabel 7.12 menunjukkan jumlah anggota Bawaslu dan PPL di Kota Denpasar Tahun 2021. Jumlah anggota perempuan (1 orang) lebih sedikit dibandingkan laki-laki (4 orang). Terjadi ketimpangan gender.

Tabel : 7.12. Jumlah Anggota Bawaslu Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	4	1	5
Jumlah		4	1	5

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2022

7.2.4 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 orang; KPU Provinsi sebanyak 5 orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota lima tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Jumlah KPU di Kota Denpasar adalah 5 (lima) orang. KPU Kota Denpasar terdiri atas 3 laki-laki dan 2 orang perempuan.

Tabel : 7.13. Jumlah Anggota KPU Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar	3	2	5
Jumlah		3	2	5

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

7.2.5 Panitia Pemilihan Kecamatan

PPK adalah lembaga penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam penyelenggaraan pemilukada, PPK bebas dari pengaruh manapun berkaitan

dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah semestinya setiap penyelenggaraan pemilu harus memiliki kredibilitas yang terpercaya, penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah hendaknya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib dalam menyelenggarakan pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas efisiensi dan efektivitas. Eksistensi institusi penyelenggaraan pemilihan umum menjadi salah satu aspek yang penting yang cukup mempengaruhi dinamika pemilihan umum. Netralitas PPK memang menjadi syarat penting bagi penyelenggaraan pemilihan umum, selanjutnya menyusul soal integritas, kapasitas dan profesionalisme. PPK dalam kerjanya dihadapkan pada proses kerja yang rawan konflik kepentingan serta berhadapan dengan kepentingan politik.

Secara keseluruhan, jumlah PPK di Kota Denpasar pada tahun 2020 adalah 20 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah anggota PPK di Denpasar menunjukkan ketimpangan gender. Jumlah anggota PPK laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan untuk setiap kecamatan.

Tabel : 7.14. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PPK (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	3	2	5
2	Denpasar Utara	4	1	5
3	Denpasar Timur	4	1	5
4	Denpasar Selatan	4	1	5
Total		15	5	20

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

7.2.6 Panitia Pemungutan Suara

Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau nama lain. PPS merupakan tulang punggung demokrasi karena merekalah basis utama atas integritas hasil pemilu. PPS juga memiliki peran krusial dalam penetapan daftar pemilih tetap sampai pemungutan suara pada tingkat TPS. Integritas PPS sangat penting secara politis karena terkait erat dengan kepercayaan pemilih terhadap pemilu yang merupakan bagian dari proses politik. Tugas, wewenang dan kewajibannya telah diatur berdasarkan Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada tabel di bawah ini terlihat bahwa terjadi ketimpangan gender yang signifikan di setiap kecamatan. Secara keseluruhan terdapat 129 orang anggota PPS pada tahun 2020 yang terdiri atas 113 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Kaum perempuan lebih cenderung kecil untuk terlibat dalam PPS karena diperlukan fisik yang lebih besar untuk tugas ini.

Tabel : 7.15. Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PPS (Orang)		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Denpasar Barat	28	5	33
2	Denpasar Utara	31	2	33
3	Denpasar Timur	26	7	33
4	Denpasar Selatan	28	2	30
Total		113	16	129

Sumber : KPU Kota Denpasar, 2022

7.2.7 KPPS dan PK TPS

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Sedangkan tugas dan wewenang Petugas Ketertiban (PK) TPS adalah mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara; mengawasi pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara; mengawasi pelaksanaan penghitungan suara; menyampaikan keberatan dalam hal ditemukanya dugaan pelanggaran, kesalahan, dan penyimpangan admpemungutan dan penghitungan suara; menerima salinan Berita Acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.

Pada tahun 2020, di Kecamatan Denpasar Barat jumlah KPPS adalah 1.799 orang laki-laki dan 672 orang perempuan. Sedangkan jumlah PK TPS adalah 702 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Terjadi ketimpangan gender.

Tabel: 7.16 Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Barat

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH						
		TPS	KPPS			PK TPS		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Dauh Puri	18	80	46	126	35	1	36
2.	Dauh Puri Kauh	26	127	55	182	52	0	52
3.	Dauh Puri Kangin	9	40	23	63	17	1	18
4.	Dauh Puri Klod	23	90	71	161	45	1	46
5.	Padangsambian	54	305	73	378	107	1	108
6.	Padangsambian Kaja	30	159	51	210	60	0	60
7.	Padangsambian Kelod	36	207	45	252	72	0	72
8.	Pemecutan	46	239	83	322	92	0	92
9.	Pemecutan Kelod	58	297	109	406	116	0	116
10.	Tegal Harum	24	110	58	168	48	0	48
11.	Tegal Kerta	29	145	58	203	58	0	58
	Total	353	1.799	672	2.471	702	4	706

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2022

Di Kecamatan Denpasar Utara terdapat KPPS sebanyak 1.585 orang laki-laki dan 578 orang perempuan. Sedangkan jumlah PK TPS adalah 618 orang laki-laki. Di Kecamatan Denpasar Timur jumlah KPPS sebanyak 1.170 orang laki-laki dan 384 orang perempuan. Jumlah PK TPS di kecamatan ini adalah 444 orang laki-laki. Di Kecamatan Denpasar Selatan, jumlah KPPS laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 1.737 orang dan 489 orang perempuan. Sedangkan jumlah PK TPS adalah 630 orang laki-laki dan 6 orang perempuan.

Tabel: 7.17 Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Utara

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH						
		TPS	KPPS			PK TPS		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Dangin Puri Kaja	25	98	77	175	50	0	50
2.	Dangin Puri Kangin	19	101	32	133	38	0	38
3.	Dangin Puri Kauh	14	68	30	98	28	0	28
4.	Dauh Puri Kaja	36	161	91	252	72	0	72
5.	Peguyangan	29	135	68	203	58	0	58
6.	Peguyangan Kaja	19	127	6	133	38	0	38
7.	Peguyangan Kangin	31	159	58	217	62	0	62
8.	Pemecutan Kaja	48	255	81	336	96	0	96
9.	Tonja	27	154	35	189	54	0	54
10.	Ubung	18	99	27	126	36	0	36
11.	Ubung Kaja	43	228	73	301	86	0	86
	Total	309	1.585	578	2.163	618	0	618

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2022

Tabel: 7.18 Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Timur

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH						
		TPS	KPPS			PK TPS		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Dangin Puri	17	76	43	119	34	0	34
2.	Dangin Puri Kelod	25	120	55	175	50	0	50
3.	Kesiman	25	152	23	175	50	0	50
4.	Kesiman Kertalangu	31	176	41	217	62	0	62
5.	Kesiman Petilan	21	112	35	147	42	0	42
6.	Penatih	21	112	35	147	42	0	42
7.	Penatih Dangin Puri	14	88	10	98	28	0	28
8.	Sumerta	15	85	20	105	30	0	30
9.	Sumerta Kaja	16	72	40	112	32	0	32
10.	Sumerta Kauh	13	66	25	91	26	0	26
11.	Sumerta Kelod	24	111	57	168	48	0	48
	Total	222	1.170	384	1.554	444	0	444

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2022

Tabel: 7.19 Jumlah KPPS dan PK TPS di Kecamatan Denpasar Selatan

No	Desa/Kelurahan	JUMLAH						
		TPS	KPPS			PK TPS		
			L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Panjer	40	209	71	280	78	2	80
2.	Pedungan	45	279	36	315	90	0	90
3.	Pemogan	53	306	65	371	106	0	106
4.	Renon	21	115	32	147	41	1	42
5.	Sanur	18	89	37	126	36	0	36
6.	Sanur Kaja	15	72	33	105	30	0	30
7.	Sanur Kauh	21	109	38	147	42	0	42
8.	Serangan	9	48	15	63	18	0	18
9.	Sesetan	65	351	104	455	130	0	130
10.	Sidakarya	31	159	58	217	59	3	62
	Total	318	1.737	489	2.226	630	6	636

Sumber: KPU Kota Denpasar, 2022

7.2.8 Pengawas Pemilu Lapangan

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Atas dasar kewenangan itu, sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilihan, PPL berwenang menerima laporan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilihan yang disampaikan kepadanya.

Tabel : 7.20. Jumlah Anggota Pengawas Pemilu Lapangan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Denpasar Utara PPL	8	3	11
2	Denpasar Timur PPL	5	6	11
3	Denpasar Selatan PPL	9	1	10
4	Denpasar Barat PPL	2	9	11
Jumlah		24	19	43

Sumber : Bawaslu Kota Denpasar, 2022

Tabel 7.20 di atas menunjukkan jumlah panitia Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) di Kota Denpasar Tahun 2021 sebagai berikut. Secara keseluruhan jumlah PPL di Kota Denpasar sebanyak 43 orang dengan rincian 24 orang laki-laki dan 19 orang perempuan. Di Denpasar Utara jumlah PPL sebanyak 11 orang (L=8 orang dan P=3 orang); Denpasar Timur sebanyak 11 orang (L=5 orang dan P=6 orang); Denpasar Selatan 10 orang (L=9 orang dan P=1 orang); dan Denpasar Barat 11 orang (L=1 orang dan P=9 orang).

Data tersebut menggambarkan partisipasi perempuan sebagai anggota PPL cukup bagus. Meskipun demikian bila diperhatikan dengan baik di sana terjadi ketimpangan gender terutama di Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat. Di Denpasar Selatan dan Denpasar Utara jumlah laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan. Sebaliknya, di Denpasar Barat jumlah perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hanya di Denpasar Timur jumlah PPL laki-laki hampir seimbang dengan perempuan. Kondisi ini menunjukkan terjadinya kesetaraan gender.

7.3 Lembaga Yudikatif

Yudikatif sebagai lembaga yang bertugas mengawal dan memantau pelaksanaan perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang atau disebut *adjudication function*. Fungsi dari yudikatif adalah sebagai lembaga pengawal dan pemantau jalannya roda pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai acuannya. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Kehakiman, Kepolisian, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Tabel : 7.21. Persentase Profesi Sektor Penegak Hukum Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

No	Sumber (Dinas)	Jenis Kelamin				Jumlah
		Laki-Laki	(%)	Perempuan	(%)	
1	Hakim	12	85,71	2	14,29	14
2	Jaksa	13	43,33	17	56,67	30
3	Polisi	1194	94,16	74	5,84	1268
4	Advokat	663	73,58	238	26,42	901
5	Notaris	73	48,03	79	51,97	152
Jumlah		1955	82,66	410	17,34	2365

Sumber : Kantor Kehakiman, Kejaksaan, Polresta, Advokat dan Notaris Kota Denpasar, 2022

Pada tabel diatas terlihat bahwa persentase jumlah hakim, polisi, dan advokat masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender. Untuk jumlah jaksa dan notaris tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Jumlah hakim di Kota Denpasar tahun 2021 adalah 85,71% laki-laki dan 14,29% perempuan. Jumlah jaksa laki-laki 43,33% dan 56,67% jaksa perempuan. Jumlah polisi di Kota Denpasar terdiri atas 94,16% laki-laki dan 5,84% perempuan. Jumlah advokat 73,58% laki-laki dan 26,42% perempuan. Jumlah notaris di Kota Denpasar terdiri atas 48,03% laki-laki dan 51,97% perempuan.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Bab VIII ini merupakan bab terakhir dari Buku Profil Statistik Gender Kota Denpasar 2022 yang memuat tentang lain-lain. Lain-lain yang dimaksudkan pada bab ini adalah beberapa hal yang terkait dengan profil gender yang tidak terklasifikasi dan tidak dapat dimuat di dalam bab-bab terdahulu namun dipandang sangat penting untuk dibahas dan disajikan untuk melengkapi isi buku ini. Kelengkapan tersebut dirasa akan mampu menampilkan isi buku lebih berwarna, lebih komprehensif dan lebih holistik. Beberapa hal yang dimaksudkan tersebut diuraikan sebagai berikut.

8.1 Kekerasan

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Pada SNPHAR tahun 2021, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional. Data Sistem Informasi Online (SIMFONI) Kemen PPPA menunjukkan, kasus kekerasan yang menimpa para korban terjadi di berbagai tempat. Paling banyak kasus kekerasan terjadi di rumah tangga, fasilitas umum, dan tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sedangkan kasus kekerasan di sekolah dan tempat kerja jumlahnya kecil. Dari segi jumlah korban, SIMFONI mencatat rumah tangga memiliki

korban kekerasan terbanyak, disusul oleh tempat yang masuk dalam kategori lainnya, sekolah, tempat kerja, dan lembaga pendidikan kilat. Sementara itu, dari jenis kekerasan yang dialami, SIMFONI mencatat bahwa kekerasan seksual menempati urutan pertama, disusul oleh kekerasan fisik, psikis, kekerasan yang masuk dalam kategori lainnya, penelantaran, trafficking, dan eksploitasi (<https://ykp.or.id/kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-jenis-dan-cara-melaporkannya/>).

Pencegahan, penanganan korban dan pelaku adalah tanggung jawab semua pihak: laki-laki, perempuan, lingkungan tetangga, tokoh agama/masyarakat, lembaga pendidikan/agama, dunia usaha maupun pemerintah. Kerjasama antara pusat penanganan krisis bagi perempuan korban (women's crisis center) dengan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah merupakan suatu kemutlakan. Upaya pencegahan dan penanganan korban maupun pelaku yang ada masih jauh dari memadai. Bagi para perempuan penyandang cacat, kondisi ini lebih berat dirasakan. Khusus tentang dukungan bagi korban untuk dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri, sehat dan bermartabat, dibutuhkan beragam dukungan yang bentuknya fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan korban, dan bersifat memberdayakan.

Tabel : 8.1. Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Korban Kekerasan	Anak Perempuan	Anak Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	97	57	85	239
2021	87	50	115	252

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Berdasarkan Tabel 8.2 terjadi peningkatan korban kekerasan, khususnya perempuan. Terdapat 85 orang pada kasus kekerasan perempuan di tahun 2020 dan 115 orang pada tahun 2021. Untuk kasus korban kekerasan pada anak perempuan dan anak laki-laki mengalami penurunan masing-masing sebesar 10,31% dan 12,28%. Kekerasan terhadap perempuan berakar dari ketidakseimbangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak mereka atas keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Tak bisa dimungkiri bahwa kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga masih menjadi kasus kekerasan paling tinggi. Padahal tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, menurut pasal 1 UU PKDRT. Salah satu hal yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan ini masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki. Sebagai

informasi, budaya patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, sehingga ia dapat menguasai dan mengontrol perempuan. Dengan kata lain, dalam budaya ini perempuan ter subordinasi atau menjadi orang nomor dua. Selain itu, didukung pula dengan adanya stereotipe gender yang menganggap perempuan lemah dan laki-laki selalu kuat. Perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga bisa terjadi karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) yakni perempuan sebagai orang nomor dua dapat diperlakukan dengan cara apa saja.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak kekerasan pada perempuan ini tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun terdapat jenis kekerasan lainnya, yakni: 1). Kekerasan emosional merupakan tindakan yang menyebabkan korban ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain tindakan berupa cacian dan makian, tanda perilaku kasar pada perempuan dalam rumah tangga yang menyerang psikis ini juga berupa pelarangan, pemaksaan, dan isolasi social; 2). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Tindakan yang termasuk pada kekerasan fisik meliputi menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya; 3). Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga umumnya adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual dan pelecehan seksual. Perlu diketahui, pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki oleh istri juga termasuk dalam kekerasan seksual; 4). Kekerasan ekonomi dimana ini juga biasa disebut

dengan kekerasan penelantaran rumah tangga. Jenis kekerasan ini berhubungan dengan memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan. Tindakan kekerasan ini dapat berupa tidak memberikan nafkah, membatasi finansial korban dengan tidak wajar, atau bahkan menguasai penghasilan pasangan sepenuhnya.

Diantara bentuk kekerasan yang ada di Kota Denpasar, perebutan kuasa asuh anak menduduki posisi yang paling tinggi yaitu sebanyak 47 orang (laki-laki dan perempuan) pada tahun 2020 dan bentuk kekerasan psikis pada tahun 2021 sebanyak 50 orang (laki-laki dan perempuan). Bentuk kekerasan lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan; tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku; tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya. Sejuahmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui Visum et Psikiatrikum, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. Visum et Psikiatrikum ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

Tabel : 8.2. Bentuk-bentuk Kekerasan di Kota Denpasar Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 dan 2021

Bentuk Kekerasan	2020			2021		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Fisik	2	25	27	3	33	36
Fisik Lainnya	5	6	11	0	7	7
Psikis	4	29	33	4	46	50
Psikis Lainnya	3	12	15	1	17	18
Seksual	2	8	10	0	9	9
Seksual Lainnya	1	25	26	2	21	23
Penelantaran	6	27	33	7	24	31
TTPO	0	2	2	0	0	0
ABH	12	0	12	12	0	12
Perkawinan Anak	1	1	2	0	0	0
Perebutan Kuasa Asuh Anak	14	33	47	15	24	39
Kasus Lainnya	7	14	21	6	21	27
Total	57	182	239	50	202	252

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Pada dasarnya, kekerasan bisa dialami dan dilakukan oleh siapa saja, tak terbatas usia, jenis kelamin, atau status sosial. Hanya saja, perempuan menjadi kelompok paling tinggi sebagai korban kekerasan.

Menurut World Health Organization (WHO), satu dari tiga perempuan di seluruh dunia pernah menjadi korban kekerasan, baik secara fisik maupun seksual, yang dilakukan oleh pasangannya. Artinya, sekitar 30 persen perempuan pernah mengalami peristiwa tak menyenangkan itu. Jika dilihat dari persentase korban kekerasan menurut jenis kelamin, pada tahun 2020 dan tahun 2021 lebih banyak terjadi pada perempuan. Pada tahun 2020 sebanyak 85,2% dan pada tahun 2021 sebanyak 90,2% (<https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/wanita/perempuan-rentan-jadi-korban-kekerasan-mengapa-dan-apa-yang-harus-dilakukan/>).

Tabel : 8.3. Persentase Korban Kekerasan Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2020	14,8%	85,2%
2021	9,8%	90,2%

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Korban kekerasan juga terjadi pada anak-anak. Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 11.057 pada 2019, 11.278 kasus pada 2020, dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada 2019, 12.425 pada 2020, dan menjadi 15.972 (<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>).

Persentase kekerasan pada anak di Kota Denpasar pada anak laki-laki di tahun 2021 sebesar 37% dan anak perempuan sebesar 63%. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kekerasan pada anak perempuan sebesar 63,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan pada anak-anak masih terjadi dominan pada anak perempuan. Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan dilakukan dengan berbasis sistem. Sistem yang digunakan yakni melalui pencegahan, pengurangan resiko kerentanan, dan penanganan korban yang terangkum dalam satu sistem data dan informasi. Tentunya pendekatan sistem ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak diantaranya orang tua, keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Tabel : 8.4. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Dinas P3A Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2020	37 %	63 %
2021	36,5 %	63,5 %

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Komite Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (General Recommendation No. 19 (1992) CEDAW Committee) menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender yang dimaksud adalah berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang terjadi yang berakar pada perbedaan berbasis gender dan jenis kelamin yang sangat kuat di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan jumlah KDRT di Kota Denpasar pada tahun 2021 meningkat 22,33% dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 jenis KDRT yang paling tinggi adalah psikis dan penelantaran, sedangkan pada tahun 2021 adalah jenis KDRT psikis.

Tabel : 8.5. Jumlah KDRT dan Rumah Tangga di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Jenis KDRT	2020	2021
KDRT (Fisik)	27	36
KDRT (Psikis)	33	50
KDRT (Seksual)	10	9
KDRT (Penelantaran)	33	31
Jumlah	103	126

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Dilihat dari penanganan pengaduan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak didapatkan terjadi peningkatan penanganan. Terdapat 239 kasus korban kekerasan (perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki) yang berhasil ditangani di tahun 2020 dan 252 kasus korban kekerasan di tahun 2021.

Tabel : 8.6. Jumlah Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Tahun 2020 dan 2021

Korban Kekerasan	Tahun	
	2020	2021
Perempuan	85	115
Anak Perempuan	97	87
Anak Laki-laki	57	50
Jumlah	239	252

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTPPA). PPTPPA adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya.

Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), data tahun 2020 menunjukkan terdapat 2 orang perempuan pada kasus ini. Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan itu.

Tabel : 8.7. Jumlah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2020 dan 2021

Tahun	Anak Perempuan	Anak Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2020	2	0	0	2
2021	0	0	0	0

Sumber : PPTPPA Kota Denpasar, 2022

Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau trafficking dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama pemetaan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang beserta seluruh aspek yang terkait dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social. Cara-cara tersebut terkesan sangat ideal, tinggal bagaimana implementasinya secara nyata.

8.2 Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

Sepintas keberadaan gepeng tidak menimbulkan permasalahan secara langsung, akan tetapi apabila ditilik lebih lanjut gepeng dapat meresahkan masyarakat, menimbulkan gangguan kamtibmas, dan mencemari lingkungan. Kehadiran gepeng dianggap sebagian orang mengganggu keamanan saat di tempat umum karena tidak jarang gepeng meminta uang dengan memaksa, mengotori lingkungan serta memiliki citra negatif bagi masyarakat luas. Ciri-ciri gepeng yang mudah dijumpai adalah gepeng tidak memiliki tempat tinggal tetap, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, berusia produktif hingga lansia, sebagian terdapat yang membawa balita, serta meninggalkan daerah asal di pedesaan untuk berpindah ke daerah perkotaan.

Banyak ditemukan gepeng yang berada di kota-kota besar adalah warga pendatang dari pedesaan. Alasan menjadi gepeng juga bermacam-macam. Mulai dari sulitnya mencari pekerjaan di daerah pedesaan, lahan tanah yang tandus dan gersang sehingga tidak dapat bercocok tanam, serta rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang menyebabkan seseorang berpindah ke daerah perkotaan untuk menjadi gepeng. Urbanisasi dilakukan karena kota dirasa menjanjikan masa depan yang lebih baik bagi para gepeng. Tidak seperti daerah pedesaan yang minim lapangan pekerjaan dan perekonomian yang relatif sepi, daerah perkotaan dianggap paling cocok untuk dijadikan tujuan menjadi gepeng. Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat. Sedangkan pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Gepeng adalah seorang yang hidup mengelandag dan sekaligus mengemis. Oleh karna tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Data yang tersaji dalam tabel di atas diperoleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Denpasar. Data terpilah mengenai gepeng yang telah dibina dan dipulangkan Tahun 2021 berjumlah 183 orang dengan rincian laki-laki 94 orang dan

perempuan 89 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah gepeng laki-laki lebih banyak dibandingkan gepeng perempuan.

Tabel : 8.8. Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Terjaring dan Telah Dibina Dipulangkan ke Daerah Asal Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	2021		
	L	P	Jumlah
0-4 Tahun	23	11	34
5-9 Tahun	14	15	29
10-14 Tahun	10	10	20
15-18 Tahun	7	2	9
19 Tahun Keatas	40	51	88
Jumlah	94	89	183

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2022

8.3 Lansia (Lanjut Usia) PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Memasuki periode kehidupan lanjut usia artinya menduduki puncak dari siklus hidup manusia, periode lanjut usia merupakan periode terakhir dari siklus kehidupan manusia. Periode lanjut usia sering kali ditandai dengan menurunnya fungsi organ-organ biologis, selain itu lanjut usia identik dengan masa pensiun. Di Indonesia sendiri penduduk lanjut usia terus mengalami peningkatan jumlah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) dalam kurun waktu 1971-2019 struktur

penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dan mulai bergeser menuju lanjut usia (Susenas BPS).

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Dalam hal ini lanjut usia yang didata adalah lansia PPKS, yaitu lanjut usia telantar yang merupakan seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kriterianya adalah tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan terlantar secara psikis, dan sosial.

Sementara data pada tahun 2019 menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, 18 juta penduduk lansia pada tahun 2010 atau sekitar 7,56% dari total jumlah penduduk di Indonesia, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 25,9 juta penduduk lansia atau sekitar 9,7% dari total jumlah penduduk di Indonesia, dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2035 diperkirakan mencapai 48,2 juta jiwa atau sekitar 15,77% dari total jumlah penduduk di Indonesia.

Tabel : 8.9. Jumlah Lansia PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) Menurut Jenis Kelamin di Kota Denpasar Tahun 2021

NO	Kecamatan	Usia 60 Tahun		Total
		L	P	
1	Denpasar Utara	51	87	138
2	Denpasar Timur	18	34	52
3	Denpasar Selatan	9	11	20
4	Denpasar Barat	17	36	53
Jumlah		95	168	263

Sumber : Dinas Sosial Kota Denpasar, 2022

Lansia yang sudah mengalami kemunduran fisik tak banyak gerak bisa dilakukan, apalagi ketika ditimpa penyakit. Rasio ketergantungan lansia di Indonesia kepada orang muda cukup tinggi, hal tersebut dapat menjadi suatu permasalahan salah satunya muncul kekerasan terhadap orang tua atau *elderly abuse* seperti orang tua tidak diurus atau ditinggalkan. Berdasarkan hasil sebuah penelitian mengemukakan bahwa lansia di Indonesia berada pada kelompok rentan secara ekonomi, sebanyak 6,3% lansia tinggal sendiri hal ini tentu beresiko tinggi dikarenakan kemampuan fisik, kondisi kesehatan, dan perubahan mental sosial dari lansia yang cenderung terus menurun (<https://puspensos.kemensos.go.id/permasalahan-lansia-di-indonesia-upaya-penangannya>).

Berdasarkan data diatas, jumlah lansia PPKS di Kota Denpasar pada tahun 2021 adalah 255 orang, terdiri dari 94 orang laki-laki dan 161 orang perempuan. Terjadi ketimpangan

gender dalam jumlah lansia tersebut. Daya tahan hidup seorang perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Program perlindungan pemerintah pusat yang digulirkan saat ini melalui Kementerian Sosial menyelenggarakan dua program bantuan sosial bagi lansia, yaitu :

1. Program Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (Bantu LU)

Program ini bertujuan untuk memberikan rehabilitasi sosial, pendampingan, dukungan teknis, dan dukungan aksesibilitas bagi lansia agar dapat memulihkan dan mengembangkan fungsi sosialnya. Sasaran dari program ini yaitu lansia yang tinggal sendiri, bersama pasangan, baik yang potensial maupun yang tidak potensial. Program ini diberikan bukan pada lansia penerima PKH. Pada tahun 2019, besaran bantuan ini untuk setiap lansia yaitu Rp. 2.400.000 per tahun yang disalurkan melalui rekening milik lansia itu sendiri atau wali yang telah ditunjuk.

2. PKH Komponen Lansia

Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2016 memasukan lansia sebagai komponen penerima manfaat. Setiap KPM PKH yang memiliki anggota keluarga lansia mendapatkan tambahan bantuan dana. Lansia penerima manfaat program PKH diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup. Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan lansia sebagai penerima manfaat PKH diantaranya yaitu, minimal satu kali dalam satu tahun memeriksakan kesehatan, mengakses layanan *home care* dan *day care*.

BAB IX

PENUTUP

9.1 Simpulan

Secara umum dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, publik dan lain-lain masih terjadi kesenjangan gender di Kota Denpasar. Kesenjangan gender tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pendidikan

- a. Secara umum APK, APS dan APM di semua jenjang pendidikan tidak menunjukkan kesenjangan gender yang signifikan.
- b. Jumlah PAUD, SD, SMP laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah anak perempuan. Terjadi kesenjangan gender namun tidak signifikan.
- c. Siswa putus sekolah tingkat SD dan SMP masih terjadi. Di Kecamatan Denpasar Barat menduduki posisi paling tinggi.
- d. Dilihat dari perspektif gender terjadi ketimpangan yang sangat menonjol dimana jumlah guru laki-laki jauh lebih sedikit jumlahnya dibandingkan guru perempuan.

2. Kesehatan

- a. Pemberian ASI eksklusif mengalami penurunan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 53,43%.

- b. Status gizi di Kota Denpasar tergolong baik selama dua tahun terakhir ini.
- c. Masing-masing UPTD Puskesmas di Kota Denpasar memiliki pojok ASI.
- d. Cakupan imunisasi pada bayi di setiap kecamatan di Kota Denpasar mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir.
- e. Secara keseluruhan jumlah dokter umum di Kota Denpasar mengalami peningkatan 19,39% selama dua tahun terakhir. Terjadi ketimpangan gender antara jumlah dokter umum laki-laki dengan jumlah dokter umum perempuan, dimana dokter umum perempuan lebih banyak dibandingkan dokter umum laki-laki. Kondisi ini sama dengan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi.
- f. Jika dilihat berdasarkan peserta KB aktif, persentase penggunaan alat KB AKDR/IUD/Spiral paling tinggi dibandingkan alat KB lainnya baik pada tahun 2020 maupun pada tahun 2021.

3. Ekonomi

- a. Tidak terjadi ketimpangan gender terkait dengan jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2020 dan 2021.
- b. Terkait dengan persentase penduduk yang bekerja, secara keseluruhan tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai menduduki posisi yang paling tinggi selama dua tahun terakhir.

- c. Jumlah tenaga penyuluh pertanian lebih banyak didominasi oleh perempuan sehingga terjadi ketimpangan gender.
- d. TPAK Denpasar selama kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan tren menurun. Terjadi ketimpangan gender, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan.
- e. Terkait dengan tenaga kerja asing, tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan.
- f. Jumlah tenaga kebersihan dan pertamanan lebih didominasi oleh laki-laki sehingga terjadi ketimpangan gender yang signifikan.
- g. Jumlah juru parkir juga lebih didominasi oleh laki-laki.
- h. Terjadi ketimpangan gender yang signifikan di sektor pariwisata.
- i. Di bidang jasa, pemilik salon lebih banyak didominasi oleh perempuan. Terjadi ketimpangan gender yang signifikan.

4. Sektor Publik

- a. Di bidang eksekutif terjadi ketimpangan gender namun tidak signifikan untuk jumlah ASN dan non ASN serta yang mengikuti diklat.
- b. Berdasarkan unit kerja, terjadi ketimpangan yang signifikan di tingkat PAUD dan SD.
- c. Komposisi ASN menurut golongan kepegawaian terjadi ketimpangan gender meskipun tidak signifikan.

- d. Di bidang legislatif terjadi ketimpangan gender yang signifikan.
 - a. Di bidang yudikatif persentase jumlah hakim, polisi, dan advokat masih didominasi oleh laki-laki. Terjadi ketimpangan gender. Untuk jumlah jaksa dan notaris tidak terjadi ketimpangan gender yang signifikan.
5. Lain-lain

Kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga masih menjadi kasus kekerasan paling tinggi. Salah satu hal yang membuat tindakan kekerasan pada perempuan ini masih menjamur adalah adanya nilai-nilai yang diyakini masyarakat yakni perihal budaya patriarki.

9.2 Rekomendasi

Beberapa hal yang dapat disarankan adalah sebagai berikut.

- (1) Dalam bidang pendidikan perlu dilakukan penyesuaian jumlah guru secara adil untuk laki-laki dan perempuan di setiap kecamatan; memberikan beasiswa secara penuh kepada siswa yang terkategori miskin sehingga tidak terjadi kasus putus sekolah.
- (2) Dalam bidang kesehatan, perlu dilakukan penempatan dokter umum lebih merata di masing-masing kecamatan antara laki-laki dan perempuan. Para dokter yang mendapatkan penempatan di desa perlu diberikan insentif dan pelatihan secara berkala.

- (3) Dalam bidang ekonomi, perlu diberikan akses dan kesempatan bagi tenaga kerja perempuan untuk masuk ke sektor pariwisata.
- (4) Dalam sektor publik, perempuan juga diberikan akses, kesempatan, dan pelatihan-pelatihan kepemimpinan serta pelatihan yang terkait dengan politik demokrasi oleh pemda setempat atau pemerintah pusat.
- (5) Di bidang lainnya, perlu tindakan perlindungan, pendampingan secara utuh dan bantuan sosial melalui pelatihan ketrampilan bagi korban kekerasan.
- (6) Untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender secara berkelanjutan, maka pelatihan penyusunan perencanaan yang responsive gender (PPRG) dan penganggaran yang responsive gender (ARG) perlu dilakukan secara berkesinambungan di tingkat OPD dan di tingkat universitas sehingga lebih responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Elliott, C. M. (Ed.). (2007). *Global empowerment of women: Responses to globalization and politicized religions*. Routledge.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). *Rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024: Indonesia berpenghasilan menengah - tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Diakses 12 September 2019 dari [https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024 Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/rpjmn/Narasi%20RPJMN%20IV%202020-2024%20Revisi%2014%20Agustus%202019.pdf)
- Klasen, S., & Lamanna, F. (2009). The impact of gender inequality in education and employment on economic growth: New evidence for a panel of countries. *Feminist Economics*, 15(3), 91-132. doi: <https://doi.org/10.1080/13545700902893106>.
- Muhammad Arif Fahrudin Alfana 1 Desta Fauzan A 2 Warastri Laksmiasri 3 Ayu Rahmaningtias. *Dinamika Pembangunan Manusia Berbasis Gender Di Indonesia*. Seminar Nasional Geografi UMS 2015.
- Ni Kadek Sri Utari, I Gede Setiawan Adi Putra, Nyoman Parining. *Strategi Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Sanur Asri Lestari dalam Pengembangan Urban Farming di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan* *Jurnal*

Agribisnis dan Agrowisata ISSN:2685-3809 Vol. 9,
No. 3, Desember 2020. Hal. 384-393.

Seguino, S. (2000). Accounting for gender in Asian economic growth. *Feminist Economics*, 6(3), 27-58. doi: <https://doi.org/10.1080/135457000750020128>.

Sumodiningrat, G. (1999). Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Gramedia Pustaka Utama.

World Bank. (2011). World development report 2011: Conflict, security, and development. World Bank. Diakses 12 September 2019 dari <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4389>.